



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

BULETIN VIRAJATI

MEDIA KOMUNIKASI ONLINE SESCOAD

Edisi X Juli 2021

Tingkatkan Kualitas SDM

Seskoad Bangun Sistem Pembelajaran Baru



ISBN 388053101-3



9 703880 531016

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, Buletin Virajati Seskoad Online edisi X bulan Juli 2021 kembali hadir dihadapan para pembaca dengan menyajikan berbagai informasi pilihan menarik dan bermanfaat.

Pada kesempatan edisi kali ini, Buletin Virajati Seskoad mengangkat tajuk **“Tingkatkan Kualitas SDM, Seskoad Bangun Sistem Pembelajaran Baru”**. Tema ini diangkat merupakan salah satu upaya Seskoad sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kualitas SDM bagi perwira siswa yang merupakan calon pemimpin TNI/TNI AD ke depan dihadapkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Selain mengulas materi utama, dalam buletin edisi kali ini juga menyajikan sejumlah tulisan penting dan menarik, yakni Seminar PKB Kejuangan Pasis Sesko TNI, Sespimti, Sesko Angkatan dan Sespimmen Polri TA. 2021, Analisis Gelar Kekuatan Matra Darat dalam rangka Memperkuat Wilayah Pertahanan Ibukota Negara, Kekuatan Armada Laut AS, Postur Angkatan Bersenjata Finlandia dan Republik Dominika, Kepemimpinan Strategis Saddam Hussein serta beberapa informasi menarik lainnya.

Kami berharap berbagai tulisan yang disajikan bermanfaat bagi prajurit TNI AD dan kalangan masyarakat luas, menjadi bacaan literasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna memberikan sumbangsih untuk masyarakat, bangsa dan negara. Demi peningkatan kualitas Buletin Seskoad kedepan, saran masukan pembaca kami nantikan.

Redaksi

BULETIN VIRAJATI

Pelindung

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, M.A.

Pembina

Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si,

Penasihat

Brigjen TNI Dwi Endrosasongko, S.Sos.

Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Drs. Paiman

Wakil Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Roy H.J. Sinaga, S.Sos.

Redaktur Pelaksana

Kolonel Chb Muhamad Mukson

Kolonel Inf Singgih Pambudi Arianto, S.I.P., M.M.

Sekretaris Redaksi

Mayor Chb Untung

Staf Redaksi

Mayor Inf Gede Agus Dian Pringgana, S.Sos., MMAS.

Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, S.E., MMAS.

Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos.

Reporter

Letda Inf Asmadi

Fotografer

Serma Winarna

Desain Grafis

Sertu Faizal Ridho Ilhami

Penata Muda/III-A Rendra Boyke, S.Pd., M.Pd.

Alamat Redaksi

Seskoad Jl. Jend. Gatot Subroto 96 Bdg

Alamat Email

buletinvirajati@gmail.com

Website

<http://www.seskoad.mil.id>

Facebook

<https://www.facebook.com/Buletinvirajati>

Instagram

<https://www.instagram.com/Buletinvirajati>

Disclaimer :

- Semua hasil karya yang dimuat dalam “Jurnal Virajati” adalah menjadi hak cipta <http://www.seskoad.mil.id>.
- Tulisan dalam “Jurnal Virajati” merupakan buah pemikiran dan menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan pandangan organisasi Seskoad.
- Ide dan gagasan berbentuk tulisan essay dapat disampaikan kepada redaksi melalui email Redaksi



DAFTAR ISI

TINGKATKAN KUALITAS SDM SESKOAD BANGUN
SISTEM PEMBELAJARAN BARU
YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN MODERN
Tim Redaksi Buletin Seskoad

4

PENGEMBANGAN POSTUR PERTAHANAN
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK DOMINIK
Kompol Arief Prasetya S.I.K., M.Med.Kom,

32

SEMINAR PKB KEJUANGAN
PACIS SESKO TNI, SESPIMTI, SESKO ANGKATAN
DAN SESPIMMEN POLRI TA. 2021
Tim Redaksi Buletin Seskoad

9

KEPEMIMPINAN STRATEGIS
SADDAM HUSSEIN
DALAM SEJARAH PEPERANGAN DI IRAQ
Letkol Arh Dr.Heri Wijanarko.S.Sos.,M.Sc

39

ANALISIS GELAR KEKUATAN MATRA DARAT
DALAM RANGKA MEMPERKUAT WILAYAH
PERTAHANAN IBU KOTA NEGARA
Focus Group Discussion litbangsismet Seskoad

13

SINERGI MILITER DAN SIPIL DALAM SISTEM
PERTAHANAN DI NEGARA KUWAIT
Mayor Inf Edi Tri Heri Mulyanto

44

KEKUATAN ARMADA LAUT
AMERIKA SERIKAT
Mayor Cba I Ketut Arsana Putra,S.T.,M.Sc.

22

SINERGI PERAN MILITER DAN SIPIL DALAM
SISTEM PERTAHANAN DI NEGARA UKRAINA
Kompil Lilik Ardiansyah, SH, SIK, MIR, CPHR

41

POSTUR ANGKATAN BERSENJATA NEGARA
FINLANDIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN
MILITER DEWASA INI
Letkol Inf Deksi Van Toni, S.H., M.M.

25

PERAN DIPLOMASI DAN NEGOSIASI DALAM
MENCEGAH PERANG DI NEGARA REPUBLIC OF
SERBIA
Mayor Inf Agus Purwanto, S.Psi

47



TINGKATKAN KUALITAS SDM SESKOAD BANGUN SISTEM PEMBELAJARAN BARU YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN MODERN

Tim Redaksi Buletin Seskoad

Dalam rangka meningkatkan hasil didik yang semakin berkualitas, Seskoad telah menerapkan sistem pembelajaran baru Adult Learning System atau sistem belajar dewasa serta mengimplementasikan melalui metode belajar berbasis *Student Learning Center* atau belajar terpusat kepada Perwira Siswa (Pasis). Metode belajar tersebut didukung dengan budaya membaca, budaya diskusi, budaya menulis dan budaya komunikasi, sehingga Pasis diharapkan fokus pada olah pikir dengan analisa yang kritis dan dihasilkan produk yang kreatif dan inovatif

Demikian disampaikan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Mayjen TNI DR. Anton Nugroho, MMDS., M.A., ketika membuka Pendidikan Reguler (Dikreg) LXI Seskoad TA. 2021 secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan bertempat di Gedung Gatot Soebroto, Seskoad Bandung, Rabu (16/6/2021), yang diikuti para Pasis dari satuan masing-masing. Dikreg ke-61 Seskoad yang akan berlangsung selama 6 bulan ini diikuti oleh 462 Pasis, terdiri dari 434 orang Pasis TNI AD, 2 orang Pasis TNI AL, 2 orang Pasis TNI AU, 23 orang Pasis Polri dan 1 orang Pasis dari Negara Sahabat Australia



DANSESKOAD

MAYJEN TNI DR. ANTON NUGROHO MMDS., M.A.

Dalam kesempatan tersebut, Danseskokad juga menegaskan bahwa sebagai *Center of Excellence*, Seskoad adalah lembaga pendidikan umum tertinggi di lingkungan TNI AD sekaligus melaksanakan pengkajian strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Salah satu implementasi transformasi TNI AD, menurut Danseskokad adalah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya prajurit. Pengkajian dan penyempurnaan terhadap sistem Pendidikan Reguler Seskoad yang dilakukan secara terus menerus sebagai upaya peningkatan kualitas keluaran Seskoad dihadapkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Usai pembukaan Dikreg LXI, Komandan Seskoad dengan didampingi para pejabat struktural Seskoad memberikan Jam Komandan kepada seluruh Pasis Dikreg LXI secara virtual. Dalam arahannya, Mayjen TNI Anton Nugroho, antara lain menyampaikan tentang Sistem Pembelajaran dan Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan Seskoad dalam kondisi pandemi Covid-19.



Perlu diketahui bahwa pada program pendidikan reguler tahun 2021 ini, Seskoad mendidik 913 orang Pasis, yang terbagi dalam 2 gelombang per 6 bulan, yakni Dikreg 60 sebanyak 451 orang dan Dikreg 61 sebanyak 462 orang, dimana pada masing-masing gelombang terbagi dalam dua tahap, yakni tahap out campus dan tahap *in campus*. Untuk mencetak Perwira TNI AD yang unggul dan berkarakter, kegiatan pendidikan di Seskoad dilaksanakan dengan prioritas *safety* (aman), *comfort* (nyaman) dan *simple* (efektif dan efisien).

Sistem Pembelajaran Baru di Seskoad.

Pertama, Sistem Belajar Dewasa (*Adult Learning System*). *Adult Learning* atau Andragogi adalah suatu model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri atas orang dewasa. Andragogi disebut juga sebagai teknologi pelibatan orang dewasa dalam pembelajaran. Proses pembelajaran dapat terjadi dengan baik apabila metode dan teknik pembelajaran melibatkan peserta didik. Malcolm Knowles (1986), menyebutkan prinsip pembelajaran orang dewasa, yakni : a. Orang

dewasa perlu terlibat dalam merancang dan membuat tujuan pembelajaran. Mereka mesti memahami sejauh mana pencapaian hasilnya. b. Pengalaman adalah asas aktivitas pembelajaran. Menjadi tanggung jawab peserta didik menerima pengalaman sebagai suatu yang bermakna. c. Orang dewasa lebih berminat mempelajari perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan kerja dan kehidupan mereka, dan; d. Pembelajaran lebih tertumpu pada masalah dan membutuhkan dorongan dan motivasi.

Dalam sistem belajar dewasa, siswa bukanlah suatu 'wadah' yang kosong, melainkan 'wadah' yang sudah terisi, dan memerlukan tambahan 'air' (ilmu) untuk memenuhinya. Menyadari hal ini, Seskoad mengimplementasikan sistem belajar dewasa dalam operasional pendidikannya. Sistem ini mengedepankan pembelajaran secara mandiri dan independen, mewadahi model instruksi dan strategi yang memfokuskan pada siswa sebagai partisipan aktif, memfasilitasi kolaborasi kelompok dan usaha kolektif, serta mengedukasi siswa untuk aktif mengeksplorasi pengetahuan untuk keperluan dirinya sendiri. Dosen dalam proses belajar mengajar (PBM) berperan sebagai guru, pembimbing, mentor, konsuler, dan fasilitator. Hakikat sistem belajar dewasa adalah proses belajar untuk menjadi diri sendiri, bukan proses pembentukan menurut kehendak orang lain. Dalam penerapannya, Seskoad memberikan inisiatif penuh kepada siswa untuk aktif mencari wawasan baru yang dibutuhkannya. Siswa menentukan frekuensi belajarnya sendiri agar memicu timbulnya motivasi dan 'rasa memiliki' atas pelajarannya sendiri. Jadwal pelajaran diatur sedemikian rupa sehingga siswa masih mempunyai waktu luang untuk pengembangan dirinya. Materi diskusi kelompok ditambah waktunya, agar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah, dan mengintegrasikannya guna menciptakan pengetahuan baru. Dosen dalam diskusi ini, memiliki peran sebagai narasumber, pengajar, mediator, fasilitator, dan negosiator yang menjembatani,

membatasi, serta mengarahkan para siswa agar proses berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan di dalam kurikulum.

Kedua, Sistem Spasial. Merencanakan, mengatur, dan melaksanakan operasional pendidikan dengan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin akan berkontribusi pada pencapaian efektifitas dan efisiensi pendidikan. Pendidikan akan lebih efektif jika pembelajaran diberi selang waktu dari materi satu ke materi selanjutnya, daripada materi diselesaikan secara masif dalam satu waktu. Duckworth dalam studinya menyatakan bahwa “belajar dengan metode *spasial* (*spaced learning*) adalah kunci untuk penyimpanan memori,” ini bermakna bahwa “otak” layaknya “otot” yang dilatih, memerlukan waktu pemulihan agar dapat meningkat fungsi kognitifnya. Oleh karenanya, di dalam PBM Seskoad, siswa diberikan waktu istirahat secara konstan selama sepuluh menit setiap satu jam pelajaran, dan diadakan kegiatan berjemur selama dua puluh menit setiap harinya. Waktu belajar secara “tatap muka” di kelas diakhiri lebih awal, dilanjutkan pemberian “modul” oleh dosen secara online (*daring*) atau belajar dari paket instruksi digital yang diberikan di wisma siswa masing-masing. Mengatur waktu belajar malam dan pola tidur agar siswa dapat melaksanakan istirahat malam dengan cukup. Diharapkan dengan memberikan selang waktu istirahat kepada siswa, akan menjaga produktifitas, kebugaran fisik, meningkatkan memori, dan mencegah rasa mengantuk di kelas.

Ketiga, Budaya Membaca. Menurut Rozin (2008), budaya membaca adalah kegiatan positif rutin yang baik dilakukan untuk melatih otak untuk menyerap segala informasi yang terbaik diterima seseorang dalam kondisi dan waktu tertentu. Sumber bacaan bisa diperoleh dari buku, surat kabar, tabloid, internet, dan sebagainya. Buku adalah jendela dunia, membaca adalah kunci untuk membuka ‘jendela’ dan melihat luasnya dunia, tanpa membaca, dunia terasa menjadi sempit. Membaca dalam pendidikan militer menjadi kebutuhan pokok untuk menambah wawasan dan pengetahuan, karena ilmu militer bukanlah ilmu pasti (*exact*), namun lebih mengarah kepada *social science* yang dinamis. Untuk menghadapi ilmu yang dinamis ini, dibutuhkan analisis dari berbagai referensi, teori, ataupun sudut pandang. Oleh karenanya, Seskoad menanamkan budaya membaca kepada siswa agar dapat memenuhi tuntutan intelektual, mengetahui hal-hal aktual, menstimulasi daya imajinatif, serta meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis. Dalam implementasinya, Seskoad menstimulasi budaya membaca dengan cara diskusi kelompok menggunakan term of reference (TOR) atau kerangka acuan kerja (KAK) yang berisi rumusan masalah, persoalan dan sumber referensi yang harus dibaca. TOR/KAK diberikan minimal tiga hari sebelum materi pelajaran diberikan, sehingga siswa mempunyai waktu untuk membaca, baik referensi wajib ataupun referensi tambahan. Modal bacaan ini berguna untuk menjawab persoalan-persoalan, dan mendukung pelaksanaan diskusi didalam kelas.

Diskusi menjadi wahana bagi siswa untuk mengeluarkan pendapat, berbagi ilmu dan pengalaman (*sharing knowledge*), mengkaji relevansi doktrin, dan beradu argumentasi menggunakan referensi yang telah dibaca serta aspek empirik masing-masing. Pelaksanaan diskusi ini dapat mengukur apakah siswa membaca atau tidak, karena pada saat diskusi, masing-masing siswa akan ditanya oleh dosen/Patun yang berperan sebagai moderator, serta pada satu jam pelajaran (JP) terakhir dalam diskusi akan dilaksanakan *quiz*.



Pertanyaan quiz ini langsung dipilih oleh Direktur Pendidikan Seskoad, dimasukkan kedalam server terpusat untuk ditampilkan pada proyektor yang ada dikelas masing-masing, sehingga mau tidak mau siswa harus membaca agar dapat berkontribusi pada diskusi dan menjawab quiz di akhir pelajaran. Diharapkan dengan langkah ini dapat menstimulasi daya ingat siswa, memperoleh insight terhadap 'bias' yang ada, dan menambah kedewasaan berpikir.

Keempat, Budaya Menulis. Menulis dan membaca adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, karena penulis yang baik bisa dikatakan adalah pembaca yang baik. Menulis melatih keterampilan siswa dalam berpikir, berkomunikasi, berargumentasi dan mengekspresikan ide dan gagasannya. Dari tulisan yang dibuat, dapat diukur bagaimana kemampuan intelektualnya, pemahaman materinya dan kualitas hasil belajarnya. Menanamkan budaya menulis adalah hal yang krusial bagi siswa sebagai calon pemimpin dan staf militer. Karena perwira harus dapat mengkaji, menganalisa, dan menyarankan kepada pimpinan ataupun organisasi dalam bentuk tulisan secara efektif. Dalam implementasinya, Seskoad menerapkan budaya menulis dengan memberikan penugasan Taskap dan esai kepada siswa. Taskap merupakan produk penelitian siswa yang disusun mulai awal hingga akhir pendidikan. Sedangkan tugas esai diberikan secara rutin setiap bulannya. Tema esai disesuaikan dengan TOR/KAK sesuai materi pelajaran, dan diketik dengan komputer sebanyak sepuluh halaman. Perwira siswa diberikan persoalan didalam TOR/KAK berupa kasus atau masalah yang ada di beberapa negara di dunia. Masing-masing perwira siswa meneliti, menganalisa, dan menuliskan hasil perbandingan dalam bentuk tulisan. Siswa dilatih untuk dapat mengambil lesson learned dari topik tersebut, dan menuangkan gagasannya secara mengalir, logis dengan berlandaskan pada teori dan referensi. Hasil penulisan akan dipaparkan dihadapan rekan-rekannya, sehingga terjadi sharing knowledge yang bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan secara terintegrasi.

Selain itu, dengan budaya menulis ini, siswa dilatih untuk terbiasa mengetik sepuluh jari, dan mampu mengoperasikan komputer khususnya aplikasi pokok seperti microsoft word, excel dan power point, guna efektifitas dan efisiensi waktu dalam proses penyusunan tulisan ilmiah. Diharapkan dengan ditanamkan budaya membaca dan menulis di pendidikan Seskoad, pemimpin dan staf militer ke depan memiliki 'hobi' membaca dan menulis, sehingga dapat menjadi sumber ide, inspirasi dan gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi TNI AD.

Kelima, Kritis dan Kreatif. Seskoad membekali aspek intelektual dan karakter secara proporsional. Dengan menyadari bahwa militansi sebagai keunggulan dari karakter TNI AD, Seskoad meningkatkan militansi tidak hanya difokuskan pada aspek afektif, namun juga pada aspek kognitif atau intelektual. Militansi kognitif dapat diilustrasikan dengan perwira siswa yang *addictive* (candu) terhadap suatu disiplin ilmu, selalu merasa 'haus' ilmu, kritis untuk mengevaluasi dan menganalisa masalah, tidak berhenti mencari solusi-solusi masalah dari tinjauan berbagai literasi. Untuk menumbuhkan spesifikasi ini, Seskoad menstimulus daya analisis (thinking about thinking) perwira siswa melalui penerapan persoalan analisis, argumentatif, dan komparasi studi kasus. Seskoad Menyusun rubrik jawaban yang tidak kaku, namun bersifat fleksibel ditinjau dari hasil analisis, dan esensi jawaban berlandaskan berbagai literasi.



Keenam, Aplikasi teknis militer. Sebagai calon pemimpin dan staf militer, lulusan Seskoad harus mampu berperan sebagai Komandan Latihan. Komandan latihan yang profesional harus mampu merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan latihan secara mandiri. Oleh karenanya, Seskoad menugaskan siswanya untuk mampu menyusun produk latihan seperti rencana garis besar (RGB) dan naskah latihan baik buku I, IIA, IIB, dan III, secara perorangan. Masing-masing individu harus memahami bagaimana cara menyusun skenario latihan dimulai dari setting strategis hingga taktis secara kronologi, rasional dan relevan, serta mampu merancang asumsi waktu yang tepat dan dapat dioperasionalkan pada pelaksanaan Latihan Posko I. Dosen pengampu materi akan meluangkan waktu untuk melaksanakan bimbingan pengasuhan khusus secara rutin bagi siswa yang memiliki kendala dalam penyusunan naskah latihan. Validitas dan relevansi produk yang telah disusun akan diuji dan dipaparkan oleh siswa dihadapan dosen secara orang per orang. Produk terbaik akan dijadikan sebagai pedoman dan dioperasionalkan pada Latihan Posko I. Produk terbaik juga akan berpengaruh pada penentuan jabatan pada Latihan Posko I, dimana jabatan penyelenggara atau pelaku seperti Komandan Latihan dan Pangkogasgab dipilih berdasarkan indeks nilai tertinggi pada penyusunan RGB dan naskah latihan. Dengan metode ini, diharapkan dapat memotivasi siswa untuk menyusun produk latihan secara serius yang bermanfaat bagi penugasannya sebagai komandan latihan ke depan.

Ketujuh, Sistem Evaluasi dan Transparansi Nilai. Salah satu upaya dalam memperbaiki kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui penyempurnaan sistem evaluasi yang digunakan. Sistem evaluasi yang baik dapat menjadi indikator yang dapat menunjukkan pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan yang ditetapkan di dalam kurikulum, serta mengukur sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai. Untuk mengetahui validitas dari indikator ini maka perlu dibangun sistem ujian yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan evaluasi, Seskoad menyusun model evaluasi yang sistematis. Pemilihan soal dalam evaluasi di buat oleh dosen pengampu materi dengan tiga alternatif soal. Soal yang akan keluar dipilih langsung oleh Direktur Pendidikan, tiga puluh menit sebelum ujian dimulai, yang kemudian ditampilkan di proyektor

kelas masing-masing. Lembar ujian dikirim ke bagian analisa dan evaluasi pendidikan (AnevdiK) untuk di barcode, dipisahkan antara lembar biodata dan jawaban, sehingga korektor mengevaluasi tanpa mengetahui siapa pemilik lembar ujian tersebut. Setelah selesai di koreksi, lembar ujian dikembalikan kepada siswa lengkap dengan rubrik komentar dari korektor agar siswa mengetahui apa keunggulan dan kekurangan dari pendapatnya. Dalam pendistribusian hasil ujian, nilai perorangan siswa akan dikirimkan melalui email dan hanya untuk keperluan pribadi siswa, sehingga dapat memelihara moril, dan menstimulasi siswa untuk berkompetisi dengan dirinya sendiri tanpa berkonflik dengan yang lain.

Kedelapan, *Comprehensive learning Management System*. Seskoad sedang dalam proses pengembangan website learning management system (LMS) yang memiliki fitur kelas virtual interaktif dan aktivitas digital untuk mendukung pembelajaran mandiri maupun kolaborasi kelompok. LMS didesain untuk memfasilitasi, memonitor dan menilai aktivitas belajar Siswa. Sistem ini dapat diakses melalui aplikasi desktop ataupun mobile phone sehingga tidak membatasi ruang dan waktu dari proses pembelajaran. Fitur yang disediakan dalam LMS ini diantaranya kelas virtual, perpustakaan (*e-library*), aktivitas, nilai, dan plagiat detektor. Dengan fitur-fitur ini membuka peluang bagi dosen untuk mendistribusikan paket instruksi, mengajar, memberikan feedback dan menilai aktivitas siswa. Begitu pula siswa dapat mengakses paket instruksi, diskusi, dan ujian dengan mudah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sistem ini sangat bermanfaat untuk mengintegrasikan metode 'tatap muka' dengan metode fleksibel menggunakan pendekatan web-based (online), serta sinkronisasi dan asinkronisasi secara ekstensif diantara peserta didik dan tenaga pendidik pada lokasi yang berbeda, atau terpisah secara geografis dengan zona waktu yang berbeda. Saat ini LMS sudah dieksekusi dengan dipasangnya access point di masing-masing kelas.

Penutup. Dengan kurikulum dan sistem pendidikan ini, diharapkan akan membentuk pola pikir yang konstruktif, kritis, mampu menganalisa, memetakan, serta mencari solusi yang kreatif dan inovatif. Adaptasi, evaluasi, revisi dan validasi akan terus dijalankan guna menghasilkan sistem pendidikan terbaik sehingga dapat konsisten menghasilkan pemimpin dan staf militer profesional, serta menjaga nama besar institusi yang 'Terbaik, Terhormat dan Disegani'.

SEMINAR PKB KEJUANGAN

PASIS SESKO TNI, SESPIMTI, SESKO ANGKATAN DAN SESPIMMEN POLRI TA. 2021



Pgs. Komandan Sesko TNI
Mayjen TNI Handy Geniardi, S.E., M.M.

Pendahuluan.

Dalam rangka menjalin Integrasi TNI - Polri, Perwira Siswa (Pasis) Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan dan Sespimmen Polri TA. 2021 menggelar Seminar Program Kegiatan Bersama (PKB) Keuangan secara virtual. Kegiatan Seminar PKB Keuangan yang dilaksanakan secara daring dan tatap muka secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut dibuka resmi oleh Pgs. Komandan Sesko TNI Mayjen TNI Handy Geniardi, S.E., M.M., di Grha Widya Adibrata, Sesko TNI, Bandung, Senin (07/06/2021).

Dalam sambutannya, Pgs. Dansesko TNI mengatakan bahwa pandemi Covid-19 hingga saat ini masih belum berakhir sehingga pelaksanaan kegiatan PKB Keuangan dilaksanakan secara tatap muka terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan melalui *video conference*.

Seminar PKB Keuangan menurut Mayjen TNI Handy Geniardi merupakan wujud kebersamaan yang dapat menjadi sinergi dan kekuatan untuk membangun bangsa yang hebat serta bermartabat menuju Indonesia Maju.

Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI Handy Geniardi mengharapkan kepada seluruh peserta seminar untuk mencurahkan segala daya dan kemampuan serta ide untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis melalui kajian serta analisis dari setiap persoalan yang dihadapi baik TNI Polri maupun komponen masyarakat, sehingga mendapatkan solusi yang tepat dan proporsional sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan pimpinan.

Seminar PKB Keuangan yang berlangsung selama 5 hari (tanggal 7 s.d 11 Juni 2021) tersebut mengangkat tema : “TNI dan Polri Beserta Komponen Bangsa Lainnya Siap Melaksanakan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Guna Mewujudkan Indonesia Tangguh”. Dalam seminar tersebut Pasis Sesko TNI dan Serdik Sespimti Polri memaparkan dan membahas makalah seminar dengan judul “Konsepsi Peran TNI Polri Beserta Komponen Bangsa Lainnya Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Guna Mewujudkan Indonesia Tangguh Dalam Rangka Keberlangsungan Pembangunan Nasional.” Sedangkan untuk Pasis Sesko Angkatan dan Serdik Sespimmen Polri memaparkan dan membahas makalah dengan tema : “Optimalisasi Peran TNI Polri Beserta Komponen Bangsa Lainnya Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Tangguh”.

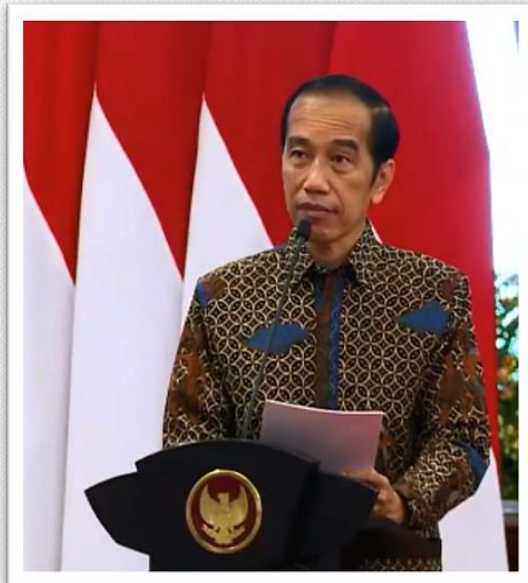
Dalam kesempatan seminar tersebut, Pasis Sesko Angkatan dan Serdik Sespimmen Polri mamaparkan makalah yang telah disusun oleh Tim perumus masing-masing secara paralel. Kegiatan PKB Kejuangan ini diikuti oleh 290 orang Pejabat Lembaga Pendidikan TNI dan Polri, dan 1.376 Perwira Siswa atau Peserta Didik, yakni 450 orang dari Pasis Sesko, 200 orang dari Pasis Sesko TNI, 150 orang dari Serdik Sespimti Polri, 274 orang dari Serdik Sespimmen Polri, 175 orang dari Pasis Seskoal dan 127 orang dari Pasis Seskoau.

Dalam rangkaian kegiatan PKB Kejuangan, selain kegiatan seminar, juga dilaksanakan kegiatan Pekan Olah Raga menembak senjata ringan (pistol) dan Bhakti Sosial. Untuk kegiatan bhakti sosial, Seskoal menggelar donor darah dan pemberian santunan bantuan sosial berupa sembako dan kebutuhan pokok kepada Yayasan Al Masyiri Pondok Yatim Piatu dan Duafa serta Yayasan Tambatan Hati

Berkaitan dengan kegiatan seminar PKB Juang ini, beberapa waktu sebelumnya, tepatnya pada tanggal 8 April 2021 telah dilaksanakan ceramah pembekalan PKB Juang secara daring oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo. Dalam arahannya Presiden memberikan pembekalan tentang ancaman dan tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Presiden juga menyampaikan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia yang membutuhkan kecepatan bertindak dan inovasi untuk menentukan langkah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perubahan iklim, bencana alam, ancaman keamanan, intoleransi, terorisme, harus selalu diwaspadai. Kecerdasan memadukan langkah strategis, taktis, aksi yang cepat, tepat, terukur adalah kunci dalam menentukan kemampuan dan ketangguhan bangsa Indonesia.

Selain pembekalan dari Presiden RI, Ir. Joko Widodo, para Pasis juga menerima ceramah pembekalan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Panglima TNI dalam arahannya antara lain menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Keduanya saling berkaitan erat dan tidak dapat dikesampingkan satu dari yang lainnya. Penanganan Covid-19 akan sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mempengaruhi stabilitas nasional.



PRESIDEN RI - Ir. JOKO WIDODO-

Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah untuk menekan angka penularan guna mengendalikan pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak terhadap masyarakat khususnya dalam bidang perekonomian. Kebijakan PSBB yang kemudian ber-transformasi menjadi PPKM skala mikro sekarang sudah di gunakan di seluruh Provinsi yang sebelumnya hanya diberlakukan di 15 provinsi prioritas yang terbukti efektif menekan angka penularan dan melandaikan kurva kasus positif Covid-19.

Sementara Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa saat ini, kita sedang menghadapi musuh bersama berupa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan, khususnya aspek ekonomi dan kesehatan. berbagai upaya pemerintah secara extra ordinary terus dilakukan secara terpadu dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan mewujudkan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam situasi ini kita harus menyingkirkan segala perbedaan kepentingan dan saling bahu membahu menjadikan Pandemi Covid-19 sebagai musuh

bersama melalui penanganan Covid-19 yang paripurna serta mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebersamaan dan sinergi TNI-Polri sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat dan kompleks.

SEMINAR PKB JUANG DI SESKOAD.

Dalam kegiatan Seminar PKB Juang tersebut, 451 Pasis Dikreg 60 Seskoad mengikuti secara Daring dari Gedung Gatot Subroto dan Gedung Jenderal Sudirman Seskoad. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Mayjen TNI DR. Anton Nugroho, MMDS., M.A., Wadan Seskoad, Brigjen TNI Fulad, S.Sos, M.Si dan para Pejabat Struktural Seskoad, Widya Iswara, para Patun dan Dosen Seskoad.

Adapun makalah yang dipaparkan Pasis Seskoad mengangkat judul : Optimalisasi peran TNI-POLRI beserta komponen bangsa lainnya dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka terwujudnya Indonesia tangguh. Dengan pokok permasalahan yaitu pertama, “Bagaimana agar peran TNI-Polri beserta Komponen Bangsa lainnya optimal dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dengan rumusan masalah, Bagaimana peran TNI-Polri beserta komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional? Dan kedua, Bagaimana strategi TNI-Polri beserta komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional?

Penulisan dan perumusan makalah Pasis Seskoad dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan metode deskriptif analisis serta menggunakan analisis SWOT, yakni mengidentifikasi dan melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh, berhasil menelorkan sejumlah kesimpulan dan saran rekomendasi. Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa dan pembahasan antara lain adalah sebagai berikut :

Pertama, Pemerintah telah menetapkan bencana non-alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Berbagai regulasi penanganan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menjaga kesehatan dan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 hingga 2021. Dalam mengatasi pandemi Covid-19 dibutuhkan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran TNI-Polri serta komponen bangsa lain dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil literasi yang dilakukan secara internal faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi peran TNI-Polri bersama komponen bangsa lain dalam penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan Indonesia tangguh mencakup faktor internal serta eksternal.

Pada faktor internal, adalah sebagai berikut **pertama**, dalam aspek internal faktor yang mempengaruhi mencakup kekuatan yang terdiri dari adanya regulasi, doktrin tentang upaya menangani pandemi Covid - 19/ bencana nasional. 2. jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara professional yang secara konstitusional diatur dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Bab II tentang Jati Diri Pasal 2. Sedangkan jati diri Polri sesuai doktrin Tribrata. 3. Gelar kekuatan TNI – Polri dari tingkat pusat, daerah hingga pedesaan. 4. Fungsi pembinaan teritorial dalam dimensi penanganan pandemi Covid-19 peran TNI – Polri mencakup aspek keamanan dan ketertiban dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, Selain aspek kekuatan, guna mendukung optimalisasi peran TNI-Polri bersama komponen bangsa lain dalam penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan Indonesia tangguh analisis terhadap faktor kelemahan juga diperlukan untuk mengetahui penanganan yang tepat dapat dilakukan.

Faktor kelemahan ini mencakup 4 kendala utama dalam konteks tugas perbantuan TNI - Polri. 1. Kendala regulasi yang belum terperinci terkait mekanisme perbantuan TNI - Polri dalam penanganan bencana non alam. 2. Koordinasi sipil militer yang belum optimal di lapangan, seperti kurang sinkronnya porsi penugasan antara sipil-militer dalam penanggulangan bencana. 3. Belum terdapatnya anggaran kontijensi yang dialokasikan secara khusus dalam tugas penanggulangan bencana di TNI baik dalam dukungan operasional ataupun personil. 4. Kendala kesiapan alutsista TNI - Polri. Alat perlengkapan milik TNI dan Polri tidak khusus disiapkan untuk penanggulangan bencana

Ketiga, Faktor eksternal mencakup peluang serta kendala dalam upaya optimalisasi peran TNI - Polri bersama komponen bangsa lain dalam penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan Indonesia tangguh. Dalam aspek peluang, faktor-faktor di dalamnya mencakup dukungan vaksin, alkes dan obat-obatan dari pemerintah dan pihak swasta. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi salah satunya dapat dilihat di Desa Panggungharjo, Bantul, adanya pusat informasi online resmi pemerintah dalam menyajikan data Covid-19 yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini mengenai Covid-19 dapat diakses pada laman <https://covid19.go.id/>. Dalam aspek kendala mencakup adanya kelompok masyarakat yang resisten terhadap kebijakan pemerintah seperti yang terjadi di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung, daya tahan ekonomi negara yang lemah dalam menghadapi PSBB yang dapat dilihat dari kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan dikisaran 5% bahkan cenderung menurun dan Maraknya Hoax Berkenaan dengan Covid-19.

Keempat, Peran TNI - Polri bersama komponen bangsa lain dalam penanganan pandemi Covid-19 dilakukan melalui berbagai upaya yang mencakup pengawasan

implementasi kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19, pengawasan dan penyaluran 7 Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), pemberdayaan Sistem Pentahelix dalam Mencegah Penyebaran Virus dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan Citizen Journalism dan penguasaan IT, serta penggalakkan koperasi.

Kelima, Strategi yang dilakukan TNI - Polri beserta komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dilakukan melalui penyelenggaraan strategi dasar penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sementara itu dalam upaya membangkitkan kembali ekonomi, pemerintah tetap melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terdapat tiga strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah yang mencakup peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter.

Saran Rekomendasi

Menindaklanjuti dari kesimpulan yang diambil, Tim perumus Seskoad menyampaikan sejumlah saran rekomendasi sebagai berikut : **Pertama,** TNI dan Polri perlu melakukan Capacity Building dalam penanganan ancaman non militer untuk meningkatkan kualitas personil. **Kedua,** TNI dan Polri perlu melakukan suatu reformasi atau pembenahan sistemik dalam pembinaan personel, khususnya dalam bidang rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan profesi dan karier dalam menunjang kualitas personil. **Ketiga,** TNI dan Polri perlu meningkatkan sosialisasi dan penyebaran kebijakan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan citizen journalism.yaitu memberdayakan potensi jurnalisme warganegara dgn memanfaatkan gelar satuan dan personel untuk mengoptimalkan berbagai kebijakan pemerintah dgn memanfaatkan penetrasi penggunaan internet dan media sosial.

ANALISIS GELAR KEKUATAN MATRA DARAT DALAM RANGKA MEMPERKUAT WILAYAH PERTAHANAN IBU KOTA NEGARA



berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Di samping itu, padatnya jumlah penduduk berakibat kepada pusat pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, tata ruang yang semrawut dan pemanfaatan lahan yang saling kontradiktif.

Kondisi di atas merupakan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Kebijakan Pemerintah tentang rencana pemindahan ibu kota negara Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur direncanakan mulai dilakukan pada tahun 2024. Hal tersebut tentunya akan diikuti oleh pemindahan pemerintahan termasuk Markas Besar (Mabes) TNI beserta jajarannya.

Gelar kekuatan TNI AD merupakan bagian integral dari upaya pertahanan negara aspek darat. Penggelaran kekuatan TNI AD didasarkan kepada strategi pertahanan dan strategi militer. Gelar kekuatan TNI AD ditujukan untuk mewujudkan daya tangkal pertahanan negara serta dapat didayagunakan secara terpadu dengan matra laut dan udara (trimatra terpadu). Gelar kekuatan TNI AD diarahkan pada terwujudnya totalitas efek tangkal dan tersedianya kekuatan penangkal awal terhadap setiap ancaman yang diprediksi

Berdasarkan Hal tersebut di atas, maka dapat merumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya: **Pertama.** Bagaimana konsep gelar kekuatan matra darat guna memperkuat wilayah pertahanan ibu kota negara? **Kedua.** Bagaimana integrasi gelar kekuatan matra darat dengan matra laut dan matra udara dalam rangka memperkuat wilayah pertahanan ibu kota negara?

Pendahuluan.

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.508 pulau. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal tersebut mengharuskan adanya suatu sistem pertahanan negara yang kuat dan berdaya tangkal tinggi karena ancaman bisa masuk dari mana saja. Penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.

Jakarta sebagai Ibu kota negara adalah pusat negara yang memiliki peran utama dalam seluruh aspek kegiatan pemerintahan. Ibu kota negara merupakan kota utama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik sehingga

Ketiga. Bagaimana sinergi gelar kekuatan matra darat dengan polri dan Pemda rangka memperkuat wilayah pertahanan ibu kota negara?

TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, Gelar Kekuatan Robert Cooper dalam bukunya *"The breaking of Nation: Order and Chaos" in 21st century* 2004 menjadi inspirasi yang dipilih untuk menentukan gelar dan kekuatan militer yang dibangun. Gelar adalah sejumlah kekuatan TNI AD yang terdiri dari kekuatan tempur, kekuatan bantuan tempur, kekuatan bantuan administrasi, kekuatan intelijen, kekuatan kewilayahan dan kekuatan cadangan yang digelar pada daerah operasi tertentu dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman lawan.

Kedua. Perencanaan menurut Wilayah Riyadi dan Bratakusumah, (2003). Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendaya-gunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas.

Ketiga, Teori Pertahanan Menurut Harjomataram, Pertahanan Nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau di luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Keempat. Teori Ancaman menurut MacKuen, Erikson, dan Stimson (1992) dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu ancaman terhadap individu dan ancaman kolektif dimana ancaman kolektif tersebut dapat berwujud ancaman militer, ancaman ekonomi dan ancaman budaya. Sementara untuk ancaman terhadap individu bisa dalam bentuk keselamatan fisik, kekayaan

pribadi dan pendapatan serta nilai-nilai pribadi dan keyakinan. Kelima. Teori Man power menurut Jasjit, Kapabilitas pertahanan dapat diindikasikan dengan sumber daya material yang dimiliki suatu negara yang dapat ditransformasikan ke dalam kekuatan militer. Tiga hal utama yang menjadi alat untuk menganalisa kapabilitas pertahanan suatu negara menurut Jasjit Singh diistilahkan menjadi 3M Paradigma (*Manpower, Machine and Money*).

Keenam, Teori Keamanan Nasional, Menurut Suradinata (2005:47) keamanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu negara yang memiliki kemampuan dan ketangguhan serta mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi ataupun mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar atau dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi, identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam menjaga tujuan nasional.

Ketujuh Ibu Kota, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kedelapan, Teori Integrasi. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi dan Ke Sebelas Teori Sinergisitas, adalah hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi, bila dihadapkan pada elemen Kerja sama dan kepercayaan.

Kerangka Berpikir

Perkembangan global dan regional di kawasan tentunya membawa dampak signifikan bagi RI sehingga membuahkan keputusan pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota negara RI dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

Rencana pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, akan ikut memindahkan pusat pemerintahan termasuk Markas Besar (Mabes) TNI beserta jajarannya.

Penggelaran kekuatan TNI AD didasarkan kepada strategi pertahanan dan strategi militer. Gelar kekuatan TNI AD ditujukan untuk mewujudkan daya tangkal pertahanan negara serta dapat didayagunakan secara terpadu dengan matra laut dan udara (trimatra terpadu). Gelar kekuatan TNI AD diarahkan pada terwujudnya totalitas efek tangkal dan tersedianya kekuatan penangkal awal terhadap setiap ancaman yang diprediksi.

Pengunaan kekuatan TNI AD dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Aturan pelibatan atau *Rules of Engagement* (RoE) harus berisikan dua tujuan yakni tujuan politik negara dan tujuan hukum, untuk ditaati dan tetap berada dalam koridor hukum baik nasional maupun internasional.

Satu nilai yang tetap harus kita pertahankan adalah bahwa upaya pertahanan negara harus senantiasa diselenggarakan berdasarkan semangat cinta tanah air yang berkobar-kobar dan pantang menyerah. Dengan mempelajari perkembangan di atas maka dibutuhkan kesamaan rancangan pembangunan nasional diantaranya dengan memperhatikan aspek pertahanan berikut postur dan gelar kekuatan TNI secara tepat guna dan tepat sasaran.

Metodelogi penelitian

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian kualitatif fenomenologis, Artinya Peneliti berangkat ke lapangan dengan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan secara alamiah. Sedangkan instrumen penelitian adalah peneliti sendiri perlu menyiapkan diri sampai seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian untuk terjun ke

lapangan

Adapun Sumber Data terdiri dari Data Primer dan Data sekunder. Data primer yang digunakan adalah metode survei dan metode observasi. Sedangkan Data Sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Selanjutnya Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data menggunakan teknik triangulasi. Berlanjut kepada Teknik Pengolahan dan Analisis Data yang digunakan adalah: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Dengan Teknik Pengujian Keabsahan Data dalam penelitian, menggunakan teknik: *kredibilitas, transferabilitas, dependability, dan konfirmitas*. Sebagai Informan/Narasumber dalam penelitian melibatkan responden diberbagai lukus sebanyak 51 orang terdiri dari :

NO	UNSUR	INFORMAN (ORANG)
1	2	3
1	MABES AD	4
2	MABES AL (ASOPS AL)	2
3	MABES AU (ASOPS AU)	2
4	MABES TNI	1
5	KEMHAN	5
6	KODAM VI/MLW	5
7	LANAL.	1
8	LANUD	1
9	PEMDA KAB. PENAJAM PASER UTARA	4
10	KODIM 0913/PPU	4
11	POLRES KAB. PENAJAM PASER UTARA	3
12	PEMDA PROVINSI KALTIM	4
13	KOREM 091/ASN	4
14	PEMDA KAB. KUTAI KARTANEGARA	4
15	KODIM 0906/TENGGARONG	4
16	POLRES KUTAI KARTANEGARA	3

Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam hasil penelitian, mendeskripsikan Gambaran umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, mulai dari sejarah Kabupaten Penajam Paser Utara; Kondisi Geografis; Kondisi Demografis; serta Potensi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Pembahasan

Konsep Gelar Kekuatan Matra Darat Guna Memperkuat Wilayah Pertahanan Ibu Kota Negara.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo selaku Kepala Negara secara resmi pada tanggal 26 Agustus 2019 melalui konferensi pers di Istana Negara Jakarta telah mengumumkan lokasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara di wilayah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.



PRESIDEN RI - Ir. JOKO WIDODO-

Aspek pertahanan dan keamanan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam langkah pemerintah guna memindahkan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur, maka gelar kekuatan matra darat perlu disesuaikan dan diperkuat guna memperkuat wilayah pertahanan ibu kota negara.



Selain itu juga harus diperhatikan dengan bergesernya *centre of gravity* atau pusat kekuatan (sekaligus pusat kerawanan) penentu menang atau kalahnya suatu negara dalam perang. *Centre of gravity* bisa berupa wilayah geografis, seperti daerah pusat pemerintahan, daerah pusat perekonomian, tapi bisa juga berupa instrumen lain kekuatan nasional, misalnya, militer dan objek vital strategis.

Pemilihan lokasi ibu kota negara jika dilihat dari lokasi geografi yang strategis dan ada di tengah-tengah Indonesia; berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda; Risiko bencana alam sangat minim baik banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi maupun tanah longsor. Begitu pula dengan kondisi social yang meliputi Ipoleksosbudhankam di calon ibu kota negara kondisinya sangat kondusif dengan potensi konflik yang sangat rendah.

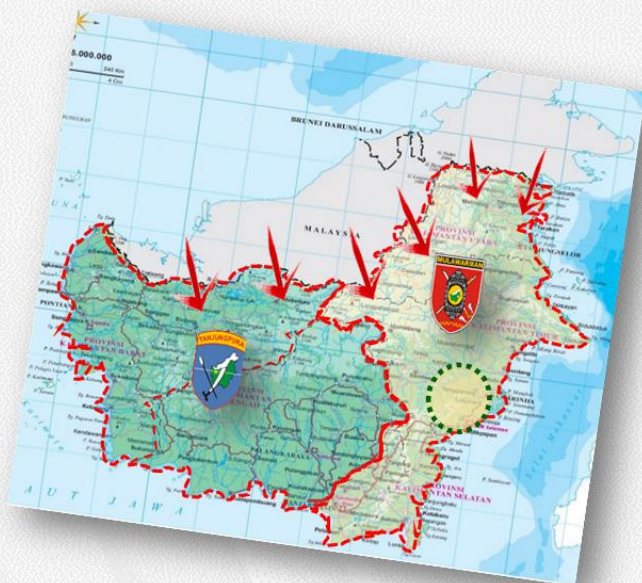
Pemindahan ibu kota negara, tidak lepas dari potensi ancaman yang bersifat militer eksternal berupa agresi, invasi maupun infiltrasi kekuatan militer bersenjata dari luar wilayah NKRI sangat kecil sekali. Begitu pula halnya dengan ancaman militer internal berupa pemberontakan separatis bersenjata atau gerakan disintegrasi bangsa yang menggunakan kekuatan senjata secara

terorganisir dan terlatih sangat kecil sekali terjadi di ibu kota negara. namun demikian ancaman non militer-eksternal berupa *Transnational Organized Crime* (TOC) yang mencakup emigran gelap, *drugs* trafficking, terorisme, aktivitas kriminal bajak laut, *illegal fishing*, *human trafficking* dan perusakan lingkungan.

Wilayah Kalimantan Timur yang menjadi lokasi ibu kota baru memiliki tingkat ancaman bencana rendah hingga sedang. Ancaman risiko bencana antara lain berasal dari hidrometeorologi, seperti banjir, terutama di wilayah muara sungai, ancaman dari perilaku manusia serta potensi ancaman gempa dan tsunami berada pada level rendah hingga sedang. Di samping ancaman bencana potensi gangguan keamanan terhadap ibu kota negara sangat terbuka, yang mana potensi ancaman justru lebih rentan datang dari dalam negeri. Potensi ancaman yang dimaksud adalah adanya peningkatan potensi kejahatan, kekerasan dan teror, konflik horizontal maupun structural bilamana pemindahan ibu kota malah menciptakan kesenjangan ekonomi.

Untuk mengatasi potensi ancaman dan gangguan di ibu kota negara, pemerintah perlu merencanakan rancangan keamanan ibu kota baru dengan matang dengan menyusun langkah-langkah strategis agar ibu kota baru bisa tetap aman dan kuat dengan cara menggelar kekuatan matra darat di wilayah ibu kota negara.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi gangguan keamanan adalah dengan cara gelar kekuatan matra darat di wilayah ibu kota negara. Di ibu kota negara akan dibentuk Kodam Khusus IKN



Makodam VI/Mulawarman



Makodam XII/Tanjungpura



Masterplan tata kota IKN

Pemindahan ibu kota negara ke lokasi baru harus diiringi dengan kesiapan membangun sistem pertahanan yang kuat dan harus disiapkan menjelang bergulirnya pemindahan ibu kota negara. Kondisi tersebut memerlukan alutsista yang kuat dan modern sehingga dapat menangkal dan memblokir bila terjadi ancaman atau serangan dari negara luar.

Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Gelar kekuatan matra darat dalam rangka memperkuat wilayah pertahanan ibu kota negara tidak akan berarti jika tidak mendapat dukungan dari matra laut dan matra udara, maupun dari pemangku kepentingan lainnya.

Untuk doktrin pertahanan Indonesia yang defensif (bertahan), kondisi hutan lebat serta berbagai rintangan alam berupa sungai-sungai besar dan pegunungan di sepanjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia sangat menguntungkan. Medan ini sangat cocok untuk gelar kekuatan TNI-AD.

Sama halnya dengan TNI-AL dan TNI-AU juga begitu. Medan laut sekitar Kalimantan Timur (Kaltim) lebih sempit, mulai ujung utara dan selatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II jika dibandingkan dengan medan laut di Jakarta yang terbuka sangat luas. Kemudian, posisi geografis yang persis di tengah-tengah Indonesia memudahkan mengonsentrasikan kekuatan udara dari timur, barat, utara, dan selatan bila ibu kota diserang.

Integrasi Gelar Kekuatan Matra Darat Dengan Matra Laut Dan Matra Udara Dalam Rangka Memperkuat Wilayah Pertahanan Ibu Kota Negara

Pertahanan negara merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang kokoh akan mampu mewujudkan bangsa yang kuat. Karakteristik geografis Indonesia mengandung tantangan yang multi dimensi sehingga menuntut adanya integrasi Kekuatan Matra Darat Dengan Matra Laut Dan Matra Udara yang tepat untuk mengamankan wilayah negara Indonesia.

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun konsep gelar kekuatan yang terintegrasi di wilayah ibu kota negara, antara lain:

1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,
2. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan,
5. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN
6. Perpres Nomor Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024
7. Permenhan tentang Pembangunan Postur Pertahanan Negara
8. Permenhan tentang Pembangunan Kekuatan Pokok TNI.
9. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma, dan
10. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/3120/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Direktif Panglima TNI tentang operasi di wilayah Kogabwilhan I TA. 2021.



Pemindahan ibu kota negara sudah ada koordinasi antara Kemhan dengan Kementerian lain yaitu antara lain: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kemenhub, Kemendagri, Kemen KP, dan juga dengan kementerian atau departemen yang lainnya.

Selain koordinasi, dalam rangka pemindahan ibu kota baru, juga harus didukung mekanisme hubungan dan kerja sama Matra Darat, Laut dan Udara dalam

menyiapkan gelar kekuatan ibu kota negara. Selain itu matra laut dan matra udara memberikan dukungan terhadap gelar kekuatan matra darat di ibu kota negara.

Adapun hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan integrasi gelar kekuatan matra darat, laut, dan udara lebih kepada Sistem Komando, Kendali, Komunikasi dan Informasi yang masih belum terintegrasi dengan baik. Dimana jika hambatan-hambatan tersebut tidak segera diatasi kemungkinan besar potensi integrasi kekuatan matra darat, laut dan udara dalam rangka memperkuat wilayah pertahanan ibu kota negara tidak akan berjalan optimal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pengintegrasian gelar kekuatan matra darat, laut, udara di wilayah ibu kota negara. Upaya tersebut antara lain selain rapat terkait berbagai kegiatan gelar kekuatan, juga dilakukan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Sinergi Gelar Kekuatan Matra Darat Dengan Polri Dan Pemda Rangka Memperkuat Wilayah Pertahanan Ibu Kota Negara

Gelar kekuatan matra darat dapat terwujud dengan baik jika bersinergi dengan matra lainnya seperti matra laut dan udara, serta bersinergi pula dengan Polri dan Pemerintah Daerah. Selama ini mekanisme hubungan dan kerja sama antara TNI, Polri dan Pemda sudah berjalan dengan baik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam menyiapkan kekuatan matra darat guna memperkuat wilayah pertahanan ibu kota baru.

Disamping itu dukungan dari Polri dan Pemerintah Daerah setempat terhadap kesiapan gelar kekuatan matra darat di wilayah ibu kota baru cukup baik dengan melibatkan Forkompinda untuk tingkat daerah dan forum resmi koordinasi TNI-Polri dan kementerian terkait di tingkat pusat.

Desain tata kota dalam ibu kota baru harus berbasis pada aspek pertahanan negara. Artinya, rencana tata ruang wilayah untuk ibu kota baru harus pula memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan negara (*security approach*), di samping memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (*prosperity approach*). Dalam merancang pembangunan ibu kota baru, diperlukan pula perpaduan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan Negara.

Adapun sinergi TNI dengan Polri dan Pemda dalam rangka mengantisipasi ancaman nyata maupun potensi ancaman di bidang Ipoleksosbudhankam di ibu kota negara saling berkoordinasi melalui Forkompinda. Sedangkan mekanisme hubungan dan kerja sama antara TNI dengan Polri dan Pemda dalam rangka mereduksi ancaman nyata maupun potensi ancaman di bidang Ipoleksosbudhankam di ibu kota negara sudah sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.

Adapun hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan sinergi antara TNI dengan Polri dan Pemda belum ada SOP karena hingga saat ini perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur tersebut secara nasional dikendalikan oleh Kemen PPN/Bappenas, belum mengarah ke masalah teknis lapangan.

metode pemecahan masalah

Dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis SWOT dengan model atau matriks TOWS (yang bersifat naratif kualitatif/tanpa adanya angka dan perhitungan), sedangkan metode SWOT kuantitatif dikenal dengan model/matriks IFAS, EFAS, dan SFAS (yang didalamnya terdapat bobot, skor, rating, dengan menggunakan angka dan perhitungan kuantitatifnya, dengan uraian sebagai berikut:

INTERNAL EKSTERNAL	STRENGTH	WEAKNESSES
	1. UU TNI sebagai payung hukum 2. Kebijakan dan arahan Panglima TNI 3. Kebijakan Strategis Kasad 4. Semangat Juang Personel matra darat	1. Kuantitas personel rendah 2. Kualitas personel lemah 3. Minim alutsista 4. minimnya sarana, prasarana dan anggaran
OPPORTUNITIES	STRATEGI SO	STRATEGI WO
1. Kebijakan Presiden RI 2. Dukungan Pemda 3. Dukungan matra laut, udara, Polri dan Pemda 4. Dukungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu pengamanan wilayah Ibu Kota Negara Membantu dalam membangun infrastruktur di wilayah Ibu Kota Negara 	<ul style="list-style-type: none"> Menambah jumlah personel di wilayah Ibu Kota Negara Menggandeng pihak lain dalam memperkuat wilayah pertahanan Ibu Kota Negara
THREATS	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Biaya sangat besar 2. Potensi Ancaman 3. Koordinasi belum optimal 4. Ego sektoral antar instansi	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk forum koordinasi wilayah Ibu Kota Negara Menyusun gelar kekuatan di wilayah rawan 	<ul style="list-style-type: none"> Melengkapi peralatan TIK di wilayah Ibu Kota Negara Melengkapi alutsista di wilayah Ibu Kota Negara

Impementasi Strategi

Strategi SO

Pertama, Meningkatkan partisipasi masyarakat :

- ☐ Memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan pembimbingan kepada semua elemen masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung gelar matra darat dalam rangka memperkuat wilayah pertahanan ibu kota negara.
- ☐ Melibatkan/mengikutsertakan Ormas, OKP, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan unsur masyarakat lainnya dalam memperkuat wilayah pertahanan ibu kota negara.

Kedua, Membantu dalam membangun infrastruktur :

- ☐ Melakukan komunikasi dengan Pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait lainnya untuk membantu membangun jalan, jembatan, gorong-gorong dan fasilitas fisik lainnya guna memperkuat wilayah pertahanan di ibu kota baru.

- ☐ Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi vertical untuk membantu dalam membangun peralatan PLN, peralatan Telkom, peralatan PDAM dan lain-lain, sehingga akan mendukung dan memperkuat wilayah pertahanan ibu kota negara.

Strategi ST

Pertama, Membentuk forum koordinasi wilayah Ibu Kota Negara :

- ☐ Memfasilitasi pembentukan forum koordinasi wilayah ibu kota negara
- ☐ Memberdayakan forum koordinasi wilayah ibu kota negara sebagai ajang diskusi, dialog, sharing pengalaman dan *sharing* informasi terkait permasalahan pembangunan ibu kota negara dan solusi/upaya pemecahan masalahnya secara sinergis, khususnya yang berkaitan dengan wilayah pertahanan ibu kota negara

Kedua, Menyusun gelar kekuatan di wilayah rawan:

- ☐ Menyusun konsep, ide, gagasan, dan masukan tentang gelar kekuatan

pengamanan di wilayah ibu kota negara sebagai masukan kepada komando atas dalam membuat kebijakan lebih lanjut.

- ❑ Memetakan daerah rawan, mapping terhadap titik *hot spot*, dan menyusun indek kerawanan wilayah di wilayah ibu kota negara.

Strategi WO

Pertama, Menambah jumlah personel di wilayah Ibu Kota Negara :

- ❑ Mengajukan kepada komando atas tentang usulan jumlah personel yang harus ditambah di wilayah Ibu Kota Negara untuk memperkuat wilayah pertahanan Ibu Kota Negara.
- ❑ Melakukan penebalan pasukan / personel di beberapa titik rawan/hot spot di wilayah Ibu Kota Negara untuk cegah dini dan deteksi dini dalam menangkal ancaman di wilayah Ibu Kota Negara.

Kedua, Menggandeng pihak lain dalam memperkuat wilayah pertahanan Ibu Kota Negara : Melibatkan Matra Laut, Matra Udara, Polri dan Pemerintah setempat guna memperkuat gelar kekuatan Matra Darat dalam rangka memperkuat wilayah pertahanan Ibu Kota Negara

Strategi WT

Pertama, Melengkapi peralatan TIK di wilayah Ibu Kota Negara :

- ❑ Mengajukan kepada komando atas kebutuhan peralatan berupa drone dan CCTV yang dapat mendeteksi berbagai aksi kejahatan di wilayah Ibu Kota baru
- ❑ Mengajukan kepada komando atas kebutuhan peralatan berupa pembangunan *software* telekomunikasi dan informasi yang dapat mendeteksi berbagai aksi potensi ancaman perang di masa depan yang sarat dengan penggunaan teknologi.

Kedua, Melengkapi alutsista di wilayah Ibu Kota Negara :

- ❑ Mengajukan kepada komando atas kebutuhan pembaharuan atau peremajaan alutsista.
- ❑ Menyusun standar ideal atau standar minimal alutsista yang digunakan yang dapat dijadikan model dalam rangka memperkuat wilayah pertahanan Ibu Kota Negara.

Kesimpulan

Pertama. Gelar kekuatan matra darat perlu disesuaikan dan diperkuat guna memperkuat wilayah pertahanan ibu kota negara. Hal tersebut berkaitan dengan bergesernya centre of gravity atau pusat kekuatan (sekaligus pusat kerawanan).

Kedua. Pertahanan negara merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang kokoh akan mampu mewujudkan bangsa yang kuat. Sudah ada landasan hukum yang digunakan dalam menyusun konsep gelar kekuatan yang terintegrasi di wilayah ibu kota negara.

Ketiga. Pemindahan Ibu Kota Negara ini harus direncanakan dengan matang karena terdapat potensi dampak positif beserta risiko. Oleh karena itu, perlunya forum resmi sebagai sarana koordinasi dan kerja sama antara TNI, Polri dan Pemda dalam menyiapkan gelar kekuatan di ibu kota negara. Selama ini adalah melalui Forkompinda untuk tingkat daerah dan forum resmi koordinasi TNIPolri dan kementerian terkait di tingkat pusat.

Saran

Pertama. Diperlukan adanya perumusan gelar kekuatan matra darat dalam rangka memperkuat wilayah pertahanan ibu kota negara untuk menjamin kesiapsiagaan TNI khususnya TNI AD.

Kedua. Perlu dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana yang meliputi aspek materiil seperti alutsista, Alat komunikasi yang memadai, alat transportasi, sarana pengintaian dan penginderaan jarak jauh, bekal kesehatan dan sebagainya sehingga gelar kekuatan matra darat dapat memiliki kemampuan operasional yang lebih handal dihadapkan dengan kondisi wilayah ibu kota negara.

Ketiga. Perlu diadakan program lanjutan gelar kekuatan matra darat dalam rangka memperkuat wilayah pertahanan ibu kota negara termasuk yang sebelumnya sudah terbangun sehingga dapat digunakan secara optimal oleh TNI AD guna mendeteksi ancaman yang datang. wilayah pertahanan ibu kota negara dapat mulai dirintis secara bertahap.



KEKUATAN ARMADA LAUT AMERIKA SERIKAT

Mayor Cba I.K. Arsana Putra, S.T., M.Sc.

Pendahuluan

Laut adalah jalur transportasi yang sangat penting bagi dunia baik saat damai, terlebih lagi pada saat situasi perang. Kegiatan transportasi utama barang ke seluruh belahan dunia, dilakukan melalui jalur transportasi laut. Bahkan dalam era globalisasi sekalipun, dimana era transportasi udara begitu cepat dan canggih, transportasi laut masih sangat dibutuhkan khususnya untuk angkutan barang. Bagaimanapun juga transportasi udara untuk angkutan barang, kemampuannya sangat terbatas dibandingkan dengan transportasi laut. Terlebih lagi sangat tidak mungkin untuk mengangkut minyak bumi dari wilayah produsen ke wilayah konsumen menggunakan angkutan udara.

Untuk negara Amerika, sudah sejak dulu mempunyai kebijakan bahwa menguasai laut adalah kunci utama untuk dapat menguasai dunia. Kebijakan Amerika yang menjadi agenda utama mengenai laut adalah, kebebasan untuk menggunakan laut dalam rangka kepentingan perdagangan internasional (menguasai ekonomi dunia), transportasi untuk pasokan energi terutama minyak bumi dari Timur Tengah, serta membangun armada angkatan laut yang kuat, untuk melindungi kepentingan Amerika di seluruh dunia.

Sejarah telah membuktikan, siapa yang dapat menguasai laut, maka dia akan menguasai dunia. Contohnya Inggris, yang di masa lalu memiliki armada laut yang kuat memiliki daerah jajahan/koloni yang paling banyak di dunia (termasuk Amerika). Pengalaman Amerika di Eropa dalam Perang Dunia II, memimpin sekutu mendaratkan pasukan amfibi di pantai Normandia Perancis untuk menyerang Jerman.

Setelah Perang Dunia II berakhir seluruh negara yang terlibat perang mengalami krisis ekonomi, karena seluruh potensi yang ada digunakan untuk membiayai perang. Amerika mulai membangun ekonominya kembali, salah satunya dengan cara menguasai laut, untuk membangun ekonominya. Laut merupakan jalur terpenting untuk dikuasai guna mendukung transportasi barang ke seluruh dunia. Kebijakan ini ditempuh belajar dari pengalaman Perang Dunia II serta dari Inggris yang merupakan negara nenek moyangnya, bahwa siapa yang dapat menguasai laut, maka dia akan menguasai dunia.

Pembahasan

Potensi Konflik di Laut.

Pasca Perang Dunia II, dunia dilanda krisis yaitu terjadinya perebutan pengaruh antara pemenang perang yaitu Amerika dengan Uni Soviet.

Perebutan pengaruh itu kemudian disebut perang dingin. Terjadi perlombaan kekuatan besar-besaran di segala bidang, terutama ideologi, politik, dan militer. Amerika sendiri sudah berkomitmen untuk dapat menguasai dunia, maka harus menguasai lautan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Amerika membangun angkatan laut agar dapat melindungi kepentingan Amerika dan sekutu-sekutunya di seluruh dunia.

Seiring berjalannya waktu tahun 1991 Uni Soviet ambruk karena krisis ekonomi melanda negeri itu. Perang dingin pun berakhir, tetapi potensi konflik kepentingan di laut masih tetap tinggi, dimana keinginan Amerika untuk menguasai sumber minyak bumi beserta jalur transportasinya terutama laut menjadi agenda utama pasca era perang dingin.

Kita tahu sumber daya alam minyak bumi 90% berada di kawasan Timur Tengah. Untuk dapat mengamankan jalur transportasi minyak bumi dari sumber ke konsumen (Amerika), haruslah menguasai kawasan Timur Tengah khususnya mengamankan perairan Teluk Persia. Dari sinilah minyak bumi sebagian besar diekspor ke konsumen. Apalagi sekarang Amerika sedang mengkampanyekan teroris sebagai musuh bersama dunia, menambah kerawanan keamanan jalur transportasi minyak di laut dari ancaman terorisme.

Saat perang Irak-Iran berlangsung sekitar tahun 1980-an, dunia pernah mengalami krisis minyak sesaat, dimana jalur transportasi minyak dari Timur Tengah melewati perairan Teluk Persia yang sempit itu, terganggu akibat hampir semua kapal yang mengangkut minyak ditembak atau terkena ranjau yang dipasang kedua belah pihak yang sedang perang.



Hal tersebut menyebabkan kapal-kapal tanker pengangkut minyak berhenti beroperasi karena takut menjadi sasaran tembak ataupun terkena ranjau yang disebar di perairan Teluk Persia. Akibat peristiwa itu, Amerikalah yang paling menderita karena hampir sebagian besar keperluan minyak bumi dunia dipakai untuk kepentingan mereka.



Berkaca dari peristiwa tersebut, keinginan menguasai dan mengamankan laut untuk menjamin kepentingan perekonomian Amerika menjadi agenda utama politik luar negerinya. Di sinilah potensi konflik kemungkinan akan terjadi.

Hampir setiap negara di dunia mempunyai laut sebagai teritorialnya. Kemungkinan terjadinya pelanggaran wilayah kedaulatan laut di suatu negara oleh militer Amerika sangat besar kemungkinan terjadi. Apalagi Amerika mempunyai agenda lain sebagai polisi dunia, yang kadang-kadang seenaknya melanggar kedaulatan suatu negara khususnya kedaulatan laut hanya alasan demi keamanan transportasi laut. Kalau ini terus terjadi akan menimbulkan potensi konflik dengan negara yang merasa teritorial lautnya diganggu.

Dewasa ini negara yang dianggap sebagai ancaman terhadap hegemoni Amerika atas dunia adalah China. Akhir-akhir ini China berkembang begitu pesat baik di bidang ekonomi maupun militer. Perkembangan pesat ekonomi China mau tidak mau pasti membutuhkan minyak bumi atau gas alam untuk dijadikan energi untuk menggerakkan industrinya.

Sumber daya alam minyak bumi sebagian besar terletak di Timur Tengah, sedangkan gas alam di Asia Tengah serta Indonesia. Untuk menjamin kelancaran akses ke sumber energi maka perlu jaminan keamanan. Kepastian jaminan keamanan hanya didapat bila memiliki angkatan bersenjata yang kuat khususnya angkatan laut. Mulai dari sinilah konflik akan mulai terjadi antara Amerika dan China.



Kita maklum untuk menjamin keamanan pasokan energi dari sumbernya lewat transportasi laut, China berkepentingan untuk memiliki angkatan laut yang besar dan kuat. Di sisi lain, dengan memiliki angkatan laut yang kuat potensi konflik dengan Amerika akan semakin besar. Jepang dan Korea Selatan adalah tetangga China yang merupakan sekutu dekat Amerika.



Dengan memiliki angkatan laut yang kuat, China bukan saja menjadi ancaman bagi Amerika, tetapi juga bagi Korea Selatan dan Jepang. Sebagai negara besar baik dari segi jumlah penduduk maupun luas wilayah, memang China berhak untuk memiliki angkatan perang yang kuat untuk melindungi kepentingannya di masa yang akan datang.

Penutup

Terjadinya konflik terbuka antara China dan Amerika dalam perebutan menguasai laut, khususnya jalur transportasi minyak dan gas alam di kawasan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sangat besar kemungkinan terjadi di masa mendatang. Kedua negara masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda dalam hal menguasai jalur transportasi laut.



Di pihak China, menguasai jalur transportasi laut bertujuan untuk menjamin keamanan terhadap pasokan energi dari gangguan teroris dan perompak. Di satu sisi, munculnya kekuatan laut China yang tangguh, dianggap ancaman oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Apabila perkembangan kekuatan militer China tidak diwaspadai, hanya tinggal menunggu waktu saja Amerika akan tersaingi oleh China, karena China memiliki semua modal untuk menjadi negara adidaya baru, baik bidang ekonomi maupun militer.

Di sinilah perlunya kearifan kedua negara tersebut, juga peran negara-negara berkembang, kompetisi dalam perkembangan ekonomi dan juga militer jangan sampai merugikan perdamaian dunia. Bagaimanapun perang akan selalu membuat penderitaan. Bangsa Amerika harus bersikap arif dan bijaksana, bahwa Amerika dulu membangun armada angkatan laut begitu besar dan kuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingannya. Begitu pula kini China membangun armada lautnya menjadi kuat, dengan tujuan melindungi kepentingan China terhadap keamanan akses ke sumber daya alam. Jadi semua itu harus disikapi secara proposional tidak bermuka dua atau ambivalen.

Mayor Cba I Ketut Arsana Putra, S.T., M.Sc. Abituren Sepa PK 2000 dan Dikreg LX Seskoad. Saat ini menjabat, Dandenharjasaint I-44-12



POSTUR ANGKATAN BERSENJATA NEGARA FINLANDIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN MILITER DEWASA INI

Letkol Inf Deksi Van Toni, S.H., M.M.

Pendahuluan

Sejak permulaan abad ke-19, wilayah Finlandia berada di bawah pengaruh Kekaisaran Rusia, namun dengan timbulnya Revolusi Oktober dan perang sipil Rusia pada tahun 1917, Finlandia lalu memerdekakan diri pada tahun yang sama. Pada perkembangannya Uni Soviet selaku negara penerus Kekaisaran Rusia sudah menyatakan pengakuannya atas kemerdekaan dan rezim baru Finlandia. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 tidak memusnahkan ancaman yang bersifat militer terhadap negara-negara tetangga Uni Soviet termasuk negara Finlandia. Perencanaan militer oleh negara-negara tersebut telah mengarah pada kemampuan untuk mencegah dan menggagalkan serangan strategis ke wilayah-wilayah vital negara. Namun kenyataannya, dewasa ini dengan semakin kompleksnya ancaman yang dihadapi oleh suatu negara baik berupa ancaman militer, nirmiliter maupun hibrida memunculkan adanya restrukturisasi maupun reorganisasi militer Finlandia dalam menghadapi ancaman. Pada akhirnya akan terwujud suatu upaya untuk mewujudkan suatu postur pertahanan militer negara yang mampu menghadapi ancaman dihadapkan dengan anggaran negara, kondisi geografis serta strategi pertahanan yang dapat diwujudkan oleh negara Finlandia.

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan postur Angkatan Bersenjata negara Finlandia perlu diidentifikasi dan dianalisa sehingga dapat dijadikan sebagai suatu bahan pelajaran untuk negara Indonesia pada umumnya dan TNI pada khususnya. Menurut teori Metode Pemecahan Persoalan (MPP) dalam rangka memecahkan suatu masalah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali masalah serta menetapkan tujuan pemecahannya. Hal ini diawali dengan mencari/mengidentifikasi tentang pokok permasalahannya, antara lain sebagai berikut : Pertama, bagaimana sejarah singkat Angkatan Bersenjata negara Finlandia serta besar anggaran Angkatan Bersenjata dihadapkan dengan Gross National Product (GNP). Kedua, bagaimana kemampuan Angkatan Bersenjata dihadapkan dengan geografi negara. Ketiga, bagaimana kekuatan Angkatan Bersenjata dihadapkan dengan geografi negara tersebut. Keempat, Bagaimana, gelar Angkatan Bersenjata dihadapkan dengan geografi negara tersebut. Kelima, Bagaimana strategi Angkatan Bersenjata negara tersebut dihadapkan kemungkinan ancaman militer dari luar. Dari uraian permasalahan di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu **"Bagaimana Postur Angkatan Bersenjata Negara Finlandia Dalam Menghadapi Ancaman Militer Saat Ini ?"**.

Untuk memudahkan pemahaman pembaca maka penulis berusaha memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, yang didukung dengan referensi-referensi yang ada serta menganalisisnya melalui metode penulisan deskriptif analisis dan studi kepustakaan. Nilai guna dari tulisan ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, sehingga dapat diperoleh manfaat bagi pembangunan postur TNI dalam menghadapi ancaman ke depan yang semakin kompleks. Sedangkan maksud penulisan ini untuk memberikan gambaran tentang postur Angkatan Bersenjata Negara Finlandia sejak mulai didirikan sampai dengan saat ini dihadapkan dengan anggaran, kondisi geografis serta ancaman yang dihadapinya. Tujuannya sebagai bahan masukan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi Komando Atas untuk dapat mengambil kebijakan dalam rangka mewujudkan postur pertahanan TNI yang semakin handal. Ruang lingkup penulisan mencakup pendahuluan, pembahasan dan penutup dengan dibatasi pada pembangunan postur Angkatan Bersenjata Negara Finlandia.

Pembahasan

Setelah mengidentifikasi dan menemukan permasalahan, maka menurut teori MPP langkah selanjutnya adalah mempersempit permasalahan sampai ke tingkat yang dapat diteliti oleh Penulis. Penyempitan masalah pada pembangunan postur pertahanan Angkatan Bersenjata Negara Finlandia sehingga perlu dilakukan analisa dengan cara menggali lebih dalam tentang hal tersebut.

Di sini Penulis menggunakan teori Kerlinger (1986) yaitu cara dan proses penemuan melalui pengamatan atau penyelidikan yang bertujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau persoalan sebagai suatu masalah yang diteliti, sehingga ditemukan inti permasalahan yang harus dipecahkan yaitu Postur Angkatan Bersenjata Negara Finlandia dalam Menghadapi Ancaman Militer Dewasa Ini.

a. Sejarah singkat Angkatan Bersenjata negara Finlandia serta besar anggaran

Angkatan Bersenjata dihadapkan dengan Gross National Product (GNP). Meskipun negara Finlandia tidak mencapai kemerdekaan nasional penuh sampai tahun 1917, tradisi militernya saat ini sudah berlangsung lebih dari 300 tahun. Sebagai bagian terintegrasi dari kerajaan Swedia, Finlandia memasok tentara Swedia tidak hanya dengan prajurit yang direkrut, tetapi juga dengan perwira yang berkualifikasi tinggi serta menyumbang sebanyak sepertiga dari tenaga angkatan bersenjata Swedia, infanteri dan kavaleri Finlandia pada saat Swedia memainkan peran yang menentukan dalam politik kekuatan Eropa. Kemunduran yang akhirnya diderita Swedia di Eropa dijelaskan oleh Finlandia dengan pembenaran yang cukup besar sebagai kesalahan yang telah dibuat oleh raja-raja Swedia di tingkat politik. Penampilan Finlandia di berbagai medan perang telah membenarkan reputasi mereka atas keberanian dan kepercayaan diri mereka pada kemampuan sendiri.

Dengan penurunan kekuatan Swedia pada abad ke 18, Finlandia dipanggil untuk mempertahankan perbatasan negara di Timur melawan musuh tradisional yaitu Rusia. Pada tiga kesempatan besar, tentara Rusia menduduki beberapa bagian negara itu selama beberapa tahun sebelum akhirnya diusir oleh pasukan Finlandia dan Swedia. Ketika Finlandia menjadi Finlandia Agung saat Kekaisaran Rusia pada tahun 1809 sebagai akibat dari Perang Finlandia (1808-1809) unit-unit Finlandia dari tentara Swedia dibubarkan. Unsur-unsur militer asli Finlandia pertama dari 3 resimen infanteri ringan dimunculkan pada saat invasi Napoleon ke timur pada tahun 1812, tetapi selama sebagian besar abad ke 19, satu-satunya kekuatan militer Finlandia adalah satu batalion penjaga yang dibayar oleh Tsar Rusia. Orang Finlandia secara khusus ada yang dibebaskan dari wajib militer Rusia, tetapi lebih dari 3.000 orang dari rakyatnya bertugas di pasukan Tsar Rusia tahun 1809 sampai dengan tahun 1917. Pada awal abad ke-20, tentara Finlandia terdiri dari 8 Batalyon Infanteri Provinsi dan 1 Resimen Naga bersama dengan 32 Kompi Cadangan.

Pada tahun 1901 sebagai bagian dari gerakan Russification otoritas Rusia memperkenalkan undang-undang dinas militer yang mewajibkan Finlandia untuk bertugas di tentara Tsar selama 4 tahun di mana saja di dalam Kekaisaran Rusia. Hanya 1 Resimen Naga dan 1 Batalion Penjaga dari tentara Finlandia yang akan dipertahankan sisanya akan dimasukkan ke dalam tentara kekaisaran. Undang-undang baru ini mendapat perlawanan di Finlandia dan memperkuat gerakan nasionalis Finlandia. Dalam perubahan kebijakan pada tahun 1905, undang-undang wajib militer ditangguhkan dan orang Finlandia tidak pernah lagi dipanggil untuk bertugas dalam seragam Rusia, sehingga Rusia membubarkan milisi, akademi militer dan batalion penjaga.

Setelah Finlandia merdeka pada bulan Desember 1917, milisi nasionalis kelas menengah yang dikenal sebagai Pengawal Putih diam-diam didirikan pada tahun 1904 dan 1905 dan yang tetap di bawah tanah sejak saat itu menyamar sebagai klub atletik dan kelompok lain, secara resmi memproklamasikan tentara pemerintah Finlandia di bawah Jenderal Mannerheim. Pasukan yang disebut Tentara Putih ini diperkuat dan dilatih oleh 1.100 perwira dan Perwira Non Komisi (NCO) yang telah melakukan perjalanan secara sembunyi-sembunyi ke Jerman selama Perang Dunia I dan telah membentuk Batalyon Jaeger Kerajaan Prusia ke-27. Kembali ke Finlandia, mereka membawa kembali senjata kecil yang sangat dibutuhkan yang diambil dari Rusia. Pasukan Putih dibesarkan oleh wajib militer baru, perwira bekas angkatan bersenjata Finlandia, sukarelawan Swedia dan perwira Finlandia yang pernah bertugas di Swedia dan di tentara Rusia selain Jaeger. Setelah 3 bulan konflik sipil, Tentara Putih yang terdiri dari sekitar 70.000 tentara mengalahkan Pengawal Merah dari sayap radikal Partai Sosial Demokrat Finlandia pada Mei 1918. Kedua belah pihak menderita ribuan korban. Dalam 4 bulan, Pengawal Putih telah berevolusi dari milisi yang bermotivasi kuat, tetapi kurang terlatih menjadi angkatan bersenjata nasional yang disiplin dan tangguh dalam pertempuran.

Meskipun secara numerik lebih unggul dan diperkuat oleh garnisun Rusia di Finlandia, Pengawal Merah kekurangan peralatan, pelatihan dan kepemimpinan. Selama dan setelah Perang Sipil, konflik muncul antara perwira Jaeger yang lebih muda dari tentara Finlandia dan mantan perwira Tsar di jajaran atasnya. Ketika sebagian besar korps perwira Finlandia mengancam akan mengundurkan diri pada tahun 1924 karena dominasi kepemimpinan terlatih Rusia, sebagian besar perwira Rusia disingkirkan dan perwira Jaeger mulai menduduki eselon yang lebih tinggi, membawa pengaruh doktrin dan pelatihan militer metode Jerman.

Pemerintahan baru memberlakukan kembali wajib militer setelah Perang Saudara dan membentuk pasukan nasional kecil. Hal itu juga memperkenalkan sistem mobilisasi dan kursus penyegaran wajib untuk militer cadangan. Akademi Militer Finlandia diaktifkan kembali pada tahun 1919 dan selama tahun 1920-an sekolah perwira cadangan dibentuk bersama-sama dengan sekolah NCO untuk berbagai cabang dan cabang dinas. Pengawal Sipil, formasi sayap kanan sukarela yang terdiri dari 100.000 personel yang berasal dari Pengawal Putih membentuk pasukan tambahan lokal. Meski demikian, Finlandia tidak berhasil membangun tentara nasional yang kuat. Persyaratan satu tahun dinas wajib lebih besar dari pada yang diberlakukan oleh negara Skandinavia lainnya pada 1920-an dan 1930-an, tetapi oposisi politik terhadap pengeluaran pertahanan membuat militer tidak diperlengkapi dengan baik untuk menahan serangan oleh Uni Soviet sebagai satu-satunya ancaman keamanan di Finlandia.

Ketika Uni Soviet menginvasi Finlandia pada November 1939 mereka dihadang oleh 135.000 pasukan Finlandia yang diorganisir menjadi 9 Divisi. Dalam Perang Musim Dingin ini tentara Finlandia mengalahkan pasukan Uni Soviet yang menyerang lebih banyak jumlahnya dalam waktu yang relatif singkat. Pasukan Tentara Merah tidak terlatih dengan baik dan mereka tidak siap untuk bertempur di bawah kondisi musim dingin yang sangat buruk. Tentara Finlandia mampu melakukan pemalakan

tajam dalam pertempuran di Tanah Genting Karelia dan di Timur laut Finlandia yang menewaskan antara 200.000 sd. 250.000 tentara Uni Soviet. Untuk sesaat, tampaknya Finlandia akan membalikkan penyerang dan akan menimbulkan kekalahan militer yang mencengangkan pada tetangganya yang besar dan kuat itu. Ketika para komandan Uni Soviet kembali ke strategi untuk menjatuhkan Finlandia yang kalah jumlah di Karelia dengan daya tembak mereka yang luar biasa, bagaimanapun, kekalahan Finlandia tak terhindarkan. Pada tanggal 12 Maret 1940, gencatan senjata memberikan sedikit lebih banyak wilayah kepada Soviet dari pada yang mereka tuntut pada tahun 1939. Soviet menganggap wilayah ini penting untuk persiapan mereka menghadapi pertempuran di masa depan dengan Nazi Jerman.

Dalam Perang berkelanjutan, yang diperjuangkan Finlandia sebagai musuh bebuyutan dengan Jerman dari tahun 1941 hingga 1944, pasukan Finlandia kembali menunjukkan kualitas superior mereka. Pasukannya sekarang jauh lebih baik dan periode wajib militer telah ditingkatkan menjadi 2 tahun, memungkinkan pembentukan 16 Divisi Infanteri. Pasukan Finlandia yang dimobilisasi penuh sebanyak 400.000 orang secara numerik lebih unggul dari pada pasukan Soviet yang telah dikurangi untuk memenuhi kebutuhan pasukan melawan serangan Jerman di front tengah. Tujuan Finlandia bukanlah penaklukan tetapi mendapatkan kembali wilayah tradisional Finlandia. Finlandia menolak tekanan Jerman untuk mengarahkan dorongan utama pasukannya untuk mematahkan pengepungan Leningrad yang mendorong 80 hingga 160 KM ke wilayah Soviet lebih jauh ke utara di atas Danau Ladoga sebelum menetap untuk operasi pertahanan statis. Tentara Finlandia terus menduduki daerah ini sampai serangan besar Soviet pada bulan Juni 1944. Terkurung dalam koalisi Poros yang kalah, Finlandia harus mundur untuk kedua kalinya, dan mereka lolos dari invasi dan pendudukan Soviet hanya dengan membuat perjanjian

terpisah bahwa mewajibkan mereka untuk melakukan aksi militer melawan tentara Jerman yang mundur.

Demobilisasi dan penggabungan kembali Pasukan Pertahanan Finlandia dilakukan pada akhir 1944 di bawah pengawasan Komisi Kontrol Sekutu. Menyusul Perjanjian Paris pada tahun 1947 yang memberlakukan pembatasan ukuran dan peralatan angkatan bersenjata dan mengharuskan pembubaran Pengawal Sipil, Finlandia menata kembali pasukan pertahanannya. Fakta bahwa kondisi perjanjian damai tidak termasuk larangan cadangan atau mobilisasi memungkinkan untuk pembentukan pertahanan yang memadai dalam batas yang ditentukan. Reorganisasi menghasilkan penghapusan sekitar 15 % dari posisi perwira dan NCO, adopsi Brigade menggantikan Divisi sebagai formasi dasar dan pengurangan masa kerja wajib militer menjadi 240 hari (dari 330 hari) untuk NCO dan untuk calon petugas cadangan. Organisasi komando tinggi tidak berubah, tetapi Menteri Pertahanan diberi sedikit lebih banyak wewenang dalam pengambilan keputusan. Penyelesaian reorganisasi ini pada tahun 1952 menetapkan struktur di mana Angkatan Pertahanan modern akan berkembang. Pada saat ini anggaran pertahanan Finlandia sama dengan sekitar 2 miliar euro atau 1,4-1,6 persen dari PDB. Layanan luar negeri sukarela sangat populer dan pasukan bertugas di seluruh dunia dalam misi PBB, NATO dan Uni Eropa.

2. Kemampuan Angkatan Bersenjata dihadapkan dengan Geografi Negara Finlandia.

Angkatan Pertahanan Finlandia sedang mengembangkan kemampuan baru sehingga dapat beroperasi lebih mandiri tanpa bantuan negara tetangga. Posisi geografis unik negara Finlandia yang terletak di sebelah Rusia dan Kutub Utara mengharuskannya memiliki militer yang kuat dan mandiri. Pemerintah menghabiskan sekitar 1,5 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pertahanan. Namun, hal ini diperkirakan akan meningkat menjadi 2 % pada tahun 2020-an karena adanya peningkatan investasi pada

program kapabilitas strategis. Tidak seperti banyak negara di Eropa, Finlandia bukanlah anggota NATO. Sebagai negara nonblok secara militer, Finlandia harus bisa mempertahankan diri. Itulah mengapa negara harus meningkatkan kemampuannya dan dalam kasus terburuk, bersiap untuk berperang sendirian. Bidang- bidang yang membutuhkan perbaikan meliputi: dunia maya, komunikasi, komputer, informasi/intelijen, pengawasan, akuisisi penargetan dan lain-lain.

Antara tahun 2017 dan 2020, Angkatan Bersenjata Finlandia telah memprioritaskan kesiapan, pertahanan dunia maya, keterlibatan jarak jauh dan pasukannya. Pada tahun 2021 hingga 2024 Finlandia memperkuat kekuatan bersenjata akan menjadi prioritas utama. Pada pertengahan tahun 2021, fokusnya akan beralih ke kemampuan pertahanan udara yang bertepatan dengan sistem pertahanan udara berbasis darat warisan Finlandia yang mencapai akhir masa pakainya. Bagian dari rencana militer termasuk mengganti 7 kombatan permukaan Angkatan Lautnya dengan 4 korvet kelas Pohjanmaa baru di bawah program yang disebut Skuadron 2020. Pada September 2019, Konstruksi Laut Rauma dan Saab dipilih untuk upaya tersebut. Konstruksi dijadwalkan untuk Tahun 2022 hingga 2025 dan kemampuan operasional penuh dijadwalkan untuk pertengahan tahun 2021-an menurut Kementerian

Pertahanan Finlandia. Proyek ini diluncurkan pada tahun 2015. Kapal baru akan menanggapi beberapa kebutuhan kemampuan Finlandia, termasuk peningkatan pertempuran permukaan, pertahanan udara, serangan jarak jauh yang tepat, peletakan ranjau dan kemampuan kapal selam yang beberapa diantaranya dibangun oleh dukungan AS. Mereka juga akan dirancang untuk bekerja dalam kondisi es dan memenuhi persyaratan khusus Finlandia.

Program besar lainnya termasuk penggantian F/A-18C/D Hornets dari Angkatan Udara Finlandia. Masa pakai pesawat jet yang direncanakan saat ini akan berakhir antara tahun 2025 dan 2030.

Pemerintah telah memeriksa tawaran dari Eurofighter, Boeing, Dassault, Lockheed Martin dan Saab. Perusahaan dipilih berdasarkan keterjangkauan dan kemampuan militer. Pemberian kontrak dijadwalkan untuk tahun 2021. Militer perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan ancaman baru, yang mengharuskan penggantian sistem pertahanan utama angkatan udara mulai tahun 2025 dan seterusnya. Angkatan Bersenjata Finlandia juga mengutamakan peningkatan mobilitas pasukan darat khususnya di wilayah Arktik. Konsepnya adalah untuk mengembangkan platform Angkatan Bersenjata generasi mendatang yang mampu beroperasi dalam iklim dan kondisi geografis yang ekstrim. Negara ini juga sedang berupaya untuk mendapatkan ratusan kendaraan baru pada tahun 2021 ini meskipun masih menentukan mana yang akan dibutuhkan.

3. Kekuatan Angkatan Bersenjata dihadapkan dengan Geografi negara Finlandia.

Total populasi penduduk negara Finlandia berdasarkan data bulan Maret 2021 adalah sekitar 5.571.665 orang dengan usia produktif sejumlah 2.284.383 orang dan yang siap untuk digerakkan sejumlah 1.896.038 orang. Sedangkan total personel militer adalah 315.500 orang terdiri dari 21.500 personel aktif, 280.000 tentara cadangan serta 14.000 paramiliter. Sementara itu kekuatan Angkatan Udara negara ini memiliki 194 buah pesawat yang terdiri dari 55 buah pesawat tempur, 11 buah pesawat angkut, 105 buah pesawat latihan, 1 pesawat misi khusus dan 22 helikopter. Untuk kekuatan darat memiliki 239 tank, 2.055 kendaraan lapis baja, 140 meriam artileri GS, 625 meriam Tarik dan 75 peluncur roket. Untuk kekuatan Angkatan Laut terdiri dari 24 buah kapal yaitu 8 kapal patrol dan 18 kapal tambang. Tentara diorganisir menjadi pasukan operasi yang terdiri dari sekitar 61.000 orang dan pasukan teritorial yang terdiri dari 176.000 orang. Sedangkan kekuatan militer negara tersebut diorganisir sebagai berikut : a. Angkatan Darat terdiri dari : 3 Brigade Siap Tempur (1 Brigade lapis baja), 2 Brigade Jaeger,

2 Grup Pertempuran Mekanis, 1 Batalion Helikopter, 1 Batalion Jaeger Khusus dan 1 Unit Rudal Anti Pesawat. Kekuatan Teritorial terdiri dari : 6 Brigade Infanteri (Regional), 14 Batalion / Grup Pertempuran Independen (Regional) dan 28 Pasukan Teritorial / Ukuran Kompi (Regional) b. Angkatan Laut terdiri dari : 2 Kelompok Pertempuran (Armada), 3 Kelompok Pertempuran (Pesisir) dan Kelompok Pertempuran (Pesisir Jaeger) c. Angkatan Udara terdiri dari : 3 Skuadron Tempur dan 4 Basis Operasi Utama.

4. Gelar Angkatan Bersenjata dihadapkan dengan Geografi negara Finlandia.

Tujuan nasional Negara Finlandia adalah untuk menjaga daerah-daerah penting, terutama daerah ibu kota dalam kepemilikan Finlandia. Di wilayah lain, ukuran negara digunakan untuk menunda dan melemahkan penyerang, sampai musuh dapat dikalahkan di wilayah yang dipilih oleh Finlandia. Angkatan Darat memikul sebagian besar tanggung jawab untuk tugas ini. Gabungan dari tentara masa perang 2 kelompok Pertempuran Mekanis, 3 Brigade Kesiapan, 2 Brigade Jaeger, 2 Kelompok Pertempuran Bermotor, 6 Brigade Infanteri (Pasukan Teritorial), Batalion Jaeger Khusus, Batalion Helikopter, Unit Khusus di bawah staf umum, Unit Pertahanan Lokal, Unit Tentara sebagian besar terdiri dari cadangan, Tentara Karir yang bertugas sebagai Komando dan Posisi Khusus. Peran Angkatan Laut adalah untuk mengusir semua serangan yang dilakukan terhadap pantai Finlandia dan untuk menjaga integritas teritorial selama masa damai dan fase "abu-abu" dari konflik tersebut. Pertahanan maritim bergantung pada penggunaan gabungan artileri pantai, sistem rudal dan ranjau laut untuk melumpuhkan penyerang. Angkatan Udara digunakan untuk menyangkal superioritas udara penyerang dan untuk melindungi pasukan dan objek yang paling penting dari kepentingan nasional dalam hubungannya dengan pertahanan udara berbasis darat. Karena kesiapan Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang tinggi bahkan selama masa damai, personel karier memiliki peran

yang jauh lebih terlihat dalam tugas-tugas masa perang dari cabang-cabang pertahanan ini. Penjaga Perbatasan memiliki tanggung jawab atas keamanan perbatasan dalam semua situasi.

Selama perang, itu akan berkontribusi pada pertahanan nasional yang sebagian diintegrasikan ke dalam tentara, total kekuatan yang dimobilisasi menjadi sekitar 11.600 orang tentara. Salah satu kegunaan yang diproyeksikan untuk Penjaga Perbatasan adalah perang gerilya di daerah yang sementara diduduki oleh musuh.

5. Strategi Angkatan Bersenjata negara Finlandia dihadapkan kemungkinan ancaman militer dari luar.

Setelah Perang Dunia ke-2, Pasukan Angkatan Bersenjata Finlandia sangat bergantung pada peralatan perang. Pengeluaran pertahanan minimal sampai awal 1960 -an. Selama puncak Perang Dingin, pemerintah Finlandia melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Hal ini mengakibatkan peningkatan beberapa sistem persenjataan baru dan memperkuat pertahanan Lapland Finlandia dengan mendirikan garnisun baru. Sejak tahun 1968 dan seterusnya, pemerintah Finlandia mengadopsi doktrin pertahanan teritorial, yang membutuhkan penggunaan wilayah daratan yang luas untuk memperlambat dan melemahkan potensi penyerang.

Doktrin tersebut dilengkapi dengan konsep pertahanan total yang menyerukan penggunaan seluruh sumber daya masyarakat untuk pertahanan negara jika terjadi krisis. Salah satu tujuan dari doktrin baru ini adalah untuk mencegah serangan strategis yang berhasil digunakan oleh Uni Soviet untuk menggulingkan pemerintah Cekoslowakia pada tahun 1968. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, kemampuan Angkatan Bersenjata dikembangkan dari basis ini.

Dalam konfrontasi habis-habisan antara 2 blok besar, tujuan Finlandia adalah mencegah serangan militer di dalam perbatasan dan dengan cara ini menjaga Finlandia tetap berada di luar perang.

Doktrin militer Finlandia didasarkan pada konsep pertahanan total. Istilah total berarti semua sektor pemerintahan dan ekonomi terlibat dalam perencanaan pertahanan. Pada prinsipnya, setiap kementerian memiliki tanggung jawab untuk merencanakan operasinya selama krisis. Tidak ada otoritas darurat khusus, seperti Badan Manajemen Darurat Federal AS (FEMA) atau Kementerian Situasi Darurat Rusia. Sebaliknya, setiap otoritas secara teratur berlatih untuk menghadapi krisis dan telah dialokasikan kombinasi kekuatan normal dan darurat yang dibutuhkannya untuk tetap berfungsi dalam situasi apa pun yang memungkinkan. Dalam perang, semua sumber daya masyarakat dapat dialihkan untuk melayani kelangsungan hidup nasional.

Dasar hukum untuk tindakan tersebut ditemukan dalam Undang-Undang Kesiapan dan Undang-Undang Pertahanan Negara, yang akan mulai berlaku melalui keputusan parlemen jika terjadi krisis. Tujuan utama doktrin ini adalah untuk membangun dan mempertahankan kekuatan militer yang mampu mencegah penyerang potensial menggunakan wilayah Finlandia atau menerapkan tekanan militer terhadap Finlandia.



wilayah Finlandia

Untuk mencapai hal ini, pertahanan diatur berdasarkan doktrin pertahanan teritorial. Prinsip utama pertahanan teritorial adalah non-aliansi militer, wajib militer umum, pertahanan teritorial, pelatihan wajib militer untuk unit masa perang, mobilisasi tersebar dan kesiapan yang fleksibel dalam menanggapi ancaman militer dari berbagai tingkatan. Perencanaan pertahanan diatur untuk melawan tiga situasi ancaman yaitu : Krisis regional yang mungkin berdampak pada Finlandia, Tekanan politik, ekonomi dan militer yang mungkin termasuk ancaman penggunaan kekuatan militer dan penggunaannya yang terbatas dan Penggunaan kekuatan militer dalam bentuk serangan strategis atau serangan yang diawali dengan serangan strategis yang bertujuan untuk merebut wilayah.

Penutup

Berdasarkan uraian tentang postur negara Finlandia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa negara Finlandia telah mengalami sejarah militer yang cukup panjang selama 300 tahun dengan berbagai fase mulai dari penguasaan Swedia dan Uni Soviet sehingga apabila dilihat dari segi kemampuan, kekuatan, gelar Angkatan Bersenjata serta strategi yang dikembangkan maka dapat dikatakan bahwa secara umum merupakan salah negara yang cukup diperhitungkan. Hal ini terbukti dari data yang diperoleh dari *global firepower* pada tanggal 2 Maret 2021 menempatkan negara ini pada rangking 56 dari 140 dari seluruh negara di dunia dengan mempertimbangkan tinjauan GNP tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa postur pertahanan Finlandia secara khusus menyesuaikan dengan kondisi geografis, masa lalu sejarah serta ancaman yang semakin berkembang saat ini. Hal ini tentunya berbeda dengan kondisi dan latar belakang yang dialami oleh pertahanan TNI sehingga tidak dapat diperbandingkan untuk melihat secara detail berdasarkan kepentingan dan tujuan nasional masing-masing negara.

Ltkol Inf Deksi Van Toni, S.H.,M.M, Abituren Sepa PK 1996 dan Lulusan Dikreg 60 Seskoad. Saat ini menjabat Pabandya Min Intel Sintel Kostrad



PENGEMBANGAN POSTUR PERTAHANAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK DOMINIKA

Kompol Arief Prasetya S.I.K., M.Med.Kom

Pendahuluan

Guna mewujudkan stabilitas keamanan suatu negara yang kondusif, dibutuhkan pendekatan strategi pertahanan yang komprehensif. Melalui pendekatan strategi pertahanan smart power yang merupakan kombinasi yang sinergis antara pembangunan kekuatan hard power (Rakyat Plus TNI/Alutsista Tri-matra) dan kekuatan soft power (mindset dan diplomasi pertahanan kawasan) yang berlandaskan kekuatan nilai-nilai idealisme hati nurani dan jati diri suatu bangsa.¹ Strategi pertahanan suatu negara dapat dikaji dan dievaluasi salah satunya melalui pertahanan militernya. Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung.

Pertahanan militer sebagai daya dan kekuatan angkatan bersenjata ditampilkan melalui SDM dan Alutsista, kemudian didirikan dan dikembangkan secara profesional sampai tingkat standar penangkalan tertentu. Meskipun begitu, pembangunan daya pertahanan negara juga sebaiknya dipersiapkan untuk menghadapi setiap ancaman yang sewaktu-waktu mungkin timbul.

Dilansir dari laman kompas, Republik Dominika termasuk salah satu negara dengan pertahanan militer terlemah di dunia versi Global Firepower 2018 dengan ranking global berada pada urutan 125. Negara yang memiliki total populasi sekitar 71.440 jiwa pada tahun 2010 dengan total GDB per kapita sebesar US\$ 6,670 tersebut memiliki personel militer sebanyak 65.925 (data tahun 2019). Secara geografis, Dominika memiliki luas wilayah sebesar 750 km² serta diapit oleh Laut Karibia dan Laut Atlantik Utara. Negara ini memiliki curah hujan yang tinggi sekitar 1800 mm di bagian pantai dan lebih dari 7.500 mm di pedalaman pegunungan yang membuatnya memiliki Vegetasi pulau yang padat.

Keadaan geografi Dominika yang juga bergunung, memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, dan berada pada paling utara dari Kepulauan Windward yang menyebabkan Dominika masuk kedalam Atlantic Hurricane Belt. Badai seringkali melanda di Dominika, terhitung setelah Dominika mendapatkan kemerdekaannya hingga rentan waktu 2011, sebanyak 9 badai telah melanda Dominika. Dominika yang sering dilanda bencana alam seperti badai tropis dan angin topan juga mengakibatkan terjadinya kerusakan parah pada berbagai infrastruktur Dominika.

Sehingga hal ini dapat menghambat laju kegiatan ekonomi. Kerusakan juga terjadi pada tanaman pangan yang selama ini menjadi basis ekonomi negara. Hal tersebut membuat Dominika melakukan pinjaman luar negeri untuk dapat melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap proyek infrastruktur publik yang membuat kenaikan jumlah hutang. Kondisi ini sedikit banyak akan berdampak pada stabilitas keamanan dan perdamaian negaranya.

Di sisi lain, Republik Dominika ditempatkan dalam komunitas internasional sebagai negara berdaulat dan demokratis yang bertindak dalam membela kepentingan nasionalnya dan secara konsisten mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum internasional, secara efisien mengelola kerjasama untuk pembangunan dan mempromosikan hidup berdampingan secara damai, pembangunan global yang berkelanjutan dan internasional yang lebih adil. Selaras dengan misi Angkatan Bersenjata Republik Dominika, bahwa untuk memenuhi misi mereka, pada dasarnya akan mengembangkan suatu karakter pertahanan. Strategi pertahanan “Keamanan dan Perdamaian Nasional” yang dimiliki pada tahun 2010-2013 memiliki tujuan khusus untuk memastikan pertahanan kepentingan nasional di bidang keamanan nasional, dengan memperkuat sistem keamanan nasional melalui modernisasi organisasi dan operasi Angkatan Bersenjata untuk memastikan kesesuaian, profesionalisme, transparansi, loyalitas, dan penghormatan mereka terhadap kekuatan sipil dan warga negara. Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan berikut; 1) Bagaimana pengembangan karakter pertahanan Angkatan Bersenjata Republik Dominika dalam menjalankan misinya? dan 2) Bagaimana strategi Angkatan Bersenjata Republik Dominika dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap stabilitas keamanan negara?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penting kiranya untuk menganalisis terkait pengembangan karakter pertahanan Angkatan Bersenjata Republik Dominika serta strategi

Angkatan Bersenjata Republik Dominika dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap stabilitas keamanan negara. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan studi pustaka. Pembahasan terkait hal ini memiliki nilai guna untuk memperluas pengetahuan serta pemahaman terkait postur pertahanan suatu Negara. Adapun maksudnya adalah untuk mengetahui pembangunan postur pertahanan angkatan bersenjata Republik Dominika. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui pengembangan karakter pertahanan Angkatan Bersenjata Republik Dominika serta strateginya dalam menghadapi berbagai ancaman. Adapun ruang lingkup tulisan ini terbatas pada sistem pertahanan Republik Dominika.

Pembahasan

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI6, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman adalah semua bentuk usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman terhadap integrasi nasional dibedakan menjadi dua yaitu ancaman militer serta ancaman nonmiliter. Guna menghadapi ancaman, dibutuhkan strategi penangkalan. Upaya penangkalan semestinya tidak bersifat pasif, tetapi dikembangkan dalam suatu strategi penangkalan yang mempunyai sifat dinamis, melewati kesiapsiagaan daya pertahanan dalam menghadapi kondisi terburuk, yakni menghadapi ancaman aktual dalam wujud perang atau wujud ancaman militer lainnya. Dalam konteks “menghadapi ancaman militer”, daya pertahanan yang dimiliki didayagunakan sebagai suatu langkah untuk mengatasi situasi negara yang terancam oleh suatu agresi militer dari negara lain, atau sedang diperhadapkan dengan jenis ancaman yang hendak mengganggu kepentingan nasional suatu negara.

Sektor pertahanan di Republik Dominika telah mengalami perubahan signifikan dalam dekade terakhir dengan diberlakukannya berbagai undang-undang, keputusan dan peraturan yang telah memberikan kerangka hukum untuk operasinya. Sebagai hasil dari Konstitusi 2010, Cabang Eksekutif mengajukan RUU ke Kongres yang akan memperkenalkan perubahan tambahan di Angkatan Bersenjata Dominika.

Tujuannya adalah untuk menata ulang susunan dan operasinya, sambil mempromosikan profesionalisasi anggotanya berdasarkan karir militer. Meskipun RUU ini menyajikan langkah-langkah besar ke depan, namun tetap menggunakan nama "Kementerian Angkatan Bersenjata" daripada menggunakan istilah "Kementerian Pertahanan". Angkatan Bersenjata Republik Dominika (Spanyol: Fuerzas Armadas de la República Dominicana) adalah gabungan militer nasional Republik Dominika.

Ini terdiri dari sekitar 44.000 personel aktif, sekitar 60 persen di antaranya digunakan terutama untuk operasi non-militer, termasuk penyedia keamanan untuk fasilitas non-militer milik pemerintah, keamanan tol, pekerja kehutanan dan perusahaan negara lainnya, dan keamanan pribadi untuk para menteri, anggota kongres, dll.8 Presiden adalah panglima tertinggi militer dan Kementerian Pertahanan (Spanyol: Ministerio de Defensa de la República Dominicana) adalah kepala badan pengelola angkatan bersenjata. Misi utamanya adalah untuk mempertahankan bangsa dan melindungi keutuhan wilayah negara. Ukuran militer Republik Dominika adalah yang kedua setelah Kuba di Karibia.

Angkatan Darat, dua kali lebih besar dari layanan lain dikombinasikan dengan sekitar 56.789 personel tugas aktif, terdiri dari enam brigade infanteri, satu skuadron kavaleri udara, dan brigade dukungan layanan tempur. Angkatan Udara mengoperasikan dua pangkalan utama, satu di wilayah selatan dekat Santo Domingo dan satu di wilayah utara negara itu, angkatan udara mengoperasikan sekitar 40 pesawat termasuk helikopter.

Angkatan Laut memelihara tiga kapal tua yang disumbangkan dari Amerika Serikat, sekitar 25 kapal patroli dan kapal pencegat serta dua helikopter. Secara singkat, sejarah pembentukan angkatan bersenjata Republik Dominika berawal dari peristiwa yang menyebabkan intervensi militer Amerika Serikat pada tahun 1916, yang mengakibatkan hilangnya semua sisa struktur militer di Republik Dominika, kemudian menetapkan pasukan intervensi pemerintah militer yang dipimpin oleh Kapten William Knapp, yang membuat pasukan polisi sementara yang disebut "*Constabulary*" setara dengan "pasukan polisi bersenjata sebagai unit militer", memiliki tugas menjaga ketertiban internal dan menegakkan ketentuan pelaksanaan dari pemerintah AS. 9 Badan ini, murni menghilangkan fungsi polisi pada tahun 1917, mengarah pada pembentukan Pengawal Nasional. Sebagai hasil dari peristiwa bersejarah di masa lalu, negara ini mewarisi hierarki dan organisasi yang mirip dengan struktur Korps Marinir AS, yang berfungsi sebagai platform transformasi yang kemudian memunculkan angkatan bersenjata yang kita kenal sekarang, terdiri dari tiga komponen, satu terestrial, satu angkatan laut dan satu udara. Komponen darat ini, sekarang disebut Tentara Nasional, diwarisi oleh kedua struktur organisasi Garda Nasional yang diorganisir oleh pasukan pendudukan AS, yang beroperasi dari 7 April 1917 hingga Juni 1921, ketika menjadi Polisi Nasional Dominika berdasarkan Perintah Eksekutif No. 631 dari Laksamana Muda Thomas Snowden, yang pada waktu itu adalah gubernur militer Santo Domingo. Setelah pendudukan militer AS pada tahun 1924, Horacio Vásquez memenangkan pemilihan presiden pada tahun yang sama. Di antara keputusan pertamanya, keputusan pergantian Polisi Nasional Dominika di Brigade Nasional, situasi terus berlanjut hingga 17 Mei 1928 hingga kemudian ketika pergantian baru mengubah nama Angkatan Darat dengan UU No. 928, tetapi pada dasarnya mewarisi struktur Polisi. Karena karakteristik dan misinya, yakni struktur organisasi yang menuntut kehadiran di seluruh negeri, yang

diwujudkan dengan pembuatan pos dan detasemen di berbagai bagian negara dan pembentukan unit perusahaan di beberapa provinsi, banyak di antaranya masih mempertahankan fungsi Angkatan Darat hingga saat ini. Begitu besar pengaruh yang dimiliki Pengawal Nasional dalam masyarakat Dominika, terutama pada penduduk pedesaan, yang bahkan saat ini banyak orang Dominika yang sering menyebut Angkatan Bersenjata dengan sebutan unik yakni sebagai "Pengawal". Sementara itu, Angkatan Laut sejak awal berdirinya secara bertahap mengembangkan transformasi sehingga mampu menghadapi kemungkinan invasi laut, menjadi komponen utama yang bertanggung jawab untuk menegakkan ketentuan tentang navigasi, perdagangan dan penangkapan ikan, serta perjanjian internasional. Sementara itu, Angkatan Udara Dominika, muncul sebagai komponen independen pada tahun 1948, di bawah kepemimpinan Generalissimo Rafael L. Trujillo Molina, dengan karakteristik inovasi dan modernisme, yang memberikan mobilitas, keserbagunaan, dan kedalaman pada Angkatan Bersenjata sebagai pelengkap kapasitas militer untuk memproyeksikan kekuatan militer di lingkungan Karibia. Situasi komponen udara ini telah berubah secara signifikan setelah mencapai klimaksnya pada tahun 50-an, dimana ketika itu adalah salah satu angkatan udara terbaik yang dilengkapi di wilayah tersebut, yang disebabkan oleh pedoman strategis kediktatoran militer yang berumur panjang.

Penyelenggaraan pertahanan negara pada hakekatnya adalah fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi dan kekuatan pertahanan negara untuk menangkal dan menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa secara sistemik. 10 Dalam kaitan ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan di bidang pertahanan negara yang merupakan instrumen penuntun dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pada tataran politik, kebijakan di bidang pertahanan negara diatur dalam dokumen Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang

memberikan petunjuk garis besar bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan fungsi pertahanan negara. Strategi Pertahanan Negara yang aplikatif dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis nasional, regional maupun global. Selain itu, juga harus dapat mencerminkan konsep geopolitik yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Strategi pertahanan Republik Dominika memiliki tujuan bersifat konstitusional dengan dua prioritas tinggi, yakni: 1.) Memerangi tindak pidana transnasional yang membahayakan kepentingan Republik dan penduduknya. Serta 2) Mengatur dan memelihara sistem yang efisien yang mencegah atau mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam dan teknologi. 11 Dalam mencapai tujuannya, mereka menyusun Pedoman Pengembangan Kebijakan Pertahanan, baik dalam lingkup nasional, maupun lingkup internasional. Lingkup nasional meliputi; Definisi dan identifikasi tujuan nasional; Berlakunya undang-undang Keamanan dan Pertahanan Nasional;

Amandemen Hukum Organik Angkatan Bersenjata, untuk mendefinisikan kembali misi, tanggung jawab dan organisasi lembaga mereka dan merestrukturisasi kekuasaan Staf Umum dalam kerangka operasi bersama; Publikasi Buku Putih Pertahanan dan Manual Doktrin Bersama Angkatan Bersenjata; Pembentukan Sistem Intelijen Nasional; Penguatan Komite Tetap Reformasi dan Modernisasi Angkatan Bersenjata; Definisi model Angkatan Bersenjata dan promosi transformasinya; Pengembangan model kelembagaan dan profesionalisasi baru; Peningkatan peralatan berdasarkan kemungkinan anggaran; serta Promosi penelitian, pengembangan dan inovasi untuk dijaga tingkat teknologi yang memadai. Sedangkan dalam lingkup internasional bertujuan untuk; mempromosikan dan mendukung kebijakan keamanan dan pertahanan yang dikeluarkan oleh organisasi regional dan dunia yang ditaati; memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama yang erat dengan negara-negara tetangga, terutama dengan Republik Haiti dan negara Karibia dan Amerika Tengah.

berkontribusi pada peningkatan keamanan dan kontrol di Karibia; memperkuat hubungan kerja sama tradisional dengan Amerika Serikat; memperkuat hubungan keamanan dan pertahanan serta kerja sama militer dengan negara-negara Amerika Selatan dan seluruh Amerika Utara; serta untuk meningkatkan diplomasi pertahanan. Panduan Umum untuk Aksi-Konsolidasi peran Angkatan Bersenjata dan badan keamanan publik sebagai elemen penting untuk menjaga dan memelihara perdamaian dan stabilitas di Republik Dominika diantaranya sebagai berikut; Reformasi dan modernisasi yang sedang berlangsung dari Angkatan Bersenjata dan badan keamanan publik; Dukungan yang tegas dan teguh dari multilateral dengan sistem yang efisien sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik; Keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam masalah utama kebijakan pertahanan dan keamanan, serta partisipasi Angkatan Bersenjata dalam rencana pembangunan nasional. Adapun Tujuan Berbasis Sektor yakni; untuk melaksanakan bersama antar lembaga, dukungan pembangunan dan operasi sipil-militer yang merupakan bagian dari pengawasan tetap, mekanisme pengamanan dan pengendalian di sepanjang perbatasan dan di titik-titik pintu masuk formal, baik di darat, pesisir, perbatasan laut, dan wilayah udara nasional; meningkatkan jumlah tindakan pendukung perang melawan perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir dan ancaman lain yang muncul yang dinyatakan sebagai prioritas tinggi; serta untuk mempromosikan desain dan pengembangan operasi perlindungan sipil. Misi Angkatan Bersenjata Republik Dominika adalah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik, keutuhan ruang geografis, Konstitusi dan kelembagaan Republik.

Angkatan Bersenjata akan campur tangan, setiap kali Eksekutif memerintahkan, dalam program-program yang ditujukan untuk mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi negara, mengurangi bencana dan situasi bencana publik, serta membantu Polisi

dalam memelihara atau memulihkan ketertiban umum dalam kasus-kasus pengecualian. Saat ini, Republik Dominika tidak menyumbangkan pasukan untuk misi PBB. Namun, setelah gempa bumi yang melanda Haiti pada tahun 2010 menghancurkan sebagian infrastruktur yang digunakan oleh MINUSTAH, sebagian dari Markas Besar misi (HQ) dipindahkan ke Santo Domingo. Oleh karena itu, operasi administratif telah dilakukan di lokasi tersebut untuk memfasilitasi respons yang cepat terhadap bencana alam, seperti angin topan, badai tropis, dan gempa bumi.

Berkaca dari negara kita, Indonesia, sejak tahun 2007, Kementerian Pertahanan telah menetapkan dokumen Postur Pertahanan Negara yang berisi tahapan pembangunan postur pertahanan negara mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2029. Dalam dokumen Postur Pertahanan Negara tersebut, faktor konstelasi geografi memang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan Postur Pertahanan.

Dalam dokumen postur pertahanan negara dijelaskan bahwa Kementerian Pertahanan menyiapkan postur pertahanan negara yang disusun dalam keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara.

Postur pertahanan negara dikembangkan dari doktrin dan strategi pertahanan negara dengan memperhatikan faktor geopolitik dan geostrategik, serta karakteristik Negara. Postur pertahanan militer dikembangkan dalam pola Tri-Matra Terpadu antara kekuatan matra darat, kekuatan matra laut, dan kekuatan matra udara.

Kekuatan pertahanan militer mencakup aspek organisasi, peralatan utama sistem senjata dan pendukungnya, serta aspek pangkalan. Kekuatan pertahanan yang telah terbentuk secara profesional, kemudian dikembangkan dalam suatu gelar kekuatan pertahanan militer yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan strategi pertahanan negara guna menghadapi ancaman nyata dan menangkal ancaman potensial.

Sedangkan kemampuan pertahanan militer mencakup lima kemampuan utama, yaitu kemampuan intelijen, kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan, kemampuan pemberdayaan wilayah dan kemampuan dukungan. Kemampuan pertahanan militer sebuah negara dari sisi sumber daya manusia tidak semata dilihat dari jumlah personel tentaranya.

Sumber daya manusia sebagai kekuatan militer mencakup juga total populasi, ketersediaan angkatan kerja, ketersediaan angkatan kerja yang siap untuk diperbantukan sewaktu-waktu, jumlah penduduk pada suatu tahun yang mencapai umur menjadi tentara, jumlah personel militer, jumlah militer aktif, hingga jumlah personel cadangan. Jumlah personel militer menjadi pendukung utama kekuatan militer di suatu negara, terutama personel aktif yang siap langsung digunakan untuk pertempuran.

Sedangkan kekuatan militer cadangan dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Di sisi lain, jumlah penduduk di suatu negara, terutama angkatan kerja yang memenuhi syarat untuk keperluan militer, memberikan keuntungan dalam situasi perang untuk membentuk pasukan perang terutama dalam perang jangka panjang.

Kekuatan militer sebuah negara, berdasarkan pemeringkatan global fire power dapat dilihat dari delapan unsur pembentuknya, yakni sumber daya manusia, kekuatan udara, kekuatan darat, kekuatan laut, sumber daya alam, logistik, keuangan, dan geografi. 13 Dilansir dari data global fire power tahun 2021, kekuatan militer Republik Dominika menempati urutan 122 dari 138 negara.

Dibandingkan dengan Indonesia yang menempati urutan ke 16, negara dengan kekuatan militer tertinggi se ASEAN, maka kekuatan militer Republik Dominika dapat terbilang lemah. Kekuatan militer suatu negara dari sisi keuangan dapat dilihat dari belanja militer, utang luar negeri, cadangan devisa dan emas, serta keseimbangan daya beli. Selama satu dekade terakhir, jumlah anggaran belanja Republik Dominika untuk urusan pertahanan terus meningkat.

Melihat data yang dipublikasikan SIPRI, pada tahun 2012, anggaran belanja militer Republik Dominika menempati urutan ke 96 dari 150 dengan anggaran sebesar 322.000.000 \$ (0,7% dari GDP). Jika ditarik ke belakang, dari tahun ke tahun, sejak tahun 1988, anggaran belanja militer Republik Dominika terus meningkat. Pada tahun 1988, anggaran belanja militer Republik Dominika sebesar 289 peso. Kurang lebih 10 tahun berselang, anggaran belanja militer Republik Dominika meningkat menjadi 2.428 peso pada tahun 1999. Sepuluh tahun berikutnya, pada tahun 2009, anggaran belanja militer Republik Dominika tercatat sebesar 11.587 peso. Meskipun begitu, tren belanja militer Republik Dominika dibandingkan dengan GDP sempat mengalami penurunan pada tahun 2008 hingga 2011 (bergerak mulai 0,7% dari GDP hingga 0,59% dari GDP) meskipun tidak terlalu signifikan jika dilihat secara mendetail berdasarkan jumlah anggarannya.

Alat utama sistem senjata (alutsista) merupakan salah satu pembentuk kekuatan militer negara, baik alutsista kekuatan militer darat, udara, maupun laut. Kekuatan militer suatu negara dipengaruhi oleh kekuatan pertahanan udaranya, terutama pesawat, baik yang dimiliki oleh angkatan udara, laut, maupun darat. Kekuatan udara tersebut terdiri atas pesawat tempur, pesawat untuk serangan darat, pesawat angkut, pesawat latihan, pesawat intai dan misi khusus, helikopter, hingga helikopter tempur. Dalam hal ini, Republik Dominika memiliki 49 unit kekuatan udara yang terdiri dari 8 pesawat khusus untuk menyerang, 10 pesawat angkut, 4 pesawat latihan, 1 pesawat dengan misi khusus, serta 28 helikopter. Kekuatan militer darat suatu negara dapat dilihat dari alutsista darat yang dimiliki, yakni tank, kendaraan tempur lapis baja, artileri, serta peluncur roket. Terkait alutsista darat, Republik Dominika memiliki 6 tank, 20 kendaraan lapis baja, serta 20 artileri derek. Kekuatan laut pendukung kekuatan militer suatu negara terdiri atas beberapa unsur, antara lain kapal pengangkut pesawat, kapal perusak, kapal fregat, kapal korvet, kapal selam, kapal patroli, serta kapal penyapu ranjau.

Pada kekuatan laut, Republik Dominika hanya memiliki 46 total aset pendukung kekuatan laut yang terdiri dari 33 kapal laut serta 13 kapal patrol.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara substantif, berbagai kebijakan terkait strategi pertahanan negara Republik Dominika di atas masih bersifat kerangka deskriptif yang memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat benar-benar dijadikan pedoman dalam pengembangan kekuatan pertahanan untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang sesuai dengan konstelasi geografisnya sehingga memiliki daya tangkal yang cukup baik.

Selain itu, terbatasnya alutsista merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kekuatan angkatan bersenjata Republik Dominika. Pengadaan Alutsista dalam rangka pengembangan kekuatan pertahanan militer seringkali terkendala oleh berbagai masalah. Di negara-negara berkembang, masalah klasik yang mengemuka adalah terbatasnya jumlah anggaran pemerintah, sedangkan di negara-negara maju masalahnya adalah rendahnya dukungan publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah untuk belanja militer. Oleh karena itu, setiap negara selalu berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam proses akuisisi Alutsista. Belajar dari pengalaman negara lain, salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan membuat perencanaan kebutuhan Alutsista secara terintegrasi antar matra. Melalui perencanaan kebutuhan secara terintegrasi, maka dapat dicegah timbulnya redundansi dalam pengadaan Alutsista lintas matra. Selain itu, keuntungan lain yang diperoleh dari perencanaan secara terintegrasi adalah meningkatnya interkoneksi dan interoperabilitas pada saat dioperasikan oleh masing-masing matra di daerah penugasan.

Dihadapkan dengan kondisi gelar kekuatan angkatan bersenjata Republik Dominika yang ada saat ini, maka penataan gelar kekuatan harus merefleksikan kesesuaian antara karakteristik matra dengan kondisi geografi daerah operasi.

Fungsi proyeksi kekuatan adalah kegiatan penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi suatu krisis, memberikan efek tangkal dan meningkatkan stabilitas kawasan.

Istilah ini digunakan oleh banyak negara dengan pengertian yang berbeda-beda, sesuai karakteristik geografi negara yang bersangkutan. Secara spesifik, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan proyeksi kekuatan sebagai penggunaan kekuatan di lingkungan tertentu, termasuk penggunaan kekuatan operasi militer ofensif untuk menghancurkan kekuatan militer lawan atau mencegah militer lawan yang bermaksud mendekati pasukan sendiri. Meskipun pada praktiknya, proyeksi kekuatan mengundang berbagai polemik, namun hal ini justru harus dilihat sebagai jawaban dari keterbatasan kekuatan militer yang dimiliki. Dalam teori operasi, kita mengenal istilah jangkauan operasi (*operational reach*). Jangkauan operasi berkaitan dengan geografi maupun pembagian elemen peperangan yang berupa penempatan kekuatan utama, cadangan, pangkalan ajuk beserta dukungan logistiknya. Jangkauan operasi dapat dicapai dengan peningkatan jarak capai sistem senjata, pengisian bahan bakar di udara, peningkatan daya angkut sistem angkutan yang mungkin dan pengefektifan jalur komunikasi.

Penutup

Postur dan karakter pertahanan Republik Dominika tidak terlepas dari kekuatan militer serta kemampuan Angkatan Bersenjata. Kekuatan militer dapat ditinjau dari berbagai faktor, yakni sumber daya manusia, kekuatan udara, kekuatan darat, kekuatan laut, sumber daya alam, logistik, keuangan, dan geografi. Beberapa alasan yang menyebabkan Republik Dominika digolongkan ke dalam negara dengan militer yang lemah diantaranya dikarenakan; strategi pertahanan militer Republik Dominika yang secara substantif masih bersifat deskriptif sehingga kurang mendetail dihadapkan dengan konstelasi geografinya, terbatasnya pengadaan alutsista karena minimnya anggaran, serta kemampuan Angkatan Bersenjata yang terbatas.

Kompil Arief Prasetya S.I.K., M.Med.Kom, Abituren Akpol 2005 dan lulusan Dikreg 60 Seskoad, Saat ini menjabat Pamen Polda Kalsel



KEPEMIMPINAN STRATEGIS SADDAM HUSSEIN DALAM SEJARAH PEPERANGAN DI IRAQ

Letkol Arh Dr. Heri Wijanarko, S.Sos., M.Sc



Pendahuluan

Secara geopolitik, Timur Tengah merupakan kawasan dengan kehidupan politik yang sangat dinamis. Hal ini terkait erat dengan besarnya sumber daya kawasan khususnya kandungan minyak bumi sebagai sumber energi dunia. Kondisi tersebut juga menjadikan kawasan ini memiliki nilai perdagangan yang tinggi sebagai jalur sutra yang menghubungkan negara barat dan timur. Atas dasar hal tersebut nilai geografis kawasan ini menjadi strategis.

Namun dibalik nilai geopolitik dan geostrategis yang strategis, kawasan ini terkenal sebagai kawasan rawan konflik, mulai dari konflik etnis, konflik ekonomi hingga peperangan antar negara. Iraq merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah konflik panjang di kawasan Timur Tengah. Sejarah Iraq tidak lepas dari peran Saddam Hussein sebagai tokoh terkenal dalam sejarah peperangan di Iraq yang melibatkan negara-negara besar di dunia. Ancaman pemerintahan Saddam husein tidak hanya di kawasan Teluk bahkan Amerika juga merasa terancam akan kepemimpinan Saddam Husein. Perang Iraq merupakan salah satu konflik yang muncul adanya berbagai kepentingan yang mengiringinya baik kepentingan politik, keamanan dan ekonomi.

Perang kerap dijadikan alasan sebagai alat untuk pengembangan sosial, politik, dan ekonomi. Clausewitz menilai bahwa perang dan strategi sebenarnya adalah suatu instrument dan cara untuk mencapai kepentingan politik. *"The war is not merely a political act, but also a real political instrument, a continuation of political commerce"*. Semakin besar keinginan-keinginan politik, maka akan semakin besar pula intensitas perang yang akan terjadi dan begitu pula sebaliknya. Kekayaan sumber daya alam tidak selamanya membuahkan kemakmuran dan kesejahteraan namun dapat juga terjadi yang sebaliknya yaitu mendatangkan berbagai konflik yang menghancurkan sendi kehidupan masyarakat atas impian kemakmuran, kesejahteraan, keamanan dan kedamaian.

Kepemimpinan Sadam Husein menarik untuk dianalisis sebagai tokoh Iraq dengan dominasi yang begitu kuat dalam pemerintahan serta dukungan pasukan yang sangat loyal dengan semangat tempur yang militan. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ; 1) Bagaimana latar belakang terjadinya peperangan di Iraq? dan 2) Bagaimana kepemimpinan strategis Saddam Hussein dalam memimpin Iraq?

Berdasarkan permasalahan diatas maka penting kiranya untuk menganalisis sejarah peperangan di Iraq serta menganalisis kepemimpinan strategis Saddam Husein dalam peperangan Iraq. Metode analisis yang digunakan adalah diskriptif analisis dengan pendekatan studi pustaka. Pembahasan terkait peran kepemimpinan Saddam Hussein dalam memimpin pasukan perang Iraq memiliki nilai guna yaitu untuk memperluas pengetahuan serta pemahaman terkait kepemimpinan strategis. Adapun maksud dari tulisan ini adalah untuk mengetahui sejarah peperangan di Iraq serta bagaimana kepemimpinan strategis Saddam Hussein dalam memimpin pasukan perang Iraq. Sedangkan tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan strategis Saddam Hussein dalam memimpin Iraq, dengan ruang lingkup dibatasi pada sejarah peperangan di Iraq masa pemerintahan Saddam Hussein.

Pembahasan

Perang terkadang menjadi sebuah pilihan yang harus diambil, seperti halnya dalam peperangan Iraq. Sejarah panjang peperangan Iraq dimulai pada Perang Teluk I (1980-1988) sebagai peperangan Iran-Iraq. Pada Agustus 1980 Saddam Husein melakukan kunjungan diplomatik ke Kuwait untuk membangun "Arab Entente" sebagai dukungan Arab untuk mendukung langkah militer Iraq terhadap Iran. Dalam perang ini Iraq didukung oleh mayoritas negara Arab seperti Saudi Arabia, Yordania, Kuwait, Mesir ditambah Amerika Serikat sedangkan Iran hanya didukung oleh Libya dan Suriah. Bermula dari peperangan ini, Sadam Husein dikenal sebagai tokoh sentral di Iraq. Pasca Perang Teluk I, kondisi kawasan Teluk Persia relatif belum pulih namun kembali bergejolak dengan pecahnya Perang Teluk II (1990-1991). Perang ini berawal dari upaya invasi dan aneksasi Iraq terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Konflik berkembang menjadi pertempuran Iraq - Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret 2003.

Faktor-faktor yang menjadi latar belakang pecahnya Perang Teluk I (Iran-Iraq) disebabkan oleh: 1) Secara politik, sikap Saddam Hussein

sebagai pemimpin Iraq yang mencabut secara sepihak perjanjian Aljier 1975 yang dibuat antara Shah Reza Pahlevi dan Saddam Husein, Perjanjian ini mengatur demarkasi antara Iran dan Iraq di wilayah Shatt al-Arab. Saddam Hussein merasa terpaksa melakukan perjanjian dengan Shah Reza Pahlevi karena memiliki kekuatan militer yang tangguh pada saat itu, 2) secara ekonomi, Saddam Hussein ingin menguasai ladang minyak Iran untuk memperkuat perekonomian Iraq, dan 3) secara ideologi, Saddam Husein merasa terancam dengan penganut syi'ah sebagai mayoritas masyarakat Iraq sedangkan Saddam merupakan penganut Sunni. Konflik Syi'ah-Sunni merupakan sejarah kelam dalam pemerintahan di Iraq.

Latar belakang terjadinya Perang Teluk II antara lain: 1) Besarnya utang luar negeri Iraq kepada negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah selama perang Teluk I, 2) Kekecewaan Saddam Husein terhadap negara-negara Timur Tengah yang dulu pernah beraliansi dengan Iraq saat Perang Teluk I, khususnya Uni Emirat Arab dan Kuwait; dan 3) Ambisi Saddam Husein untuk menjadi pemimpin dunia Arab. Anjloknya harga minyak dunia karena adanya pelanggaran kebijakan OPEC yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab. Hal tersebut memperberat kondisi ekonomi Iraq sebagai negara yang bergantung pada penghasilan ekspor minyak.

Efek dari invasi Iraq ke Kuwait menimbulkan tanggapan keras dari dunia internasional hingga terlibatnya Amerika dalam perang Iraq. Tujuan Perang Teluk adalah mengusir pasukan pendudukan Iraq dari Kuwait. Namun Amerika memiliki agenda tersembunyi dalam melakukan invansi ke Iraq yang dilancarkan tanpa mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Amerika melakukan invasi dengan alasan bahwa Iraq melakukan pelanggaran Piagam Nuremberg terkait adanya senjata pemusnah massal MWD (Weapon of Mass Destruction) di Iraq. Namun diketahui bahwa perang Iraq merupakan wujud ambisi ekonomi dan politik Amerika di kawasan Timur Tengah.

Perang Iran-Iraq menjadi konflik multifaced, karena banyaknya faktor yang menjadi latar belakang konflik dan perkembangannya yaitu 1) adanya propaganda ideologi kelompok Sunny-Syi'ah, 2) perbedaan etnis Arab-Parsi dalam perselisihan politik, dan 3) adanya kepentingan ekonomi nasional sebagai wujud ambisi Saddam Husein untuk menguasai minyak Iran. Propaganda kelompok Sunny-Syi'ah merupakan faktor sejarah konflik di Iraq yang sudah berlangsung lama.

Meskipun mayoritas masyarakat Iraq menganut Syi'ah namun dipimpin oleh kelompok Sunni. Atas kondisi tersebut Saddam merasa terganggu atas gerakan politik dari kelompok Syi'ah sehingga Saddam menekan Gerakan politik kelompok Syi'ah.

Efek dari pertempuran panjang di Iraq maka menjadi beban dalam perekonomian negara atas tingginya utang negara. Untuk meningkatkan ekonomi negara maka Saddam berembisi merebut ladang minyak Iran.

Hal ini juga dipengaruhi buruknya hubungan diplomatik Iraq-Iran karena Iran menolak permintaan Iraq untuk menghapuskan utang Iraq kepada Iran. Hal ini dipropagandakan secara terbalik kepada masyarakat Iraq dengan isi bahwa Iran tidak lagi mau mendukung Iraq.

Berbagai konflik bersejarah di Timur Tengah tidak terlepas dari keberadaan Amerika Serikat, seperti keterlibatan Amerika Serikat pada Perang Teluk. Amerika secara terang-terangan berada dipihak Iraq dengan menyediakan persenjataan teknologi terbaru serta gambar satelit posisi dan pergerakan pasukan Iran.

Namun pada perkembangannya Amerika berubah pandangan karena merasa terancam oleh Iraq hingga khususnya Saddam Hussein dan pada akhirnya Amerika menginvasi Iraq untuk menumbangkan pemerintahan Saddam Hussein.

Berkaca dari sejarah terjadinya perang teluk maka dapat ditarik benang merah bahwa terjadinya perang berawal dari konflik etnis yang tidak tuntas dalam penyelesaiannya hingga akhirnya menjadi peperangan terbuka dan meluas.

Dengan kekayaan alam atas sumber daya minyak bumi yang dikelola secara baik dengan mengakomodir segala aspirasi komponen masyarakat Iraq seharusnya dapat membawa Iraq menjadi negara makmur seperti negara-negara arab lainnya. Namun realitanya terjadi penyimpangan bahwa kekayaan alam menimbulkan konflik dan kesengsaraan masyarakat Iraq.

Menurut beberapa teori mengenai berbagai penyebab terjadinya konflik, antara lain ; 1) Teori kebutuhan manusia, yaitu teori yang berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering menjadi inti terjadinya konflik; 2) Teori identitas, yaitu teori yang berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan; dan 3) Teori transformasi konflik, yaitu teori yang berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Sedangkan menurut Karl Von Clausewitz bahwa perang bukanlah semata-mata merupakan suatu tindakan politik melainkan merupakan suatu instrumen politik untuk pencapaian tujuan-tujuan tertentu".⁶ Adanya keikutsertaan negara-negara besar (Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Rusia) dalam perang di Iraq maka sesuai dengan pendapat Lenin Dalam bukunya, Imperialism: The Highest Stage of Capitalism bahwa penyebab utama sebuah peperangan karena adanya persaingan antar negara kapitalis dalam memperebutkan wilayah.

Kendala serta kelemahan dalam upaya penyelesaian peperangan di Iraq yaitu;

1) Kendala dalam penyelesaian peperangan di Iraq adalah adanya persaingan dan rasa saling tidak percaya dari etnis Kurdi Syi'ah-Sunni yang terjadi sejak lama dan terus berlanjut; dan 2) Kelemahan dalam penyelesaiannya adalah konflik tersebut tidak diselesaikan dengan tuntas.

Situasi dan kondisi politik pemerintahan Iraq tidak mendukung sebagai efek kepemimpinan diktator Saddam Hussein. Berdasarkan kendala dan kelemahan yang ada maka dapat dilakukan analisis SWOT secara sederhana guna menentukan strategi penyelesaian masalah yaitu melalui strategi SO dengan memanfaatkan kekuasaan dan kekuatan pemimpin Iraq (Saddam Hussein) yang kuat dengan adanya dukungan pasukan yang loyal (strength) untuk membangun kebersamaan antar etnis dan kelompok yaitu dengan (opportunity); 1) memberikan ruang yang setara dan sejajar dengan pengawasan dari negara, dan 2) membuka ruang politik yang seimbang antar kelompok guna menciptakan pemerintahan yang kondusif.

Berdasarkan teori diatas maka pecahnya peperangan di Iraq sesuai dengan teori kebutuhan manusia, identitas, dan transformasi politik dapat dilakukan analisis SWOT secara sederhana guna menemukan cara penyelesaian konflik. Sebagai upaya mencegah konflik maka dapat dilakukan ; 1) melalui strategi SO ; sesuai teori kebutuhan manusia maka pemerintah Iraq (strength) harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakatnya terkait kebutuhan sosial, ekonomi, keamanan, partisipasi dan lainnya (opportunity) sehingga membawa kedamaian dalam kehidupan masyarakat Iraq. Hal ini memungkinkan karena pemerintah memegang kendali penuh; 2) melalui strategi WO ; berdasarkan teori identitas, pemerintah harus berlaku secara adil (weakness) dan sederajat kepada seluruh masyarakat Iraq (opportunity); 3) melalui strategi WT ; berdasar teori transformasi, pemerintah Iraq harus mengakomodir aspirasi seluruh masyarakat tanpa adanya keberpihak kepada suku, etnis dan golongan tertentu (weakness) melalui mekanisme politik negara (threats); dan 4) melalui strategi ST ; guna menghindari campur tangan negara luar (threats) maka semaksimal mungkin segala persoalan intern Iraq harus dapat diselesaikan oleh pemerintah Iraq sendiri (strength).

Sejarah peperangan Iraq tidak lepas dari peran Saddam Hussein sebagai tokoh fenomenal di Iraq bahkan dunia.

Saddam merintis kekuatan dan kekuasaan dari bawah melalui Partai Ba'ath sebagai kendaraan politiknya. Kuatnya cita-cita Pan-Arabisme dengan cabang di beberapa negara Arab, termasuk Iraq. Nama Saddam baru terkenal tahun 1959 saat terlibat kasus usaha pembunuhan Perdana Menteri Iraq (Abdul Karim Kasim).

Pada tahun 1968 Partai Ba'ath digulingkan pemerintah Iraq dan Saddam dijabarkan ke penjara. Saddam bersama sepupunya, Hasan al-Bakr melakukan kudeta terhadap presiden Iraq (Abdul Rahman Arif) dan akhirnya Hasan al-Bakr menjadi presiden Iraq sedangkan Saddam diangkat sebagai wakil presiden sekaligus Kepala Dewan Komando Revolusioner Iraq. Kepemimpinan Saddam dikenal otoriter dan berkuasa melebihi seorang presiden. Saddam banyak melakukan aksi represif terhadap rakyat Iraq dan mulai membangun jaringan polisi rahasia serta menyingkirkan pihak-pihak yang tidak tunduk padanya. Saddam menggantikan posisi Hasan sebagai presiden dan mulai berkuasa penuh di Iraq pada 16 Juli 1979.

Rezim pemerintahan Saddam dikenal sangat keras. Kekuasaannya dilihat dari partai Ba'ath yang dipimpinnya mampu berkuasa sejak kudeta tahun 1958. Rezim ini terbiasa menggunakan teror dan kekerasan dalam politik dalam negeri. Kepemimpinan Saddam di Iraq langgeng hingga 24 tahun. Segala cara dilakukan Saddam untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk lewat cara-cara represif dengan menekan segala potensi yang ia nilai berseberangan, potensi yang datang dari masyarakat maupun yang bergulir di kalangan politikus. Pemerintah Irak di bawah Saddam juga melakukan pembantaian terhadap rakyat Kurdi di utara Irak dan rakyat Syiah di selatan Irak.

Berdasarkan data dan fakta diatas dapat diketahui model kepemimpinan Saddam yang otoriter dan represif dipengaruhi oleh beberapa hal; 1) Ambisi politik Saddam untuk menggantikan peran Mesir sebagai pemimpin dunia Arab yang menonjol di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasser; 2) Saddam berkeinginan memperluas kekuasaan Irak sampai Teluk Persia.

Pan Arabisme mendorong untuk mendominasi diantara kekuatan para tokoh lainnya; dan 3) Suasana persaingan kekuatan politik dalam negeri turut membentuk karakter kontroversial Saddam. Saddam Hussein merasa terancam adanya revolusioner Iran dari kelompok Syi'ah pimpinan Ayatollah Khomeini sehingga Saddam menyatakan perang terhadap Iran untuk menggulingkan Khomeini. Sebagai tokoh besar, Iraq dibawah kepemimpinan Saddam memiliki peluang besar untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian bagi penduduk Iraq. John Nixon Agen CIA yang menginterogasi Saddam dalam bukunya berjudul *Debriefing The President: Interrogation of Saddam Hussein* memberikan kesan terhadap Saddam sebagai orang yang kharismatik. Bahkan ia menuturkan sosok Saddam sangat kontras dengan apa yang disampaikan media-media di Amerika Serikat. Dengan kekuasaannya dapat mengelola potensi negara Iraq. Kekuatan negara menurut Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations* menyebutkan sembilan unsur kekuatan negara yaitu; 1) geografi; 2) sumber alami; 3) kemampuan industri; 4) military preparedness yaitu teknologi, kepemimpinan dan kualitas angkatan perang; 5) populasi yang terdiri dari persebaran dan kualitasnya; 6) karakter nasional; 7) moral nasional; 8) kualitas diplomasi; dan 9) kualitas pemerintahan. Kendala serta kelemahan dalam mendorong kebangkitan pemerintahan Iraq di bawah kepemimpinan Saddam Hussein antara lain ; 1) besarnya ambisi pribadi Saddam soal kemuliaan, kemenangan, dan kejayaan menginspirasi Saddam dengan gerakan nasionalis Arab atau Pan Arabisme yang mengusung kesatuan budaya dan politik negara-negara Arab menjadi pilar identitas bangsa dan ambisi internasional seperti diungkapkan Jerrold M. *Post dalam Leaders and Their Followers in a Dangerous World: The Psychology of Political Behavior* (2004); 2) Kondisi dalam negeri yang memaksa rakyat Iraq lebih menerima untuk tunduk dan patuh kepada Saddam Hussein dari pada harus dijajah oleh bangsa barat menjadi kelemahan politik dalam negeri.

Berdasarkan teori diatas maka guna mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian di Iraq dengan modal kepemimpinan Saddam Huseein dapat dilakukan analisis SWOT secara sederhana sebagai berikut; 1) Strategi SO ; dengan kekuasaan dan kekuatannya (strenght) dapat mendayagunakan loyalitas rakyat Iraq (opportunity) untuk membangun kesejahteraan Iraq;

2) Strategi ST ; kekuatan politik Iraq (strenght) dimanfaatkan untuk menjalin friendly diplomasi dengan negara arab lain (treaths) demi keuntungan bersama; 3) strategi WO ; melakukan pendekatan kepada negara-negara Arab anggota OPEC (opportunity) untuk memberikan solusi perekonomian Iraq yang merosot (weakness); 4) strategi WT ; menyatukan kekuatan politik dalam negeri (weakness) untuk membangun Iraq bersama-sama dengan seluruh rakyat Iraq (threaths).

Penutup

Sejarah panjang peperangan di Iraq tidak lepas dari Saddam Hussein sebagai tokoh berpengaruh di Iraq bahkan dunia. Iraq dengan potensi besar Sumber Daya Alam minyak bumi memiliki nilai politis kuat didunia namun pada akhirnya kekayaan tersebut hanya men-datangkan kesengsaraan bagi rakyat Iraq sebagai akibat peperangan panjang yang tiada henti. Hal ini juga dipicu adanya adanya ambisi Saddam sebagai pemimpin untuk memperluas kekuasaannya di Kawasan Arab serta adanya kekhawatiran Saddam atas Gerakan politik yang akan melengserkan kekuasaannya hingga harus melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Lesson learned dari sejarah panjang peperangan di Iraq serta model kepemimpinan Saddam Hussein sebagai tokoh penting di Iraq adalah; 1) Kekuatan nasional seperti yang diteorikan oleh Hans J Morgenthau dalam *Politics Among Nations* menjadi tidak berguna jika tidak dapat dikelola dan didayagunakan untuk kepentingan dan kemakmuran negara; dan 2) Kekuasaan absolut serta ambisi

pribadinya seorang pemimpin negara pada akhirnya hanya akan membawa kesengsaraan rakyat serta kehancuran negara.

Saddam Hussein sebagai tokoh sentral Iraq dapat dinilai sebagai komandan bagus karena mampu mengendalikan pasukan Iraq dengan loyalitas dan militansi pertempuran yang tinggi hingga titik darah penghabisan dalam mempertahankan negara. Namun secara pemimpin, Saddam dapat dinilai buruk karena menjalankan kepemimpinan secara otoriter (pemimpin tunggal) hingga kejatuhannya lebih karena ambisi pribadi yang tidak terkontrol.

Letkol Arh Dr. Heri Wijanarko.S.Sos.,M.Sc adalah abituren Akmil 1996 dan lulusan Dikreg LX Seskoad. Saat ini menjabat sebagai Wakainfolakta Dam XVII/Cen



SINERGI MILITER DAN SIPIL DALAM SISTEM PERTAHANAN DI NEGARA KUWAIT

Mayor Inf Edi Tri Heri Mulyanto

Pendahuluan

Upaya mempersiapkan pertahanan yang kuat, handal dan tangguh adalah hal yang sangat vital bagi suatu bangsa yang menginginkan perdamaian. Dengan adanya pertahanan yang kuat dan handal adalah suatu deterrent effect yang cukup ampuh guna memberikan peringatan kepada negara lain untuk berpikir ulang dan menahan diri guna melakukan penyerangan ataupun konfrontasi dengan negara tersebut. Demikian pula halnya dengan negara Kuwait, upaya mempersiapkan dan juga membangun sistem pertahanan yang kuat dan handal merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital dalam menjaga kedaulatan negara Kuwait sendiri dan perdamaian di kawasan Timur Tengah pada umumnya.

Kuwait adalah sebuah negara monarki konstitusional yang terletak di pesisir teluk Persia, semenanjung Arab Timur Tengah. Kuwait adalah sebuah negara yang kaya akan kandungan minyak bumi sehingga menghadapi rongrongan dari berbagai pihak yang menginginkan dan menguasainya. Maka dari itu diperlukan suatu sistem pertahanan yang handal dan kuat, salah satunya adalah dengan adanya kekuatan militer yang akan menjaga kedaulatan wilayah mereka, sehingga akan mencegah terjadinya invasi dari negara

lain, seperti halnya invasi Irak ke Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990.

Pasukan Militer Kuwait sendiri merupakan gabungan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kekuatan pertahanan, dan beberapa badan yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam mengaturnya adalah Kementerian Pertahanan Kuwait, Kementerian Dalam Negeri Kuwait, Garda Nasional Kuwait beserta Direktorat Pemadam Kebakaran Kuwait.¹ Dari seluruh angkatan militer Kuwait, dipimpin oleh seorang panglima dengan pangkat tertinggi yakni Emir Kuwait dimana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu serta didampingi oleh Putra Mahkota sebagai wakil komandan. Berdasarkan perkembangannya, Direktorat Pasukan Keamanan Umum atau *Directorate of Public Security Force* merupakan badan atau organisasi militer yang tersusun secara terstruktur yang fokus untuk mengatasi serta mengelola aspek-aspek seperti halnya keamanan dan militer bersama Angkatan Darat Kuwait.

Tugas mereka adalah berintegrasi dalam melindungi aspek pertahanan yang ada dalam negara seperti halnya tembok pertahanan yang telah dibangun dalam periode perang sebelum Perang Dunia I bahkan hingga Perang Dunia selesai. Di satu sisi, Direktorat Pasukan Keamanan

Publik juga berkonsolidasi bersama Angkatan Darat Kuwait serta Direktorat Kepolisian sebagai pasukan yang bersifat independen setelah pembentukan kabinet yang pertama dalam periode waktu tepat setelah kemerdekaan yakni pada 17 Juni 1962.² Bahkan pada tahun 1953, Angkatan Darat Kuwait akhirnya secara independen memisahkan diri dari Direktorat Pasukan Keamanan Umum, memberikan kejelasan dan pembentukan formasi kepada Kementerian Dalam Negeri Kuwait yang baru dibentuk yang di dalamnya termasuk Penjaga Pantai Kuwait, dan memiliki beberapa komandan militer dengan tanggung jawab sebagai asisten menteri.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing dari personel wajib untuk melapor kepada Menteri Dalam Negeri yang ditunjuk oleh protokol sebagai Wakil Perdana Menteri Negara Kuwait. Tentara Kuwait dibentuk pada tahun 1949 oleh Marsekal Lapangan Sheikh Abdullah Mubarak Al-Sabah pada saat kemitraannya dimasukkan sebagai bagian dari Direktorat Pasukan Keamanan Publik pada tahun 1938 sebelum pecah pada tahun 1953.

Peristiwa ini bersamaan dengan Sheikh Abdullah Mubarak Al-Sabah mengepalai Direktorat Pasukan Keamanan Publik yang termasuk Angkatan Darat Kuwait kemudian, dipimpin oleh wakil komandan Kolonel Mubarak Abdullah Al-Jaber Al-Sabah.⁵ Setelah memisahkan diri dari Direktorat Pasukan Keamanan Publik pada tahun 1953, Angkatan Darat Kuwait bertindak sebagai pimpinan komando secara *de facto* bagi seluruh angkatan bersenjata yang ada.

Beberapa permasalahan yang mengemuka terkait hubungan atau sinergi antara militer dan pemerintahan sipil di negara Kuwait antara lain Pertama, bagaimana sistem pertahanan yang dijalankan di negara di Kuwait Kedua, bagaimana bentuk kerjasama dan sinergi antara militer dan sipil di negara Kuwait, Ketiga bagaimana bentuk pelibatan militer dan sipil di negara Kuwait khususnya dalam menghadapi ancaman dari luar negeri, Keempat bagaimana tinjauan dari analisis SWOT tentang pelibatan militer dan sipil di negara Kuwait.

Dari uraian latar belakang persoalan diatas dapat diambil suatu rumusan permasalahan yaitu “Bagaimana sinergi militer dan sipil dalam sistem pertahanan di negara Kuwait?”. Adapun nilai guna dari penulisan esai ini adalah untuk memberikan gambaran tentang sinergi militer dan sipil dalam sistem pertahanan di negara Kuwait. Adapun metode penulisan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan metode studi kepustakaan yang berkaitan dengan sinergi militer dan sipil dalam sistem pertahanan di negara Kuwait.

PEMBAHASAN

Bagaimana sistem pertahanan yang dijalankan di negara Kuwait Angkatan Darat Kuwait dibentuk tahun 1949, kemudian pada tahun 1953 dibentuk Angkatan Udara Kuwait, selanjutnya 13 tahun setelah kelahiran Angkatan Darat, maka pada tahun 1963 dibentuklah Angkatan Bersenjata Kuwait dimana Kementrian Pertahanan Kuwait yang menjadi badan pengatur dari Angkatan Bersenjata Kuwait. Apabila kita membahas Angkatan Bersenjata Kuwait, maka termasuk didalamnya adalah Angkatan Darat Kuwait, Brigade Komando ke-25 Kuwait, Otoritas Polisi Militer Kuwait, Otoritas Pengawal Emir Kuwait, Angkatan Udara Kuwait, Angkatan Laut Kuwait, Direktorat Dinas Kebakaran Militer Kuwait, dan lainnya.

Untuk setiap angkatan bersenjata, sesuai dengan mandat dan arahan dari pimpinan atau komandan tempurnya masing-masing, harus melapor kepada Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Kuwait, yang kemudian melapor kepada Menteri Pertahanan yang ditunjuk oleh protokol sebagai Wakil Perdana Menteri Kuwait. Terlepas dari itu semua, Pengawal Nasional Kuwait, atau The Kuwait National Guard, adalah lembaga atau organisasi tempur khusus secara independen dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri untuk bertindak dan menjalankan tugas serta kewajiban di bawah bimbingan, kebijaksanaan, dan disposisi dari kepemimpinan masing-masing, mendukung Militer Negara Kuwait sesuai kebutuhan.

Sehingga komposisi dari Angkatan Bersenjata Kuwait terbagi menjadi tiga angkatan militer utama Kuwait yakni Angkatan Darat Kuwait, Angkatan Udara Kuwait, dan Angkatan Laut Kuwait, yang mencakup Unit Marinir Komando Kuwait. Selain itu, terdapat formasi militer independen dan tambahan lainnya seperti halnya Kuwait Emiri Guard, yang merupakan pasukan tempur independen yang berasal dari abad kedelapan belas serta Brigade Komando ke-25, sebuah brigade tempur komando independen, Polisi Militer Kuwait dan Direktorat Dinas Kebakaran Militer Kuwait. Pengawal Nasional Kuwait atau The Kuwait National Guard, yang dianggap sebagai formasi tempur, independen dari Angkatan Bersenjata Kuwait (dan Kementerian Dalam Negeri Kuwait, yang mempertahankan beberapa formasi sendiri, termasuk Pasukan Perbatasan Darat Kuwait dan Penjaga Pantai Kuwait) dan merupakan pasukan internal utama untuk keamanan perlindungan perbatasan.

Dengan keberagaman komponen yang tergabung dalam angkatan bersenjata Kuwait, maka jumlah personel yang ada di dalamnya menjadi bentuk kekuatan yang mempengaruhi kapabilitas militer terkait dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya pada misi tertentu. *Global Fire Power* menyatakan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh angkatan bersenjata atau kekuatan militer ini dalam pelaksanaannya diukur tidak hanya melalui satu aspek kekuatan tertentu saja, namun ada aspek lain yang ikut dipertimbangkan dan diukur yakni beragam faktor-faktor yang keberadaannya menjadi penentu untuk menunjang bagaimana aspek militer menghadapi beragam tantangan maupun hambatan. Aspek-aspek yang berkaitan tersebut ditinjau melalui skor power index dari kapabilitas atau kekuatan yang dimiliki oleh militer suatu negara yang berupa total tenaga militer yang aktif, dan keuangan hingga kemampuan logistik dan geografi. Sehingga dapat ditinjau bahwa sebenarnya jumlah bagi personel militer aktif dalam suatu negara sangat penting untuk melihat bagaimana porsi dan

Kontribusinya bagi pencapaian kepentingan keamanan dan pertahanan suatu negara dalam misi-misi tertentu. Bahkan menurut laporan yang dibentuk oleh the London-based International Institute for Strategic Studies, Angkatan Darat Kuwait memiliki sekitar 11.000 personel, Angkatan Udara Kuwait 2.500, dan kapal patroli dan pesisir Angkatan Laut Kuwait 23.000 personil cadangan untuk semua layanan tidak termasuk pria dan wanita berseragam Kementerian Dalam Negeri dan militer Direktorat Dinas Kebakaran, beserta 6.600 pasukan Pengawal Nasional paramiliter Kuwait pada tahun 2007.

Terlepas dari jumlah tersebut, masih adanya anggapan bahwa sebetulnya jumlah personel militer yang tergabung dalam Angkatan Bersenjata Kuwait masih rendah mengacu dari kebijakan dan analisis yang berspekulasi, khususnya bagi aspek pelatihan dan kesiapan militer dianggap serius dan efektif di tingkat brigade dan skuadron. Sebab pada dasarnya, doktrin operasional pertempuran memiliki perbedaan di antara berbagai kekuatan pertempuran yang terbentuk dan keberadaannya tentu sangat bergantung pada kemampuan operasional dan formasi pengawakan umum dalam ukuran dan jenis pengepakan peralatan.

Sehingga dengan begitu, tidak hanya memperhatikan bagaimana jumlah dari personel militer yang ada, namun bagaimana pelatihan dan pengembangan aspek-aspek penunjang lainnya mampu untuk meningkatkan kapabilitas angkatan bersenjata baik secara kualitas maupun kuantitas yang berjalan beriringan dan saling melengkapi. Hal ini disebabkan angkatan bersenjata atau kelompok militernya dapat bersifat beragam dan muncul tidak hanya dari internal namun juga eksternal negara yang bersangkutan. Organisasi militer yang berjuang hari ini dapat dikatakan berada dalam lingkungan yang terletak di antara kompleksitas dan kekacauan dimana tidak hanya ancaman yang bersifat non-konvensional, tetapi juga ancaman yang bersifat konvensional ikut berjalan secara berdampingan. Maka dari itu, menjelaskan aspek-aspek militer yang menjadi komponen

penting dan perlu diperhatikan untuk mempersiapkan strategi militer nasional yang didukung dengan perencanaan berbasis kemampuan dan ditujukan untuk merancang militer dengan asimetris yang berbeda sehingga memiliki kemampuan yang dapat digunakan secara universal di berbagai media dalam melawan musuh maupun ancaman dan tantangan yang beragam secara signifikan.

Bagaimana bentuk kerjasama dan sinergi antara militer dan sipil di negara Kuwait? Kapabilitas militer juga dapat tergantung pada lingkungan strategis yang berada disekitarnya, seperti halnya yang dinyatakan oleh Yarger yang menggambarkan lingkungan strategis yang ditandai dengan sebuah tatanan dunia yang di dalamnya terdapat ancaman dimana keberadaannya sendiri bersifat tersebar dan tidak pasti, sehingga keberadaan konflik sendiri masih melekat tidak dapat diprediksi, hal ini yang kemudian menekankan pada ketergantungan atas kemampuan untuk mempertahankan dan mempromosikan kepentingan nasional yang mungkin dalam pelaksanaannya masih dibatasi oleh kendala sumber daya material dan personel.

Lebih dari satu dekade kemudian, seseorang dapat menyimpulkan bahwa kekacauan global telah meningkat secara signifikan dan beberapa keunggulan militer komparatif telah mulai terkikis. Setiap negara sekarang menghadapi banyak tantangan keamanan yang hadir secara terus menerus dari para aktor negara tradisional dan jaringan trans-regional dari kelompok sub-negara, antara lain - semua yang mengambil keuntungan dari perubahan teknologi yang cepat. Bahkan di abad 21 ini, dimana kemunculan beragam kekuatan besar di setiap kawasan tertentu yang mewarnai dinamika perubahan politik secara tidak tentu dan tidak dapat diprediksi. Kondisi ini yang kemudian menempatkan instrumen militer dihadapkan pada operasi yang lebih luas dan dengan batas yang semakin jauh. Dimana kesiapannya perlu disesuaikan dengan ancaman yang mungkin dapat hadir sehingga perencanaan berbasis kapabilitas ini menjadi elemen inti dari militer strategis meliputi proses

perencanaan, untuk menentukan validitas atau kebutuhan untuk perluasan.

Data terbaru menunjukkan bahwa negara-negara Arab menganut kepercayaan tinggi pada militer. Laporan Arab Barometer 2018-2019 mengungkap 49,4 warga negara Arab sangat percaya sektor militer.

Sedangkan 26 persen menaruh kepercayaan tingkat menengah pada militer. Negara-negara Arab yang disurvei terdiri dari Aljazair, Irak, Palestina, Yordania, Tunisia, Maroko, Kuwait, Sudan, Lebanon, Mesir dan Yaman. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa warga negara Kuwait termasuk dari bagian masyarakat yang percaya terhadap militer.

Militer diuntungkan dengan citranya sebagai penjamin stabilitas negara. Militer berusaha tampil mencegah perpecahan dan polarisasi politik. Alijla menawarkan agar publik dunia melihat bagaimana militer Arab digambarkan lewat media. Militer dianggap memainkan citra yang luar biasa di hadapan publik sebagai penolong negara dari ancaman luar dan dalam negeri. Itulah jawaban untuk mengetahui hubungan militer dan sipil di negara Arab termasuk didalamnya adalah Kuwait.

Bagaimana bentuk pelibatan militer dan sipil di negara Kuwait khususnya dalam menghadapi ancaman dari luar negeri Kuwait juga merupakan mitra penting Amerika Serikat dalam berbagai masalah keamanan regional dan pemimpin dalam Koalisi Global untuk mengalahkan ISIS serta meningkatkan kerja sama di bidang keamanan perbatasan, keamanan maritim, transfer senjata, keamanan siber, dan kontraterorisme.

Kebijakan politik yang merepresentasikan supremasi sipil ini juga berpengaruh terhadap arah kebijakan pemerintah dalam aspek pertahanan. Dan dengan adanya kerjasama ini, hak istimewa akses, pangkalan, dan penerbangan yang diberikan oleh Kuwait dalam memfasilitasi Amerika Serikat dan mitra Koalisi Global seperti dalam Perang Teluk Persia I atau *Gulf War* dengan kode nama Operasi Badai Gurun atau Operation Desert Storm, juga perang melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), serta operasi melawan al-Qa'ida, dan afiliasi regional dan global mereka.

Bahkan, Kuwait kemudian menjadi pangkalan logistik utama untuk operasi AS dan Koalisi di Irak selama Operasi Pembebasan Irak, menyediakan hingga 60 persen wilayahnya untuk digunakan koalisi. Kuwait juga membantu penarikan pasukan dan peralatan tempur AS dari Irak yang selesai pada 2011. Dari hubungan kerjasama yang erat antara Kuwait dengan Amerika Serikat, mendorong adanya perkembangan dan peningkatan kapabilitas militer Kuwait dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya di kawasan. Pada prinsipnya keterkaitan antara sipil dan militer di negara Kuwait tidak terlepas dari cerminan sejarah masa lalu dimana sinergi yang ditunjukkan terutama terkait arah kebijakan politik luar negeri yang sangat erat dan bergantung pada sumber kekuatan dari negara lain yakni Amerika Serikat.

Bagaimana tinjauan dari analisis SWOT tentang pelibatan militer dan sipil di negara Kuwait.

Kapabilitas atau kekuatan militer yang dimiliki oleh Kuwait pada tahun 2021 ini berada pada peringkat ke 71 dari 140 negara di dunia secara global jika dihitung dari laporan tahunan oleh Global Fire Power.¹⁵ Dengan peringkat ini, Kuwait dapat dikatakan sudah berada di pertengahan peringkat kekuatan militer secara global, meskipun masih ada beberapa kekurangan dalam aspek-aspek militer yang ada, namun ada pula beberapa potensi dalam aspek militer yang dapat dikembangkan untuk waktu yang akan datang.

Selain itu, meninjau dari catatan man power di Kuwait, dari keseluruhan populasi yang berjumlah sekitar 2,993,706, ada 55.0% atau 1,646,538 man power yang tersedia, dengan jumlah total personel militer 46,500 yang terdiri dari 15,500 personel aktif, 24,000 personel cadangan dan 7,000 paramiliter.

Jika kemudian dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah Timur Tengah, Kuwait memiliki kapabilitas yang dapat dipertimbangkan. Mengacu pada urutan yang disusun oleh Global Fire Power, ada negara yang termasuk ke dalam daftar kekuatan militer di kawasan Timur Tengah dengan Kuwait menduduki posisi ke 9 dari keseluruhan negara yang ada dimana Turki menduduki posisi pertama dan Lebanon menduduki posisi terakhir.

Peringkat tersebut merupakan hasil perhitungan terbaru pada tahun 2021 yang bersifat sementara karena sewaktu-waktu dapat berubah, yang memberikan kemungkinan bagi negara-negara kecil dengan teknologi yang lebih maju dapat bersaing dengan negara-negara yang lebih besar tapi kurang berkembang dalam teknologi. Intinya, seluruhnya kembali lagi kepada negara yang bersangkutan dan cara mereka untuk dapat mempertimbangkan serta menyusun strategi militer terbaik dalam memperdayakan komponen-komponen kekuatan militer untuk isu kepentingan nasional dalam suatu negara atau kawasan tertentu.

Jika melihat dari perkembangan kapabilitas militer yang dimiliki oleh Kuwait, khususnya pada tahun 1993 disaat setiap negara bagian memiliki setidaknya persediaan tank dan peralatan lapis baja lainnya, rudal pertahanan udara, pesawat tempur, helikopter bersenjata, dan kapal angkatan laut bersenjata rudal yang dapat digunakan untuk mencegah penyusup, Kuwait dinilai kurang siap dibandingkan yang lain serta belum pulih dari kerugian yang dideritanya dalam hal personel dan peralatan selama Perang Teluk Persia.

Hal tersebut disebabkan setelah pecahnya Perang Iran-Irak, semua negara Teluk mulai berlomba untuk memperkuat angkatan bersenjata mereka dengan mengubah senjata menjadi modern terlepas dari adanya hambatan dalam hal personel karena masyarakat lebih tertarik dengan peluang kerja yang lebih baik di sektor sipil.

Dari uraian diatas, maka dapat dijelaskan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala dalam pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan di Negara Kuwait dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

<div style="text-align: center;"> Faktor Internal Faktor Eksternal </div>	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Dukungan pemerintah 2. Kepercayaan masyarakat	1. Terbatasnya SDM/Personil
Peluang (O)	Strategi S – O 1. Mendorong masyarakat untuk menjaga hubungan baik antara sipil dan militer dimana militer cukup dipercaya dengan adanya berita- berita yang disebar di media internet. 2. Kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi dalam bentuk dukiungan yang diberikan kepada pemerintah	Strategi W – O 1. Menyebarluaskan informasi yang menarik warga untuk menjadi personil angkatan bersenjata melalui media sosial
1. Perkembangan teknologi		
Ancaman (T)	Strategi S – T 1. Kerjasama antar instansi atau badan dalam angkatan bersenjata Kuwait dan juga masyarakat dalam mengatasi setiap konflik ataupun ancaman yang mengintai 2. Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjaga harmonisasi hubungan antara sipil dan militer khususnya	Strategi W – T 1. Terbatasnya SDM atau personil yang siap sedia dalam menghadapi setiap konflik yang mungkin terjadi 2. Perkembangan teknologi tidak didukung oleh kemampuan SDM yang tidak dapat mempergunakan persenjataan dengan baik
1. Konflik 2. Perkembangan teknologi		

PENUTUP

Dari hasil pembahasan masalah maka dapat diketahui bahwa angkatan bersenjata Kuwait didirikan pada tahun 1963. Adapun pemimpin tertinggi adalah Emir yang dibantu oleh Putra Mahkota sebagai Wakil Komandan. Untuk sinergi militer dan sipil di Kuwait dapat terlihat dari tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat sipil kepada militer di Kuwait, sayangnya setelah terjadinya perang di kawasan teluk, nampak bahwa Kuwait mengalami kesulitan dalam sumber daya material dan personil sehingga memerlukan upaya untuk menarik warga masyarakat guna bergabung dalam militer.

Selain itu juga terdapat faktor lain yakni konflik yang selalu menghantui seperti halnya invasi yang dilakukan oleh Irak kepada Kuwait sehingga dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah/militer dengan masyarakat/sipil untuk selalu sedia dalam menghadapi segala macam ancaman. Karena ancaman yang nyata bagi Kuwait adalah dari negara luar yang merongrong kekayaan minyak bumi yang dimiliki oleh Kuwait.

Mayor Inf Edi Tri Heri Mulyanto, Abituren Akmil 2002 dan Lulusan Dikreg 60 Seskoad. Saat ini menjabat Pabandya Lidik Sinteldam II/Sriwijaya



SINERGI PERAN MILITER DAN SIPIL DALAM SISTEM PERTAHANAN DI NEGARA UKRAINA

Kompol Lilik Ardiansyah, SH, SIK, MIR, CPHR

Pendahuluan

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Sedangkan Angkatan Bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara berbeda-beda termasuk di Negara Ukraina.

Ukraina adalah sebuah negara di Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia di timur dan timur-laut; Belarus di barat-laut; Polandia dan Slowakia di barat; Hongaria, Rumania, dan Moldova di barat-daya; Laut Hitam di selatan;

dan Laut Azov di tenggara. Ukraina memiliki wilayah seluas 603.628 km², yang membuatnya sebagai negara terluas di Eropa dan terluas ke-46 di dunia. Sedangkan populasi sejumlah 44,5 juta jiwa menjadikan Ukraina sebagai negara berpenduduk terbanyak ke-32 di dunia. Dalam sistem pertahanannya, Presiden Ukraina, sebagai Panglima Tertinggi-in-Chief dari Angkatan Bersenjata Ukraina, mengeksekusi perintah dan kontrol atas Angkatan Bersenjata sesuai dengan Konstitusi Ukraina. Komando dan kendali atas Angkatan Bersenjata dan formasi militer lainnya dalam keadaan darurat dilaksanakan oleh Presiden Ukraina melalui markas umum (mirip dengan STAVKA Soviet), salah satu badan kerjanya adalah

Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Kementerian Pertahanan. Dalam hubungan antara sipil dan militer di Ukraina memiliki karakteristik tersendiri dan layak untuk didalami. Oleh karena itu, dalam esai ini penulis akan membahas bagaimana sinergi peran militer dan sipil di Negara Ukraina? Adapun pokok pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: Pertama. Bagaimanakah sistem pertahanan negara di negara Ukraina? Kedua. Bagaimanakah bentuk hubungan/ kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Ukraina?

Ketiga. Bagaimanakah bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem Pertahanan negara Ukraina, terutama ketika dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman dari luar negeri? Keempat. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala dalam pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Ukraina?

Pentingnya mempelajari hubungan sipil dan militer negara lain khususnya di Negara Ukraina adalah agar dapat kita ambil pelajaran dalam pembangunan hubungan sipil dan militer di Indonesia dimasa depan. Oleh karenanya, maksud yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai hubungan sipil dan militer di Negara Ukraina. Sedangkan tujuan penulisan esai ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pimpinan TNI khususnya TNI AD dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan sinergi antara sipil dan militer dalam mendukung pertahanan negara. Dan dalam rangka memfokuskan pembahasan pada tujuan yang telah ditetapkan maka ruang lingkup pembahasan esai ini difokuskan pada hubungan sipil dan militer dalam bidang pertahanan di Negara Ukraina dengan tata urut terdiri dari pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Pembahasan

Ukraina adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang menganut sistem semipresidensial dengan trias politica: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pusat negara dan kota terbesarnya adalah Kiev. Ukraina memelihara militer terbesar kedua di Eropa, setelah Rusia, jika personel cadangan dan paramiliter turut dihitung. Dalam hal ini, sistem pertahanan ukraina tidak hanya melibatkan pihak militer namun juga pihak sipil sebagai personel cadangan dan paramiliter.

Sistem pertahanan negara di negara Ukraina. Kemajuan organisasi dan pengembangan militer Ukraina (oleh Kementerian Pertahanan) dibagi menjadi tiga periode utama: Periode pertama dimulai dari 1991–1996 - pembentukan awal Angkatan Bersenjata Ukraina, reorganisasi;

Periode kedua dari 1997-2000 - organisasi dan pengembangan lebih lanjut dari Angkatan Bersenjata Ukraina; Periode ketiga 2001 tentang - reformasi dan pengembangan Angkatan Bersenjata Ukraina, memperkenalkan peralatan militer baru.

Aspek-aspek pembangunan periode pertama adalah pembentukan landasan hukum kegiatan Tentara Ukraina, penataan kembali strukturnya, pembentukan struktur pelaksana dan struktur pendukung yang sesuai, serta unsur-unsur lain yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Perkembangan pertama Angkatan Bersenjata juga dimulai dari pengurangan institusi militer, jumlah personel, dan jumlah persenjataan dan teknologi nuklir. Karena persenjataan dalam jumlah besar tidak diperlukan untuk Ukraina dan tidak dapat dipertahankan dengan anggaran pertahanan yang disediakan. Pada akhir tahun 1996, lebih dari 3.500 institusi militer yang berbeda dan 410.000 personel dibubarkan. Juga, jumlah persenjataan dan teknologi pertahanan berkurang: pesawat tempur - sebanyak 600 unit, helikopter - sebanyak 250, tank garnisun dan kendaraan bersenjata tempur sebanyak 2.400 dan 2.000. Sepanjang tahun 1992–1997 angkatan bersenjata berkurang sebanyak 400.000 prajurit. Lebih dari 1.300 unit, organisasi, instalasi komando dan kontrol dibubarkan selama periode itu. Pada akhir tahun 1999, kekuatan organisasi Angkatan Bersenjata berjumlah sekitar 400.000 orang, termasuk 310.000 militer dan 90.000 penduduk sipil.

Kementerian Pertahanan masih menyusun sistem kontrol sipil atas angkatan bersenjata, terkait dengan tugas-tugas pimpinan tertinggi dan masing-masing organisasi negara dan militer dalam hal komando dan kendali Angkatan Bersenjata. Oleh karena itu, Presiden Ukraina, sebagai Panglima Tertinggi-in- Chief dari Angkatan Bersenjata Ukraina, mengeksekusi perintah dan kontrol atas Angkatan Bersenjata sesuai dengan Konstitusi Ukraina dan undang-undang yang aktif. Komando dan kendali atas Angkatan Bersenjata dan formasi militer lainnya dalam keadaan darurat dilaksanakan oleh Presiden Ukraina melalui markas

umum, salah satu badan kerjanya adalah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Realisasi dasar-dasar konsep reformasi organisasi Komando dan Pengendalian angkatan bersenjata akan meninggalkan pengulangan dalam pekerjaannya, meningkatkan efisiensi, tingkat tanggung jawab dan efektifitas komando cabang tentara Ukraina.

Pelaksanaanya dengan mengurangi jumlah struktur komando dan kontrol serta tenaga mereka. Akibatnya, pada akhir 2005 kementerian pertahanan akan mengurangi strukturnya sebesar 37% dan tenaga kerjanya hampir setengahnya. Ukraina telah mengumumkan tujuan menjadikan tentaranya serba profesional pada tahun 2015. Pada tahap pertama pada tahun 2001 hingga 2005, sekitar sepertiga dari prajurit angkatan darat diganti dengan yang profesional. Selama tahap ketiga (pada tahun 2006 hingga 2010), jumlah profesional yang bertugas di ketentaraan direncanakan meningkat hingga 50%. Dan terakhir, pada tahap terakhir, tentara akan menjadi serba profesional. Perampingan tentara akan menyertai transisi ke tentara yang semuanya profesional. Dalam struktur komando sistem pertahanannya, Kementerian Pertahanan Ukraina bertanggung jawab atas pengelolaan pertahanan teritorial, pengembangan militer, mobilisasi jika terjadi perang dan kesiapan tempur. Staf Umum Ukraina memiliki tugas merencanakan manajemen pertahanan dan operasional angkatan bersenjata. Staf Umum adalah asisten Menteri Pertahanan Ukraina, dan sejak 1 Januari 2019 Menteri Pertahanan harus warga sipil.

Bentuk hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Ukraina Menurut undang-undang keamanan nasional Ukraina, warga sipil harus menjabat sebagai Menteri Pertahanan Ukraina mulai 1 Januari 2019. Kementerian Pertahanan (sipil) bertanggung jawab untuk: Dukungan untuk aktivitas sehari-hari Angkatan Bersenjata; Kesiapan misi dan mobilisasi; Nilai kombatan; Pelatihan untuk memenuhi misi dan keterlibatan yang ditugaskan; pendidikan dan pelatihan yang sesuai; Senjata dan perlengkapan - perlengkapan militer;

Material, pendanaan dan sumber daya lainnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh GS; Kontrol atas penggunaan sumber daya secara efektif; Mengembangkan interoperabilitas dengan kekuatan eksekutif, badan sipil, dan warga sipil; Kerjasama teknis militer dan militer internasional; Kontrol atas kepatuhan kegiatan Angkatan Bersenjata dengan Hukum; Mengembangkan kondisi untuk kontrol sipil atas Angkatan Bersenjata;

Sementara itu Badan utama untuk komando dan kendali operasional adalah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina (militer). Staf Umum Angkatan Bersenjata adalah organisasi militer utama, yang bertanggung jawab untuk: Perencanaan pertahanan Negara; Kontrol keterlibatan Angkatan Bersenjata; Koordinasi dan kontrol pencapaian misi pertahanan di bidang pertahanan oleh lembaga-lembaga kekuasaan eksekutif; Pemerintahan daerah; Formasi militer, didirikan sesuai dengan hukum Ukraina; Lembaga penegak hukum dalam kerangka hukum Ukraina dan pelaksana kebijakan legislatif Presiden Ukraina, Parlemen dan Kabinet Menteri.

Dalam hal ini terlihat deliniasi kewenangan antara Kementerian Pertahanan dan Staf Umum, perubahan struktural di Kantor Pusat Kementerian Pertahanan dan Staf Umum dilaksanakan dan optimalisasi sistem kendali operasional pasukan terus dilakukan. Sebagai akibat dari delineasi kewenangan tersebut, Kementerian Pertahanan bertanggung jawab atas kebijakan negara di bidang pertahanan, melaksanakan kontrol politik-militer dan administratif militer Ukraina, menentukan asas-asas perkembangan dan arah kemajuannya. Sedangkan Staf Umum melakukan perencanaan strategis penggunaan Angkatan Bersenjata dan formasi militer lainnya, serta melaksanakan perencanaan pertahanan dan melaksanakan pengendalian operasional atas Angkatan Bersenjata.

Samuel P. Huntington (1957) menyatakan bahwa kontrol sipil (civilian control) harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan relatif sipil terhadap militer yang merupakan bentuk pengendalian, baik subjektif maupun objektif sipil.

Salah satu sudut pandang dalam menilai hubungan sipil-militer adalah dengan cara melihat kontrol sipil terhadap militer. Pembahasan utama dalam konsep kontrol sipil adalah bagaimana meminimalkan power atau kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok militer. Dengan adanya kekuasaan sipil yang lebih tinggi dibanding militer, maka konsep kontrol sipil ini berlaku. Dalam hal ini, Huntington memberikan dua cara melakukan kontrol sipil. Jenis yang pertama adalah Subjective Civilian Control (Kontrol Sipil Subyektif). Menurut Huntington, cara ini merupakan cara yang paling mudah dilakukan. Kontrol sipil jenis ini dilakukan dengan memperkuat kekuasaan kelompok sipil melalui penguatan institusi sipil tertentu-parlemen atau presiden-, konstitusi negara, dan atau penguatan kelompok-kelompok sipil tertentu seperti pengusaha atau birokrat (Huntington 1957). Jenis yang kedua adalah Objective Civilian Control (Kontrol Sipil Obyektif). Cara ini ditempuh melalui penguatan profesionalisme militer, yakni dengan adanya pembagian kekuasaan antara kelompok militer dan kelompok sipil. Tujuan akhir dari kontrol sipil obyektif adalah memiliterkan kelompok militer sehingga mereka dapat fokus menjadi alat negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan.

Dengan demikian maka hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Ukraina lebih kepada *Objective Civilian Control* (Kontrol Sipil Obyektif) yaitu penguatan profesionalisme militer melalui pembagian kekuasaan antara kelompok militer dan kelompok sipil. Hal ini terlihat dari struktur komando sistem pertahanannya, dimana Kementerian Pertahanan Ukraina (sipil) bertanggung jawab atas pengelolaan pertahanan teritorial, pengembangan militer, mobilisasi jika terjadi perang dan kesiapan tempur. Sedangkan Staf Umum Ukraina (militer) memiliki tugas merencanakan manajemen pertahanan dan operasional angkatan bersenjata. Staf Umum juga ditempatkan sebagai asisten Menteri Pertahanan Ukraina sebagai pelaksana kebijakan Presiden di bidang pertahanan.

Bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem Pertahanan negara Ukraina.

Angkatan Bersenjata Ukraina (Zbroyni Syly Ukrayiny [ZSU]) adalah militer dari Negara Ukraina. Mereka adalah kekuatan utama dalam menghadapi agresi apa pun yang dapat ditunjukkan terhadap negara berdaulat Ukraina. Semua pasukan militer dan keamanan, termasuk Angkatan Bersenjata, berada di bawah komando Presiden Ukraina, dan diawasi oleh komisi permanen parlemen Verkhovna Rada. Angkatan Bersenjata Ukraina terdiri dari Ukraina Angkatan Darat, yang Angkatan Laut Ukraina, yang Angkatan Udara Ukraina, dan Airmobile Pasukan Ukraina.

Sementara peran sipil dalam menghadapi ancaman militer dari luar adalah melalui wajib militer sebagai kekuatan cadangan. Sebelumnya, Uni Soviet mewajibkan semua warga negara laki-laki yang mampu untuk menjalani dua tahun di angkatan bersenjata (tiga tahun jika direkrut menjadi angkatan laut), meskipun wajib militer dapat ditunda karena melanjutkan pendidikan tinggi. Dimungkinkan untuk direkrut menjadi pasukan militer non Kementerian Pertahanan seperti Penjaga Perbatasan KGB, Militsiya, atau Pasukan Dalam Negeri. Ketika Ukraina memperoleh kemerdekaannya, Ukraina mempertahankan kebijakan wajib militer, meskipun waktu dalam dinas dikurangi menjadi 18 bulan di angkatan laut dan satu tahun di semua dinas lainnya. Ukraina juga secara bertahap mulai merekrut tentara profesional, meskipun dalam hampir semua kasus seseorang harus bertugas sebagai wajib militer sebelum menjadi tentara profesional. Ukraina Naval Infanteri adalah layanan pertama yang diubah menjadi dikelola oleh marinir yang sepenuhnya profesional. Pada Oktober 2013, Presiden Yanukovich mengakhiri wajib militer di Ukraina, pada saat itu 60% pasukan Ukraina terdiri dari tentara profesional. Namun, karena intervensi militer Rusia 2014 di wajib militer Ukraina, serta mobilisasi parsial, diaktifkan kembali pada tahun 2014. Ukraina telah mengubah kelompok usia laki-laki yang memenuhi syarat untuk wajib militer untuk 2015 dari 18-25 menjadi kelompok usia 20-27 tahun.

Setelah menjalani masa tugas wajib militer Ukraina menjadi bagian dari cadangan tidak aktif dan memenuhi syarat untuk ditarik kembali untuk mobilisasi sampai mereka mencapai usia 55, usia 60 untuk petugas. Karena perang di Donbas, Ukraina telah melakukan mobilisasi parsial untuk mengisi posisi yang dibutuhkan di angkatan bersenjata, mengingat wajib militer yang telah bertugas sebelumnya, karena perang banyak wajib militer juga telah dipaksa untuk melayani lebih lama dari masa tugas 18 bulan awal mereka. Direncanakan pada tahun 2015 Ukraina akan menjalani tiga gelombang mobilisasi parsial, ini akan memungkinkan pasukan baru untuk menggantikan mereka yang bertugas lebih lama dari masa tugas awal mereka. Akibatnya, jumlah pembelotan dari Angkatan Bersenjata Ukraina telah meningkat secara substansial menyebabkan wajib militer Ukraina tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran.

Karena pemberlakuan kembali wajib militer, dan mobilisasi parsial, angkatan bersenjata Ukraina diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat dari sekitar 130.000 personel pada Desember 2014 menjadi sekitar 250.000 personel pada 2015. Semua pekerja medis di Ukraina, apa pun jenis kelaminnya, memenuhi syarat untuk dipanggil untuk layanan jika terjadi keadaan darurat nasional.

Kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala dalam pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Ukraina.

Berbicara mengenai pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Ukraina akan berkaitan dengan berbagai faktor baik yang berasal dari internal Negara Ukraina seperti sejarah, kondisi angkatan bersenjata dan lainnya, serta faktor eksternal seperti ancaman militer dari luar, hubungan dengan Negara tetangga dan lain sebagainya.

Untuk menganalisa faktor-faktor tersebut maka dapat diterapkan analisa SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*). Analisis SWOT memandu untuk mengidentifikasi hal-hal positif dan negatif di dalam lingkungan internal Negara Ukraina dan diluar lingkungan eksternal (OT) negara Ukraina. Jadi, analisis SWOT merupakan analisis dari kekuatan dan kelemahan dari suatu temuan data serta peluang dan ancaman di lingkungan eksternalnya. Dengan mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Ukraina, maka dapat diperoleh kesesuaian dalam pemecahan masalah dengan memilih keuntungan ketika terdapat peluang dan kekuatan, memanfaatkan peluang ketika menghadapi kelemahan dan peluang, mengerahkan kekuatan ketika menghadapi kekuatan dan ancaman, dan mengendalikan ancaman ketika menghadapi kelemahan dan ancaman di saat yang bersamaan. Hal tersebut sangat memungkinkan karena analisa SWOT dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor berpengaruh agar didapat strategi terbaik dalam pemecahan persoalan.



Berikut adalah analisa SWOT yang disusun dalam bentuk tabel analisa SWOT:

OT \ SW	Strength	Weakness
	<input type="checkbox"/> 30% industri pertahanan bekas Rusia berada di Ukraina <input type="checkbox"/> Personel militer yang profesional <input type="checkbox"/> Kemajuan industri militer Ukraina	<input type="checkbox"/> Garda Nasional (sipil) yang kurang memiliki kemampuan militer <input type="checkbox"/> Kekuatan personel militer yang kecil <input type="checkbox"/> Kurangnya kemampuan dalam melakukan pendidikan dan pelatihan
Opportunity <input type="checkbox"/> Dukungan dari NATO <input type="checkbox"/> Adanya kerjasama pertahanan dengan Negara2 lain	STRATEGI S-O <input type="checkbox"/> Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang : <input type="checkbox"/> Peningkatan kemampuan industry pertahanan	STRATEGI W-O <input type="checkbox"/> Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang : <input type="checkbox"/> Peningkatan kemampuan garda nasional
Threat <input type="checkbox"/> Kebergantungan ekonomi terhadap Rusia <input type="checkbox"/> Kepentingan Negara NATO terhadap Ukraina dalam menekan Rusia	STRATEGI S-T <input type="checkbox"/> Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman : <input type="checkbox"/> Peningkatan kemampuan personel militer	STRATEGI W-T <input type="checkbox"/> Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman <input type="checkbox"/> Peningkatan hubungan internasional di bidang pertahanan

Dari tabel analisa SWOT tersebut terlihat bahwa strategi yang dapat digunakan adalah Strategi yang berbasis S-T, S-O, W-O dan W-T sebagai strategi yang paling efektif. Dengan demikian Strategi dalam meningkatkan sinergi peran militer dan sipil dalam sistem pertahanan di negara Ukraina, yaitu:

Strategi SO. Strategi Peningkatan kemampuan industri pertahanan. dapat dilaksanakan dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Kerjasama dengan negara lain secara lebih luas dalam pengembangan industri militer. 2) Pengembangan industri swasta pendukung industri militer.

Strategi W-O. Strategi Peningkatan kemampuan garda nasional, dapat dilaksanakan dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pelatihan personel garda militer melalui kerjasama dengan negara lain. 2) Peningkatan penguasaan persenjataan.

Strategi S-T. Strategi Peningkatan kemampuan personel militer, dapat dilaksanakan dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pelatihan personel militer 2) Pelaksanaan kerjasama pelatihan bersama personel militer dengan negara lain.

Strategi W-T. Strategi Peningkatan hubungan internasional di bidang pertahanan, dapat dilaksanakan dengan upaya-upaya

sebagai berikut: 1) Membangun hubungan seimbang antara dengan NATO dan dengan Rusia. 2) Membangun hubungan kerjasama pertahanan dengan Negara lain seperti China dan juga Indonesia.

Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah bahwa system pertahanan Negara Ukraina menempatkan Angkatan Bersenjata Ukraina (Zbroyni Syly Ukrayiny [ZSU]) sebagai kekuatan utama dalam menghadapi agresi apa pun yang dapat ditunjukkan terhadap negara berdaulat Ukraina. Hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Ukraina lebih kepada Objective Civilian Control (Kontrol Sipil Obyektif) yaitu penguatan profesionalisme militer melalui pembagian kekuasaan antara kelompok militer dan kelompok sipil. Bentuk peran sipil dalam pertahanan ukraina diwujudkan melalui wajib militer yang disusun dalam garda nasional Ukraina.

Saran penulis, Negara ukraina tidak memfokuskan pada penambahan jumlah personel militer karena dapat membebani anggaran Negara namun lebih kepada pembentukan personel militer yang profesional. Hal ini dapat menjadi contoh bagi TNI untuk lebih memfokuskan pada pembentukan tentara yang profesional dan pembentukan komponen cadangan yang didukung dengan pengembangan industri pertahanan.

Kompil Lilik Ardiansyah, SH, SIK, MIR, CPHR adalah abituren Akademi Kepolisian tahun 2005 dan lulusan Master of International Relations Programme dari Victoria University of Wellington, New Zealand tahun 2015 serta alumni International Visitor Leadership Program di USA tahun 2018, dan Lulusan Dikreg LX Seskoad, saat ini menjabat sebagai Analis Kebijakan Bidang Pengendalian Personil Biro SDM Polda Jabar.



PERAN DIPLOMASI DAN NEGOSIASI DALAM MENCEGAH PERANG DI NEGARA REPUBLIC OF SERBIA

Mayor Inf Agus Purwanto, S.Psi

Pendahuluan

Diplomasi merupakan semua kegiatan dan interaksi untuk menjalankan politik luar negeri suatu negara terkait interaksi dan hubungannya dengan negara atau bangsa lainnya. Sedangkan Negosiasi atau perundingan adalah suatu upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi antara dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga.

Perang dan damai merupakan dualisme kehidupan manusia yang tak pernah kunjung selesai. Selama perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman intensitas perang semakin meningkat. Republik Federasi Yugoslavia terbentuk karena adanya kesamaan sejarah bahwa mereka pernah terjajah selama berabad-abad. Yugoslavia terdiri dari enam negara bagian, yakni Serbia, Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro dan Makedonia.

Pasca keruntuhan Yugoslavia, kehidupan politik dan ekonomi dari negara-negara bawahannya kehilangan arah. Apalagi pada perkembangannya, negara-negara seperti Kroasia, Slovenia, Makedonia dan Bosnia memproklamkan menjadi negara yang merdeka.³ Hal ini mendapat penolakan dari Serbia, Serbia berusaha untuk mempertahankan eksistensi Yugoslavia sebagai negara kesatuan di Kawasan Balkan.

Namun demikian, perang tetap tidak terhindarkan seperti terjadinya perang antara Serbiadan Bosnia pada tahun 1992-1995 yang berakhir dengan kesepakatan damai dan bergabungnya Serbia dengan Montenegro menjadi satu negara sampai kemudian Serbia memisahkan diri secara damai dan menjadi suatu negara yang berdiri sendiri pada 21 Mei 2006,. Walaupun demikian ternyata konflik masih terjadi di Serbia pada kenyataan di lapangan konflik tidak saja menimbulkan korban jiwa, harta benda dan juga mengakibatkan timbulnya arus pengungsian, sehingga berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional diantaranya ikut campur tangannya PBB dan NATO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan kekerasan maupun dengan cara diplomasi dan negosiasi. Karena diplomasi dan negosiasi sangat penting untuk menghindari terjadinya perang. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kendala dan permasalahan yang mengganggu pencapaian tujuan dari diplomasi dan negosiasi dalam mencegah perang di Negara Republic Of Serbia.

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka dapat diidentifikasi persoalan-persoalan dalam tulisan ini yaitu : pertama bagaimana latar belakang terjadinya masalah di negara Republic Of Serbia?

Kedua bagaimana langkah- langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi di negara Republic Of Serbia?; ketiga bagaimana lesson learned (proses pembelajaran) yang dapat di tinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi?. Untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu: “Bagaimana peran diplomasi dan negosiasi dalam mencegah perang di Negara Republic Of Serbia?”

PEMBAHASAN

Secara umum peran diplomasi dan negosiasi dalam mencegah perang di Negara Republic Of Serbia dapat dilaksanakan, namun dari segi bagaimana latar belakang terjadinya masalah di negara Republic Of Serbia. Demikian pula bagaimana langkah- langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi di negara Republic Of Serbia, bagaimana lesson learned (proses pembelajaran) yang dapat di tinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi.

Bila permasalahan tersebut tidak ditemukan solusi pemecahannya, tentu akan dapat menghambat diplomasi dan negosiasi dalam mencegah perang di Negara Republic Of Serbia sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dalam pembahasan berikut akan di sampaikan data/fakta yang terjadi dilapangan, keinginan dan harapan, kendala dan kelemahan yang selanjutnya akan dianalisa guna menemukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan di atas.

LATAR BELAKANG TERJADINYA KONFLIK DI NEGARA REPUBLIC OF SERBIA

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Serbia dulunya merupakan negara Yugoslavia, dimana era tahun 1990 an penuh dengan konflik yang berakhir dengan merdekanya negara-negara yang tergabung dalam negara Yugoslavia. Tahun 1991, Slovenia dan Kroasia, memerdekakan diri sepihak, kemudian dengan peperangan yang terjadi antara tahun 1992 sampai dengan 1995 antara Yugoslavia (Serbia) dengan Bosnia yang berakhir dengan merdekanya Bosnia pada tahun 1995.

Dan terakhir pada tahun 2008 Kosovo juga memerdekakan diri dari Serbia. Namun berdasarkan kenyataan dilapangan adanya perbedaan etnis, budaya dan agama serta dominasi Serbia terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan letak beberapa wilayah negara bagian yang strategis dalam konteks kegiatan ekonomi dan politik berujung pada konflik yang berkepanjangan di wilayah Serbia. Hal ini diakibatkan oleh runtuhnya rezim Yugoslavia yang membawa dendam lama etnis Serbia yang selama ini tidak mendapat perhatian dari Republik Yugoslavia dibawah pemerintahan Josip Broz Tito selaku presiden.

Berdasarkan data dan fakta yang ada, penulis berkeinginan seyogyanya diplomasi dan negosiasi dapat berperan untuk mencegah agar dikemudian hari tidak lagi terjadi konflik atau perang di wilayah Serbia baik yang dilakukan secara internal oleh etnis-etnis yang berdiam di wilayah tersebut ataupun ikut campurnya kekuatan atau negara lain dalam konflik di Serbia, dengan harapan agar terciptanya kondisi aman di kawasan tersebut dan tidak terjadinya pembantaian etnis-etnis tertentu di wilayah negara Serbia.

Dari kondisi yang ada, terlihat beberapa upaya yang dilakukan PBB, NATO, dan pemerintah Serbia untuk menghentikan konflik di Serbia, maka dapat dianalisis dengan menggunakan teori pendekatan kualitatif.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam latar belakang terjadinya konflik di negara Republic Of Serbia antara lain: pertama terdiri dari berbagai etnis; kedua adanya perbedaan agama dan kebudayaan dari warganya; ketiga adanya intervensi asing (NATO) dalam penyelesaian permasalahan internal yang terjadi di Serbia.

Sedangkan kelemahan- kelemahan yang ada dalam hal latar belakang terjadinya konflik di negara Republic Of Serbia yang ada adalah: pertama runtuhnya negara Yugoslavia yang membawa akibat dominasi etnis Serbia atas etnis-etnis lainnya; kedua tindakan represif berupa ethnic cleansing atau pembersihan etnis yang diambil Serbia memicu terjadinya konflik

Dengan memahami persoalan tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: pertama menanamkan sikap toleransi antar etnis; kedua menghormati dan menghargai pelaksanaan agama dan budaya dari masing-masing etnis yang ada; ketiga penyelesaian secara damai setiap konflik yang terjadi di wilayah negara Serbia tanpa meminta campur tangan asing terhadap konflik internal yang terjadi.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YANG DIGUNAKAN DALAM DIPLOMASI DAN NEGOSIASI DI NEGARA REPUBLIC OF SERBIA

Langkah-langkah strategis dalam negosiasi adalah sebagai berikut :

- a. Langkah strategi negosiasi babak Awal adalah: 1) Menawar atau meminta lebih dari yang diharapkan; 2) Jangan menyetujui tawaran pertama, karena tidak akan terjadi negosiasi lebih lanjut di mana kita bisa melakukan penawaran lebih baik; 3) Melakukan Flinch terhadap tawaran (reaksi menunjukkan kekegetan). Lakukan flinch sebagai reaksi terhadap penawaran dari pihak lawan. Mereka mungkin tidak berharap untuk mendapatkan apa yang tengah mereka minta; meskipun demikian, jika kita tidak menunjukkan keterkejutan, kita meng-komunikasikan bahwa apa yang mereka tawarkan adalah kemungkinan yang bisa kita terima; 4) Jangan konfrontatif. Jika pihak lawan memberikan posisi yang tidak bisa kita terima atau tidak kita setujui, maka kita jangan melawannya. Dan akan lebih baik lagi jika kita menyetujui pihak lawan pada awalnya, dan mengubahnya atau membalikannya dengan menggunakan formula *feel, felt, found*; dan 5) Jadilah penjual atau pembeli yang enggan.
- b. Langkah strategi negosiasi babak tengah adalah: 1) Kita harus menentukan orang yang kita hadapi sama dengan kita; 2) Jangan pernah melakukan kompromi, karena kesannya nanti kita akan kalah negosiasi; 3) Impase (tidak setuju terhadap satu masalah).

Untuk Menangani impase, maka kita harus menghindari atau mengalihkan topik/isu pembicaraan pembicaraan; 4) Stalemate, yaitu dua pihak masih mencari solusi, namun tak satupun dapat melihat jalan keluarnya. Maka untuk menghindarnya, kita harus mengganti salah satu elemen negosiasi, misalnya mengganti tim negosiator, memainkan waktu, mengubah lokasi pertemuan, dan lain-lain; 5) Deadlock, yaitu buntunya tahap negosiasi. Untuk menghindari deadlock, maka diperlukan kehadiran dari pihak ketiga sebagai mediator dari kedua belah pihak; 6) Kompensasi (*trade-off*). Ini adalah kompensasi yang saling memberi satu sama lain tanpa merugikan salah satu pihak.

- c. Langkah negosiasi babak akhir adalah: 1) Good guy and bad guy. Ada pihak atau tim baik dan jahat. Tim jahat mencoba menekan negosiasi, sedangkan tim baik melakukan negosiasi dengan cara yang lebih halus, padahal tawaran yang diajukan sama; 2) Nibbling, yaitu mengundur atau mengulur waktu dan intinya akan menguras energi orang; 3) Jangan berikan konsesi atau komisi terlalu besar, karena bisa menimbulkan kegagalan dalam negosiasi; 4) Gambit menarik kembali penawaran, menarik kembali dari kesepakatan yang sudah di sepakati; 5) Menempatkan diri supaya mudah di terima. Negosiator yang hebat adalah negosiator yang handal dalam menempatkan dirinya menjadi negosiator good guy. Penting untuk mencapai keberhasilan negosiasi sebagai fungsi utama diplomasi. Untuk keberhasilan tersebut diperlukan taktik atau strategi. Tiap taktik maupun strategi yang digunakan dalam negosiasi akan ikut mempengaruhi kesuksesan diplomasi. Strategi merupakan gambaran besar mengenai tujuan negosiasi. Terdapat empat (4) macam strategi yang dapat digunakan dalam negosiasi¹⁰ yang menghasilkan 4 (empat) kemungkinan adalah :1) Negosiasi Win-Win, atau dikenal sebagai negosiasi integratif. Strategi ini dipilih jika diinginkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan semua pihak;

2) Negosiasi Win-Lose, atau dikenal sebagai negosiasi distributif. Salah satu pihak mencapai seluruh atau sebagian besar hasil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan hasil apa-apa, atau mencapai hasil yang sangat kecil; 3) Negosiasi Lose-Lose, strategi ini dipilih Ketika negosiasi telah menampakkan jalan buntu atau tidak memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan, atau dapat dikatakan pihak-pihak yang berunding gagal mencapai kesepakatan; 4) Negosiasi Lose-Win, dikenal sebagai negosiasi akomodatif. Salah satu pihak tidak mendapatkan hasil apa-apa atau sangat kecil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak lain mencapai seluruh atau sebagian besar. Namun berdasarkan kenyataan ikut sertanya PBB dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Serbia dengan mengadakan perundingan perdamaian dan pengiriman pasukan perdamaian PBB ke wilayah konflik yang untuk mengawasi hasil perjanjian damai. Hal ini diakibatkan oleh masih terjadinya konflik kekerasan yang menimbulkan korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah negara Serbia.

Berdasarkan data dan fakta yang ada, penulis berkeinginan seyogyanya Serbia dapat mengambil langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi dengan wilayah yang berkonflik tanpa mempergunakan kekerasan atau perang, dengan harapan agar terciptanya kondisi aman di wilayah negara Serbia.

Dari kondisi yang ada, terlihat beberapa upaya yang dilakukan oleh organisasi dunia yaitu PBB dan NATO dan pemerintah Serbia dalam usahanya menghentikan konflik di Serbia seperti dengan melakukan gencatan senjata, perjanjian perdamaian dan lain sebagainya¹¹, maka dapat dianalisis dengan menggunakan teori pendekatan kualitatif.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pengambilan langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi di negara Republic Of Serbia antara lain: pertama adanya intervensi koalisi NATO

yang melakukan serangan ke wilayah konflik; kedua komunitas heterogen warga yang mendiami wilayah konflik merasa paling berhak atas wilayah tersebut; ketiga intensitas tindak kekerasan yang tinggi seperti perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan etnis tertentu. Sedangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam hal pengambilan langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi di negara Republic Of Serbia yang ada adalah: pertama konflik yang terjadi di Serbia merupakan konflik etnis bukan politis; kedua kehancuran rezim komunis. Dengan memahami persoalan tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut : pertama melakukan perundingan perdamaian yang diprakarsai oleh PBB dan Uni Eropa; kedua berakhir dengan perdamaian dan pengakuan kemerdekaan wilayah konflik; ketiga pengiriman pasukan perdamaian PBB guna menjaga perdamaian di wilayah konflik.

LESSON LEARNED YANG DIDAPAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF STRATEGI DAN PERSPEKTIF KOMUNIKASI

Proses pembelajaran dapat kita artikan sebagai sebuah kegiatan di mana terjadi penyampaian materi pembelajaran dari seorang tenaga pendidik kepada para peserta didik yang dimilikinya. Karenanya kegiatan pembelajaran ini sangat bergantung pada komponen-komponen yang ada di dalamnya. Dari sekian banyak komponen tersebut maka yang paling utama adalah adanya peserta didik, tenaga pendidik, media pembelajaran, materi pembelajaran serta adanya rencana pembelajaran. Sedangkan perspektif adalah sistematika subjektif yang unik dan berbeda yang ada pada setiap orang, dengan kata lain perspektif adalah sudut pandang yang digunakan oleh seseorang untuk menilai suatu fakta- bukan fakta itu sendiri-maka berdasarkan perspektif yang kita gunakan akan menghasilkan penilaian yang berbeda dengan orang lain. Begitu pula halnya dalam pencapaian hasil diplomasi dan negosiasi yang diinginkan diperlukan kemampuan berkomunikasi yang efektif dan persuasif serta mampu melakukan lobby yang efektif.

Untuk itu diperlukan strategi dan kemampuan berkomunikasi yang baik, seperti: 1) mencari informasi sebanyak-banyaknya terhadap tema atau masalah yang akan di bahas; 2) mempersiapkan hal yang ingin di-pertaruhkan dalam negosiasi, mengidentifikasi apa yang mungkin diinginkan oleh pihak lawan dan juga apa yang bisa kita tawarkan; 3) perencanaan mengenai konsesi atau kelonggaran dalam proses negosiasi; 4) mengidentifikasi dan menganalisa kekuatan kita; 5) persiapan lima menit pertama dalam negosiasi, membangun relasi dengan lawan negosiasi sehingga mereka memahami mengapa mereka harus menyelesaikan masalah. Konsekuensi dari penggunaan perspektif komunikasi adalah kearifan untuk menyatakan bahwa apa yang kita ketahui sekarang bukanlah kebenaran mutlak, melainkan hanya pemahaman yang diciptakan manusia.



Dan karena pemahaman kita adalah produk kemanusiaan, maka ia tunduk pada perubahan konseptual sebagaimana secara historis kita telah mengubah konsep dan perspektif untuk menciptakan pemahaman kita ini.¹⁶ Namun berdasarkan kenyataan dilapangan masih kurang optimalnya pelaksanaan diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh suatu negara. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya bargaining position yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang dipengaruhi oleh national power yang salah satunya adalah komponen militer.

Berdasarkan data dan fakta yang ada, penulis berkeinginan seyogyanya lesson learned (proses pembelajaran) yang didapat ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi dapat menjadi acuan negara dalam melakukan diplomasi dan negosiasi, dengan harapan agar strategi yang dilakukan dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

Dari kondisi yang ada, terlihat beberapa upaya yang dilakukan dalam proses pembelajaran dalam diplomasi dan negosiasi termasuk dalam pemakaian strategi dan komunikasi yang dipilih untuk memaksimalkan hasil, maka dapat dianalisa dengan menggunakan teori pendekatan kualitatif.



Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam lesson learned (proses pembelajaran) yang didapat ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi antara lain: pertama terbatasnya kemampuan negosiator yang dimiliki oleh negara; kedua bahasa yang digunakan ; ketiga keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi yang dimiliki oleh negara. Sedangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam hal lesson learned (proses pembelajaran) yang didapat ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi yang ada adalah: pertama faktor emosi dan prasangka pribadi; kedua kecakapan, kemampuan alat-alay pancaindra seseorang.

Dengan memahami persoalan tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: pertama meningkatkan kemampuan negosiator melalui pendidikan dan pelatihan; kedua menyeragamkan bahasa yang digunakan agar bisa dimengerti oleh semua pihak; ketiga melengkapi fasilitas dan peralatan komunikasi yang modern.



PENUTUP

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum peran diplomasi dan negosiasi dalam mencegah perang di Negara Republic Of Serbia, masih menghadapi permasalahan yaitu satu terdiri dari berbagai etnis, agama dan kebudayaan dari warganya maupun intervensi asing (NATO) dalam penyelesaian permasalahan internal yang terjadi di Serbia, dapat di atasi dengan menanamkan sikap toleransi antar etnis, menghormati, menghargai pelaksanaan agama dan budaya dari masing-masing etnis dan penyelesaian secara damai setiap konflik yang terjadi di wilayah negara Serbia tanpa campur tangan asing terhadap konflik internal; dua adanya intervensi koalisi

NATO yang melakukan serangan ke wilayah konflik, komunitas heterogen warga yang mendiami wilayah konflik merasa paling berhak atas wilayah tersebut dan intensitas tindak kekerasan yang tinggi seperti perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan etnis tertentu maka dapat diatasi dengan melakukan perundingan perdamaian yang diprakarsai oleh PBB dan Uni Eropa, berakhir dengan perdamaian dan pengakuan kemerdekaan wilayah konflik dan pengiriman pasukan perdamaian PBB guna menjaga perdamaian di wilayah konflik; tiga terbatasnya kemampuan negosiator yang dimiliki oleh negara, bahasa yang digunakan dan keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi maka dapat diatasi dengan meningkatkan kemampuan negosiator melalui pendidikan dan pelatihan, menyeragamkan bahasa yang digunakan agar bisa dimengerti oleh semua pihak melengkapi fasilitas dan peralatan komunikasi yang modern. Namun dari beberapa perjanjian-perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh Negara Serbia dengan negara-negara yang berkonflik alternatif yang dipilih dalam berdiplomasi dan bernegosiasi lebih menekankan kepada win-win solution atau sebuah kesepakatan yang menguntungkan semua pihak

Adapun sebagai saran di akhir tulisan ini adalah peran diplomasi dan negosiasi dalam mencegah perang di Negara Republic Of Serbia adalah perlunya peran serta semua pihak yang berkonflik untuk mengakhiri konflik agar tercipta perdamaian dan keamanan negara dan dunia pada umumnya sehingga dapat membantu diplomasi dan negosiasi dapat berperan dalam mencegah terjadinya perang di Republic Of Serbia.

Mayor Inf Agus Purwanto, S.Psi. Abituren Dikreg LX Seskoad. TA 2021 Saat ini bertugas di Dinas Psikologi Angkatan Darat



SESKOAD

TERBAIK, TERHORMAT DAN DISEGANI



“SATU LANGKAH KECIL DENGAN NIAT YANG KUAT AKAN MEMBAWA KITA KEPADA SEBUAH KESUKSESAN BESAR. MARI KITA SAMA-SAMA BANGUN SESCOAD DENGAN NIAT YANG SINGGUH-SINGGUH UNTUK MENDAPATKAN KESUKSESAN BESAR”

DANSESKOAD

MAYJEN Dr. ANTON NUGROHO, MMDS., M.A.

JAM DANSESKOAD, 12 JULI 2021





SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

ISBN 388053101-3



9 703880 531016